



<https://lpm.iainptk.ac.id>

# MONEY

INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DALAM  
PEMBELAJARAN

## 2023

● ● ● ● ●  
FTIK FUAD FEBI FASYA PASCASARJANA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONTIANAK TAHUN 2023





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 440 TAHUN 2023

TENTANG  
MONITORING DAN EVALUASI INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN TAHUN 2023  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tri Dharma perguruan tinggi yang inovatif dan efektif di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Tahun 2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Tahun 2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MONITORING DAN EVALUASI INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN TAHUN 2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran Tahun 2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban pelaksana kegiatan monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran Tahun 2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dari awal kegiatan sampai dengan selesai;
  2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- KETIGA : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Tahun 2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan jadwal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2023, tanggal 30 Nopember 2022, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BEI.003.004.AU.;





KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 09 Mei 2023

REKTOR,



 **SYARIF**



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 440 Tahun 2023  
 Tanggal : 09 Mei 2023  
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN TAHUN 2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan  
 Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Tahun 2023  
 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak

NO	N A M A / N I P	PANGKAT/ GOL/RUANG/ FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd NIP.197309052000031003	Pembina Tk.I/(IV/b)/ Lektor Kepala/Ketua LPM IAIN Pontianak	Penanggung Jawab
2	Drs. Mansur, M.Pd NIP.196706052000031010	Penata Tk.I /III/d/Lektor/ Koordinator Pusat APM LPM	Ketua
3	M. Hajianto, SH NIP.-	-	Sekretaris
4	Nur Rahmiani, M.Pd NIP.198902152019032006	Penata Muda Tk.I/(III/b)/ Koordinator Pusat Kurikulum, Pembelajaran dan Asesmen LPM	Anggota
5	Vidya Setyaningrum, S.Pd.M.Pd NIP.198909302019032005	Penata Muda Tk.I/(III/b)/ Koordinator PPM FTIK	Anggota
6	Arif Wibowo, SH.,MH	Dosen Tetap Bukan PNS/Koordinator PPM FASYA	Anggota
7	Hani Meilita Purnama Subardi, SE.,M.Ak NIP.199305072020122013	Penata Muda Tk.I/(III/b)/ Koordinator PPM FEBI	Anggota
8	Adiansyah, M.Pd.I NIP.198708302020121003	Penata Muda Tk.I/(III/b)/ Koordinator PPM FUAD	Anggota
9	Dr. Wahab, S.Ag, M.Ag NIP.197507152006041022	Pembina/(IV/a)/ Lektor Kepala/ Koordinator PPM Pascasarjana	Anggota
10	Dr. Erwin, S.Ag, M.Ag NIP.197505032005011006	Pembina Tk.I/(IV/b)/ Lektor Kepala/Koordinator Pusat Pengembang Standar Mutu LPM IAIN Pontianak	Anggota
11	Ajeng Vashqie Varaulizza, S.Kom, M.M NIP.198604052009012006	Penata/III/c/ Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator pada Sub Bagian TU LPM IAIN Pontianak	Anggota



*Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak*

Nomor : 340 Tahun 2023  
 Tanggal : 09 Juni 2023  
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI INTEGRASI PENELITIAN DAN  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN  
 TAHUN 2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA  
 ISLAM NEGERI PONTIANAK

Jadwal Kegiatan  
 Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada  
 Masyarakat dalam Pembelajaran Tahun 2023  
 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat persiapan panitia	Mei 2023
2	Rapat teknis pelaksanaan monev	Mei 2023
3	Pengumpulan Data dari masing-masing UPPS	Mei-Juni 2023
4	Analisis data monev	Juni 2023
5	Penulisan laporan hasil monev	Juni 2023
6	Penyampaian laporan hasil monev	Juni 2023
7	Ekspose hasil monev	Juni 2023



## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala kerendahan hati, kami ingin menyampaikan ungkapan syukur yang mendalam atas petunjuk-Nya, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak untuk tahun 2023. Proses Monev ini telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan didukung oleh Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 440 Tahun 2023.

Dalam laporan ini, kami mencatat hasil-hasil temuan yang telah mendapatkan respon dari para pihak yang terlibat, terutama para dosen di IAIN Pontianak, terkait dengan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Selain itu, laporan ini juga mencakup rekomendasi untuk perbaikan dan langkah-langkah selanjutnya. Kami berharap bahwa temuan-temuan ini akan menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan yang lebih baik dalam pelaksanaan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen di IAIN Pontianak, baik dalam proses maupun kualitasnya.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam suksesnya pelaksanaan Monev ini, terutama kepada pimpinan institusi, pimpinan fakultas, program studi, LPM beserta timnya, dan tentu saja kepada para dosen yang telah berpartisipasi dalam pengisian survei Monev. Tanpa kerjasama dari seluruh pihak ini, pelaksanaan Monev ini tidak akan berjalan dengan lancar seperti yang telah direncanakan. Kami mengakui bahwa temuan-temuan yang muncul dari Monev ini akan selalu menjadi dasar bagi upaya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan Monev di masa mendatang.

Oleh karena itu, kami ingin menyatakan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan Monev ini. Semoga kerja sama yang baik ini akan terus berlanjut dan menjadi landasan untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan dan kualitas



Monev di masa depan.

Kami berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT, mengabdikan pikiran, ilmu pengetahuan, pekerjaan, dan pelaksanaan tanggung jawab kami. Semoga apa yang telah kami kerjakan menjadi ladang amal yang membawa manfaat kepada seluruh umat manusia, serta menjadi catatan baik di hadapan-Nya. Semoga Dia menerima doa kami. Aamiin.

Pontianak, November 2023

Ketua Tim,



**Drs. Mansur, M.Pd**

NIP. 196706052000031010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	3
A. PENDAHULUAN .....	5
B. TUJUAN.....	8
C. DASAR HUKUM.....	9
D. SASARAN.....	11
E. DESKRIPSI PELAKSANAAN.....	12
1. Tahapan Kegiatan.....	12
2. Kronologis Kegiatan.....	12
3. Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Integrasi.....	13
F. PANITIA PELAKSANA.....	14
G. HASIL YANG DICAPAI.....	16
H. PENUTUP .....	16

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**MONITORING DAN EVALUASI INTEGRASI PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM  
PROSES PEMBELAJARAN**

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada tahun akademik 2022-2023 bertujuan mengumpulkan data dan informasi relevan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran di setiap program studi IAIN Pontianak. Evaluasi ini tidak hanya menjadi landasan bagi keputusan manajemen internal, namun juga memungkinkan perbaikan dan pengembangan kontinu dalam pelaksanaan pembelajaran dosen. Institusi menegaskan akuntabilitasnya terhadap standar mutu dengan fokus pada integrasi penelitian dan PkM dalam pengalaman pembelajaran.

Evaluasi ini tidak sekadar alat pengukur, tapi juga menjadi sarana pengembangan mutu program studi dengan memberikan rekomendasi kepada pimpinan program studi dan masukan untuk inovasi serta perbaikan ke depan. Seluruh data yang terkumpul menjadi bagian penting dari sistem penjaminan mutu internal dan akan mendukung dokumen akreditasi perguruan tinggi dan program studi di IAIN Pontianak. Ini membuktikan bahwa evaluasi ini tidak hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai panduan penting untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan.

# **LAPORAN TENTANG MONITORING DAN EVALUASI INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

## **A. PENDAHULUAN**

Pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan tiga elemen yang saling terkait dan berkesinambungan dalam konteks pendidikan tinggi. Mereka adalah pilar-pilar utama dalam membentuk pola pikir yang seharusnya menjadi dasar di setiap perguruan tinggi. Hal ini akan mendorong terciptanya inovasi dan karakter akademis yang kuat di masa depan.

Hasil penelitian yang dihasilkan oleh para dosen seharusnya tidak hanya menjadi pengetahuan yang terkungkung dalam lingkungan akademis, melainkan juga harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran mahasiswa. Ini menciptakan suatu lingkungan di mana pengetahuan yang ditemukan dapat diaplikasikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melibatkan mahasiswa dalam proyek penelitian dan pengabdian. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, mendorong mahasiswa untuk berpikir ilmiah, dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa penelitian, pengabdian, dan pengajaran adalah substansi utama dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Oleh karena itu, aspek Tri Dharma perguruan tinggi (penelitian, pengabdian, dan pengajaran) harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tinggi.

Selanjutnya, penerapan Tri Dharma perguruan tinggi yang baik dan berkualitas mendorong perlunya sistem penjaminan mutu internal. Sistem ini bertujuan untuk mengawasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah salah satu strategi untuk



meningkatkan kualitas perguruan tinggi, dan hal ini sejalan dengan tujuan Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010, yang menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam konteks penjaminan mutu, butir-butir mutu yang ditetapkan termasuk kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang), mahasiswa, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri. Penjaminan mutu bukanlah tindakan mencari kesalahan, melainkan suatu upaya perbaikan berkelanjutan yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Dengan demikian, penjaminan mutu menjadi suatu pekerjaan rutin yang perlu dilakukan secara terus menerus, dengan fokus pada tindakan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di setiap perguruan tinggi.

Proses monitoring merupakan suatu tahap penting yang dapat dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai personil. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan pencapaian hasil yang sesuai dengan standar, peraturan, pedoman, dan program yang telah ditetapkan dalam rangka pengembangan kemajuan tertentu. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data. Hal ini melibatkan perumusan rencana sasaran, desain instrumen, observasi lapangan, dan analisis data, sehingga dapat memberikan gambaran tentang kinerja unit kerja terkait dalam mencapai kualitas operasional yang diharapkan.

Kegiatan monitoring juga memiliki tujuan untuk mengevaluasi apakah indikator keberhasilan sesuai dengan standar, peraturan, pedoman, atau program yang harus diimplementasikan oleh unit kerja. Monitoring ini membantu memastikan bahwa pencapaian output kualitas operasional sesuai dengan yang diharapkan (outcome).

Proses monitoring dan evaluasi menjadi integral dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAIN Pontianak. Ini melibatkan berbagai unit kerja dan elemen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses SPMI ini mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan.

Monitoring dan evaluasi juga berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran. Hal ini mencakup pengumpulan, analisis, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen terkait pelaksanaan pembelajaran integratif. Fokus utama dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang terintegrasi dari kegiatan penelitian dan PkM dosen. Informasi yang dikumpulkan mencakup bentuk, pola, dan materi pembelajaran integratif dosen, serta bagaimana integrasi penelitian dan PkM dilakukan dalam pembelajaran. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi upaya perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran integratif dosen di IAIN Pontianak.

Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam konteks integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran telah diakui dan diatur dalam Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Pontianak Nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan PkM dalam Pembelajaran di lingkungan IAIN Pontianak.

Selanjutnya, perubahan dalam standar penilaian mutu pendidikan tinggi, termasuk SPMI dan akreditasi BAN-PT, telah menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. Perubahan ini mencakup pergeseran dari 7 standar ke 9 kriteria, yang telah diterapkan sejak April 2019. Perubahan ini mendorong perguruan tinggi dan para dosen untuk secara lebih nyata melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, sesuai dengan peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi dan Matrik Penilaian dalam IAPT 9 kriteria.

Dalam rangka mengikuti regulasi tersebut, penting untuk mencatat bahwa monev ini dilakukan kepada seluruh dosen yang mengajar di IAIN Pontianak, termasuk dosen tetap ASN, dosen tetap non-ASN, dan dosen tidak tetap, dengan berbagai jenjang kepangkatan fungsional. Secara substansial, monev ini memerlukan pemantauan yang mencakup tiga aspek penting: kebijakan dan pedoman pelaksanaan integrasi, bukti pelaksanaan proses integrasi pembelajaran, dan bukti pemantauan dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Dengan pemantauan dan evaluasi yang cermat, upaya perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran yang terintegratif dapat menjadi lebih efektif. Selain itu, hasil monev juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pimpinan perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam konteks pembelajaran integratif dosen di IAIN Pontianak.

## **B. TUJUAN**

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian (Research) dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam konteks proses pembelajaran memiliki tujuan utama untuk mengakuisisi data dan informasi yang tidak hanya aktual, tetapi juga substansial terkait dengan penyelarasan dan penggabungan hasil-hasil karya ilmiah serta penerapan hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan oleh para pendidik ke dalam kerangka pembelajaran selama tahun akademik 2022-2023. Informasi yang terhimpun ini menjadi landasan bagi pengambilan keputusan strategis, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan, evaluasi, perbaikan, dan/atau modifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan serta peningkatan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para pendidik di setiap program studi yang terdapat di IAIN Pontianak pada semester genap 2022-2023

Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan kualitas pembelajaran yang dijalankan oleh dosen. Data yang terhimpun akan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan manajemen oleh pihak internal pengawas pendidikan. Evaluasi ini juga akan mengevaluasi seberapa efektifnya rencana dan pelaksanaan pembelajaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lebih dari sekadar

evaluasi, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada dosen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran mereka, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Melalui pendekatan ini, institusi juga menegaskan akuntabilitasnya terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pelaksanaan pembelajaran oleh dosen di seluruh program studi. Evaluasi ini bukan hanya sekadar alat pengukur, tetapi juga menjadi sarana untuk pengembangan mutu program studi dengan fokus pada pelaksanaan dan mutu pembelajaran yang diterapkan oleh dosen. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan program studi, evaluasi ini menjadi dasar bagi pembinaan dosen yang perlu meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan standar layanan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan masukan untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik dalam konteks penilaian kualitas pembelajaran yang sudah ada maupun upaya inovasi dan perbaikan ke depan. Seluruh data yang terkumpul dari evaluasi ini juga menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal, yang akan menjadi komponen penting dalam dokumen akreditasi perguruan tinggi dan program studi di IAIN Pontianak.

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
11. Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
14. Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran.
15. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 05 Juni 2018.
16. Surat Keputusan Rektor Nomor 8 tahun 2017 tentang Dokumen Anjab di lingkungan IAIN Pontianak.
17. Pedoman Penelitian Dosen di lingkungan IAIN Pontianak.
18. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Pontianak tahun 2019.
19. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Pontianak tahun 2019.
20. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
21. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
22. Surat Keputusan Rektor Nomor 96 tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Internal IAIN Pontianak.

23. SK Rektor Nomor 440 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Integrasi Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.

#### D. SASARAN

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini, fokusnya adalah pada pengumpulan data terkait integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh para Dosen di IAIN Pontianak ke dalam proses pembelajaran. Penilaian ini didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku, seperti Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, dan khususnya Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019. Ruang lingkupnya mencakup beragam aspek terkait dengan integrasi Penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, sebagaimana terperinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ruang lingkup (aspek) Monev Integrasi tahun 2022

Substansi Intergrasi Penelitian dan PkM	Aspek (item) Monev
(1)	(2)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya kesinambungan aspek tri dharma dosen</li><li>2. Proses pengembangan dari materi ajar</li><li>3. Sosialisasi pengetahuan baru (empiris-hasil penelitian -PkM)</li><li>4. Sumber materi ajar</li><li>5. Sebagai bagian dari proses pembelajaran</li><li>6. Melibatkan mahasiswa di dalamnya</li><li>7. Mencantumkan dalam sub materi ajar</li><li>8. Memasukkannya sebagai sumber rujukan</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran</li><li>▪ Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran</li><li>▪ Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dosen</li></ul>

Sasaran dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini adalah menilai bagaimana integrasi kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah diimplementasikan dalam proses pembelajaran oleh seluruh dosen di IAIN Pontianak selama tahun 2023. Respondennya terdiri dari semua dosen yang mengajar di IAIN Pontianak selama periode 2022-2023.

## **E. DESKRIPSI PELAKSANAAN**

### **1. Tahapan Kegiatan**

Intisari kegiatan monitoring dan evaluasi Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dosen IAIN Pontianak tahun 2023 ini dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan data hasil penelitian dan PkM dosen yang dijadikan sebagai referensi, bahan kajian atau tema diskusi mahasiswa selama rentang tahun akademik 2022-2023.

### **2. Kronologis Kegiatan**

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dosen tahun 2022-2023.
- b. Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu membentuk tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan unsur internal kampus (LPM) dan eksternal (di luar kampus IAIN Pontianak).
- c. Tim berkoordinasi dengan Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu, Koordinator Pusat PKPA, serta Koordinator Pusat Unit Penjamin Mutu Fakultas dan Pascasarjana untuk membuat rencana monitoring dan evaluasi menyiapkan instrumen dan dokumen yang diperlukan.
- d. Panitia dibantu tim mengumpulkan dokumen formal integrasi, bukti sah pelaksanaan integrasi, dan sistem pengendalian monitoring dan evaluasi integrasi.

- e. Tim monitoring melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.
- f. Tim monitoring dan evaluasi melakukan publikasi hasil monitoring dan evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dosen, di hadapan para dosen yang diundang, dan atau atas nama jabatannya.
- g. Tim menyampaikan laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu IAIN Pontianak.
- h. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu menyerahkan laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Ketua LPM IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

### 3. Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Integrasi

Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat kedalam pembelajaran selama 1 (satu) tahun ajaran penuh yaitu tahun akademik 2022-2023. Untuk pengumpulan data, analisis, interpretasi dan publikasi hasil monev dilaksanakan setelah tahun akademik berakhir dan diagendakan mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Monev Integrasi 2023

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat Persiapan Panitia	Juli 2023
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Monev	Agustus 2023
3	Pengumpulan Data	September 2023
4	Analisis Data Monev	Oktober 2023
5	Penulisan Laporan Hasil Monev	Oktober 2023
6	Penyampaian Laporan Hasil Monev	November 2023
7	Ekspose (Publikasi) hasil Monev	Desember 2023

## F. PANITIA PELAKSANA

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran dosen tahun 2022, yang dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 340 tahun 2022. Panitia dimaksud terdiri dari:

Penanggung Jawab	: Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd (Ketua LPM)
Ketua	: Drs. Mansur, M.Pd
Sekretaris	: M. Hajianto, SH
Anggota	:
	1. Nur Rahmiani, M.Pd
	2. Vidya Setyaningrum, M.Pd
	3. Hani Meilita Purnama, SE., M.Ak
	4. Adiansyah, M.Pd.I
	5. Dr. Wahab, S.Ag., M.Ag
	6. Dr. Erwin, S.Ag., M.Ag
	7. Ajeng Vasqy Farauliza, S.Kom., MM

Adapun peran dari masing-masing panitia adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab  
Bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan dari perencanaan, persiapan serta pelaksanaan kegiatan.
2. Ketua Panitia
  - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepanitiaan
  - b. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
  - c. Merencanakan dan melaksanakan program Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.

- d. Mengakomodir seluruh panitia Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- e. Mengambil dan menentukan kebijakan yang dianggap penting untuk diambil atas persoalan panitia Monitoring dan Evaluasi Integrasi.
- f. Membuat laporan akhir atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen tahun 2022-2023.

### 3. Sekretaris

- a. Bertanggungjawab terhadap ketertiban dan kelancaran administrasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- b. Mengelola administrasi kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- c. Menjadwalkan dan membuat notulensi rapat-rapat kegiatan.
- d. Membuat kebutuhan surat menyurat (administrasi) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- e. Menginventarisir peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- f. Mengelola dana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran.
- h. Bersama ketua panitia, melaksanakan evaluasi terhadap hasil kegiatan.
- i. Bersama ketua membuat laporan tertulis yang akan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan.

### 4. Anggota

- a. Menyiapkan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- b. Berkoordinasi dengan ketua panitia dan sekretaris dalam pengadaan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan.

- c. Membuat dekorasi dan persiapan ruangan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- d. Mengadakan kelengkapan spanduk untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen.
- e. Bertanggungjawab terhadap konsumsi kegiatan.

## G. HASIL YANG DICAPAI

Hasil monev Integrasi Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran ini setidaknya dapat dilihat dalam beberapa poin utama kesimpulan ini, mulai dari dokumen kebijakan integrasi, bukti sah pelaksanaan integrasi, dan bukti pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Integrasi ini.

Lebih detil mengenai keluaran dari kegiatan Monev Integrasi ini disampaikan secara utuh dan menyeluruh dalam narasi laporan hasil Monev Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen tahun 2022-2023 (laporan lengkap *sebagaimana terlampir*).

## H. PENUTUP

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Integrasi penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran Dosen di lingkungan IAIN Pontianak yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak

Ketua,

Korpus Audit dan Pengendalian Mutu,



**Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd**  
NIP. 197309052000031003

**Drs. Mansur, M.Pd**  
NIP. 196706052000031010

**Hasil Monitoring dan Evaluasi**  
**Integrasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam**  
**Proses Pembelajaran Tahun 2023**

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
<b>I Fakultas Syariah (Fasya)</b>					
<b>A Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)</b>					
1	Penerapan Restorative Justice oleh Aparat Penegak Hukum di Kota Pontianak	Moh. Fadhil	Hukum Pidana	Hasil penelitian menjadi bahan kajian di dalam RPS	2022
2	Bisnis Wisata Religi Makam Keramat Fiktif di Pontianak dan Sekitarnya (Krisis Hukum Islam di Tengah Kesulitan Ekonomi Muslim)	Abu Bakar	Islam dan Budaya Lokal	Hasil penelitian menjadi bahan kajian di dalam RPS	2022
3	Praktik Sidang Sengketa Ekonomi Syariah pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak (Studi Pengembangan Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Syariah)	Rasiam	Praktek Peradilan	Hasil penelitian menjadi bahan kajian di dalam RPS	2022
4	Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	Arif Wibowo	Hukum Acara PTUN	Hasil penelitian menjadi bahan kajian di dalam RPS	2023
5	Pola Perkembangan Norma dan Sanksi Suap dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah	Rusdi Sulaiman	Ushul Fiqih Bisnis dan Keuangan	Hasil penelitian menjadi bahan kajian di dalam RPS	2020
<b>B Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)</b>					
1	Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama	Dr. Dahlia Haliah Ma`u, M.HI, Dra. Hj. Wagiyem, M,Ag	Fiqh Munakahat	Buku Ajar	
2	Verba Preposisi dalam Al-Qur`an	Ardiansyah, S.S., M.Hum	Al-Arabiyah Liddirasatil Islamiyah	Materi Perkuliahan	
3	Eksplorasi Bahasa Arab dalam Doktrin Agama di Media Sosial	Ardiansyah, S.S., M.Hum	Bahasa Arab	Subbab dalam buku ajar/ materi perkuliahan	
4	Pontianak Islamic Higher Education Lecturer and Student`s Perception on Utilizing Borneo Culture Based EIS Material	Sa`dulloh Muzammil, M.Pd	English for Islamic Studies	Materi Perkuliahan	



No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
<b>II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)</b>					
<b>A Program Studi Akuntansi Syariah (AkS)</b>					
1	Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar	Verdianti, M.Sc,AK	Analisis Laporan Keuangan	Jurnal	2023
2	Increasing Reading Literacy in Al-Barokah Islamic Boarding School Student in Sungai Asam Village through Gerakan Literasi Sekolah	Fitri Jayanti, M.Pd	B. Indonesia	Jurnal PKM	2022
3	Increasing Reading Literacy in Al-Barokah Islamic Boarding School Student in Sungai Asam Village through Gerakan Literasi Sekolah	Aulia Azimi, S.E., M.E	Pengantar Ekonomi	Jurnal PKM	2022
4	Analisis Pengaruh E-Money Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2021	Aulia Azimi, S.E., M.E	Teori Ekonomi Makro	Jurnal	2023
5	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Rumah Makan Aruza Pontianak	Sabirin, SE., M.Ak	Pengantar Akuntansi	Jurnal	2023
6	Pengaruh Etika Profesi dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit	Sabirin, SE., M.Ak	Auditing	Jurnal	2023
7	Analisis Tingkat Kesehatan PT.BNI Syariah dengan Menggunakan Rasio Keuangan yaitu Rasio Likuiditas dan Economic Value Added (EVA)	Sabirin, SE., M.Ak	Akuntansi Perbankan Syariah	Jurnal	2021
8	Analisis Kerja Sama Sapi Potong Dalam Tradisi Masyarakat Madura Di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap	Pratiwi Kurniati, SE.,M.Ak	Akuntansi Syariah	Jurnal	2022
9	Pengungkapan Islamic Social Responsibility (ISR) Perbankan Syariah Pada 9 Negara Asia Tenggara Dan Timur Tengah	Pratiwi Kurniati, SE.,M.Ak	Teori Akuntansi Syariah	Buku	2022
10	Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018	Pratiwi Kurniati, SE.,M.Ak	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	Jurnal	2022
11	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Al-Muraqabah pada Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara 2020	Pratiwi Kurniati, SE.,M.Ak	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	Jurnal	2023

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
12	Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Metode RGEC dan SCnP Model Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2016-2020	Dini Lestary, S.E., M.Ak	Teori Akuntansi Syariah	Jurnal	2022
13	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah	Monica Olivia, S.E., M.Ak	Akuntansi Perbankan Syariah	Jurnal	2021
14	The the effects of region original revenue, general fund allocation, specific fund allocation, capital expenditure to economic growth in West Borneo Province	Monica Olivia, S.E., M.Ak	Akuntansi Sektor Publik	Jurnal	2022
15	Evaluasi Pelatihan Olahdata Statistik Menggunakan Aplikasi SPSS: Model Evaluasi CIPP	Indah Purnama Sari, M.Pd	Metodologi Penelitian	Jurnal PKM	2023
16	Rancangan Aplikasi Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Google Spreadsheet untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) CV Wira Gemilang	Muhammad Tezar, M.Ak., BKP	Teknologi Aplikasi Keuangan	Jurnal	2022
17	Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia	Hani Meilita Purnama Subardi, M.Ak	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	Jurnal	2021
18	Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS untuk Periode Tahun 2013 Hingga 2017	Hani Meilita Purnama Subardi, M.Ak	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	Jurnal	2023
<b>B Program Studi Ekonomi Syariah (ES)</b>					
1	Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Barat periode 2010-2020	Aulia Azimi	Ekonomi Pembangunan	RPS, sub teori model pertumbuhan ekonomi dalam bentuk studi kasus	2021
2	Pengaruh Pembayaran Non Tunai, Velocity of Money dan Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia	Anggatia Ariza	Pengantar Ilmu Ekonomi	RPS, sub teori inflasi dalam bentuk studi kasus	2021
3	Analysis of Fundraising and Distribution of Zajat, Infaq and Sadaqah at PT. Cepat Versi Arli in Slingkawang City	Rahmah Yulisa Kalbarini	Ekonomi Zakat	RPS, sub teori Pengelolaan dan distribusi zakat	2022

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
				dalam bentuk studi kasus	
<b>C</b>	<b>Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS)</b>				
1	Dasar Kepemimpinan	Dr. Fauziah, S. Pd, MM.			2022
2	Actualization Of Performance Management Models For The Development Pf Human Resources Quality, Economic Potential, And Financial Governance Policy in Indonesia Ministry of Education	Dr. Fauziah, S. Pd, MM.			2022
3	Analisis Motivasi Berwirausaha Pada Generasi Milenial di Kota Pontianak	Ari Widiati, MM.			2021
4	Increasing Reading Literacy In Al-Barokah Islamic Boarding School Students in Sungai Asam Village Through Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	Ari Widiati, MM.			2023
5	Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Peteoleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Ari Widiati, MM.			2023
6	Praktek Jual Beli "Serok Live" Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	Ari Widiati, MM.			2023
8	Analisis Strategi Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pada Pondok Pesantren Abdussalam Dan Pondok Pesantren Nurul Jadid	Ari Widiati, MM.			2023
9	Analisis Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Layanan Pengelolaan SDM Akademi Manajemen Bumi Sebalu Bengkayang	Syarif Agussaid Alkadrie, SE, MM.			2021
10	Konsep Dasar Manajemen Proyek di Era 4.0	Syarif Agussaid Alkadrie, SE, MM.			2022
11	Increasing Reading Literacy In Al-Barokah Islamic Boarding School Students in Sungai Asam Village Through Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	Nur Atiqah, SE, MM.			2023

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
12	Pengukuran Risiko Operasional Dengan Pendekatan BIA Dan SA Pada PT. Bank Muamalat	Nur Atiqah, SE, MM.			2023
13	Transaksi Pinjaman Pay Later pada Marketplace Shopee Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Eka Junila Saragih, M.S.I.			2021
14	Pengaruh Inovasi Produk dan Labelisasi Halal Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Japanese Pancake di Kota Pontianak	Eka Junila Saragih, M.S.I.			2023
15	Endorse Pakaian Wanita pada Kaum Pria (Tasyabbuh) Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus selebgram Pria di Kota Pontianak)	Eka Junila Saragih, M.S.I.			2023
16	Konsep Al-Sarfah Dalam Kemukjizatan Al-Qur'an	Abdurrahman, S.Q, M. Ag.			2021
17	Dakwah Di Era Modern (Tinjauan Tafsir Terhadap Ayat Tentang Dakwah Nabi Musa As Kepada Fir'aun Dalam QS. Taha/20: 42-44)	Abdurrahman, S.Q, M. Ag.			2022
18	Tradisi Beppa Apang di Bulan Ramadhan: Studi Komparatif Antara Nilai Qur'ani dan Perkara Bid'ah	Abdurrahman, S.Q, M. Ag.			2023
19	Endorse Pakaian Wanita pada Kaum Pria (Tasyabbuh) Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus selebgram Pria di Kota Pontianak)	Abdurrahman, S.Q, M. Ag.			2023
20	Analisis Sistem Informasi Manajemen Dalam Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Keripik Makros Jaya Abadi Pontianak)	Heny Hidayati, SE. I., MM.			2023
21	Analisis Investasi Dalam Memprediksi Pergerakan Harga Bitcoin Dengan Menggunakan Recurrent Neural Network Pada Platform Indodax	Julianto, S.T, M. Kom.			2022
22	Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Aplikasi Ometv Sebagai Sarana Dalam Membantu Pembelajaran, Penguasaan, Dan Pengembangan Bahasa Asing	Julianto, S.T, M. Kom.			2022

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
23	Peran Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia Dalam Membantu Peningkatan Perekonomian Dan Bisnis Di Era Digital	Julianto, S.T, M. Kom.			2022
24	Rancangan Aplikasi Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Google Spreadsheet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) CV. Wira Gemilang	Julianto, S.T, M. Kom.			2022
25	Dampak Tiktok Dalam Mempengaruhi Generasi Muda	Julianto, S.T, M. Kom.			2023
26	Pemanfaatan Sistem Aplikasi Audacity Dalam Pembuatan Seni Teater Drama Pada SMA Negeri 1 Tumbang Titi	Julianto, S.T, M. Kom.			2023
27	Pemanfaatan Sistem Aplikasi Audacity Dalam Pembuatan Seni Teater Drama Pada SMA Negeri 1 Tumbang Titi	Julianto, S.T, M. Kom.			2023
28	Literasi Terhadap Teknologi Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Pada Pendengar Setia Radio Prokom FEBI IAIN Pontianak	Julianto, S.T, M. Kom.			2023
29	Analisis Sistem Informasi Manajemen Dalam Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Keripik Makros Jaya Abadi Pontianak)	Julianto, S.T, M. Kom.			2023
30	Analisis Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT. Bumi Resources Minerals Tbk Dalam Mengukur Kinerja Keuangan	Julianto, S.T, M. Kom.			2023
31	Analisis Sistem Pada NFT (Non-Fungible Token) Dan Perkembangannya Dalam Dunia Bisnis	Julianto, S.T, M. Kom.			2023
32	Increasing Reading Literacy In Al-Barokah Islamic Boarding School Students in Sungai Asam Village Through Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	ulianto, S.T, M. Kom.			2023
33	Analisis Digital Fashion Dalam Perspektif Teknologi, Sistem Informasi, Dan Bisnis	Julianto, S.T, M. Kom.			2023
34	Manfaat Sistem Akademik (Siakad) Dalam Perguruan Tinggi	Julianto, S.T, M. Kom.			2023

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
35	Sosialisasi Motivasi Pendidikan Pada Siswa SMP Negeri 4 Sungai Raya Kepulauan Dalam Salah Satu Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Pulau Lemukutan	Julianto, S.T, M. Kom.			2023
<b>D Program Studi Perbankan Syariah (PBS)</b>					
1	Analisis faktor makro dan mikro dalam mempengaruhi NPF, faktor faktor yg mempengaruhi market share di PBS	Dr. Yulia	Produk PBS, manajemen keuangan syariah, Bank dan lknbnk syariah, manajemen ziswaf	RPS	
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi market share di PBS	Nurma Sari	Pengembangan produk	RPS	
<b>III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)</b>					
<b>A Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)</b>					
1	Kampung Riset	Dr. Imron Muttaqin, M.Pd	Metodologi Penelitian	Pemanfaatan metodologi dalam melakukan riset	2019
2	KKL	Dr. H. Syarif, M.A	Tafsir Hadist	Aplikasi teori tafsir dalam KKL	2020
3	KKL Intergratif 2021	Dr. Hj Nani trusina, M.Pd	Menejemen Pendidikan	Aplikasi teori konsep manajemen pendidikan	2021
<b>B Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)</b>					
1	Pengembangan Bahan Ajar Chatbot Berbasis Artificial Intelligence pada Materi Sistem Pencernaan Manusia Kelas V di Sekolah Dasar	Vidya Setyaningrum, M.Pd	Pengembangan Materi IPA	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023
2	Pengembangan Bahan Ajar Chatbot Berbasis Artificial Intelligence Pada Materi Sistem Pernapasan Makhluk Hidup Di Sekolah Dasar	Vidya Setyaningrum, M.Pd	Pengembangan Materi IPA	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023
3	Pengembangan Bahan Ajar Chatbot Berbasis Artificial Intelligence Materi Sistem Peredaran Darah Manusia Kelas V	Vidya Setyaningrum, M.Pd	Pengembangan Materi IPA	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023
4	Pengaruh Penggunaan Video Animasi Materi Siklus Hidup Hewan Terhadap Hasil Belajar Peserta	Vidya Setyaningrum, M.Pd	Pengembangan Materi IPA	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
	Didik Kelas IV Mis Al-Raudhatul Islamiyah Kubu Raya				
5	Internalization of Students' Scientific Attitudes through Islamic Education in Madrasah Aliyah. Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah	Dr. Sukino, M.Ag	Penguatan Pendidikan Agama di MI	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023
6	Pengembangan Buku Pendamping Bahan Ajar Tematik Kelas III SD/MI Berbasis Kearifan Lokal Daerah Kalimantan Barat	Mansur, M.Pd	Implementasi Pembelajaran Tematik SD/MI (Pengemb. Kur 2013 SD/MI)	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023
7	Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Barat Pada Kelas Iii Tema 5 Dan 6 SD/MI	Mansur, M.Pd	Implementasi Pembelajaran Tematik SD/MI (Pengemb. Kur 2013 SD/MI)	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023
8	Pengantar Bahasa Indonesia	Muchammad Djarot, M.Pd	Bahasa Indonesia	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023
9	Analisis Penerapan Metode Mind Mapping Materi Perkembangan PPKn Di Indonesia Pada SD/MI	Maha Lastasa BH, M.Pd	Konsep Dasar dan Materi PPKn	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023
10	Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Ipa Kelas V dengan Menggunakan Strategi Cooperative Learning Di MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat Tahun Pelajaran 2014-2015	Roikhatul Janah, M.Pd	Implementasi Pembelajaran Tematik SD/MI (Strategi Pembelajaran Tematik)	Sebagai Referensi pada salah satu materi pembelajaran	2023
<b>C</b>	<b>Program Profesi PPG</b>				
1	Persepsi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan terhadap Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Learning Management System (LMS) Space	Ana rosilawati,M.Ag	Akidah Akhlak	Pemanfaatan teknologi dalam melakukan riset	2022
2	Pengembangan Modul Ajar PPG Untuk Persiapan UP	Budiyono,M.Pd		Pemanfaatan teknologi dalam melakukan riset	2021
3	Persepsi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan terhadap Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Learning Management System (LMS) Space	Budiyono,M.Pd		Pemanfaatan teknologi dalam melakukan riset	2021

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
<b>D Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI)</b>					
1	Developing the Listening Abilities to the Content of Folk Stories by Audio Visual Teaching Media of Junior High School Student.	Dr. Istiqomah, MA	ESP	referensi	2021
2	The Great Influence of Popular Song in Improving Listening Skill of Junior High School Students.	Segu, S.Pd., MA.	Bahasa Inggris	referensi	2022
3	Pengembangan Sistem Integrasi Pengisian Borang dan Simulasi Akreditasi Terbaru Berbasis Web di Tadris Bahasa Inggris.	Sulaiman, M.Pd.	Educational Technology	referensi	2022
4	An Analysis of Translation Techniques and Quality in Terms of Accuracy, Acceptability and Readability of PI's Expressive Speech Act in The Film Entitled Life of Pi.	Vibry Andina Nurhidayah, S.Pd., M.Hum.	translation	referensi	2022
5	The Impact of Digital Story Telling on Enhancing Listening Comprehension Skills of Primary School Students.	Nur Rahmiani, M.Pd.	Listening	referensi	2022
6	English Competencies	Nanik Shobikah, M.Pd.	Basic Writing	Referensi	2022
7	An Experimental Study: Could The Occasion of Listening and Reading Islamic Based Vocabulary Upgrade Listening Comprehension.	Militansina, M.Pd.	Approaches to Foreign Language English and Educational Research	Referensi	2022
<b>E Program Studi Tadris Matematika (TM)</b>					
1	Diagnosis Kemampuan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal Permutasi Dan Kombinasi	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Teori Peluang	Referensi RPS	2023
2	Pengembangan Modul Pembelajaran Aljabar Linear menggunakan Software Matrix Laboratory (Matlab) di Prodi Tadris Matematika	Zulkarnain, S.Si., M.Pd.	Aljabar Linier Elementer	Referensi RPS	2022
3	Pengembangan Video Pembelajaran Bermuatan Karakter Terintegrasi Ayat-ayat Al Qur'an Pada Materi Aritmatika Sosial	Desty Septianawati, M.Pd.	Fun For Math	Referensi RPS	2023
4	Profil Keterampilan Kolaborasi Mahasiswa Calon Guru Dalam Menyelesaikan Masalah Trigonometri	Ressy Rustanuarsi, M.Pd.	Sosiologi Pendidikan Matematika	Referensi RPS	2023



No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
5	Mengurangi Tingkat Plagiarisme melalui Metode Repetitive dalam Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas Mahasiswa PAI FTIK IAIN Pontianak	Andina Nurul Wahidah, M.Pd.	Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah	Referensi RPS	2022
6	Miskonsepsi Unsur Novelty dalam Penelitian Pendidikan (Tinjauan Kajian Penelitian Relevan pada Skripsi Mahasiswa FTIK lain Pontianak)	Andina Nurul Wahidah, M.Pd.	Metodologi Penelitian	Referensi RPS	2022
7	Kemampuan Critical Thinking Dalam Pengukuran Sampel Penelitian (Studi Pada Mahasiswa Tadris Matematika FTIK IAIN Pontianak)	Andina Nurul Wahidah, M.Pd.	Metodologi Penelitian	Referensi RPS	2022
8	Perbandingan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Statistik	Yumi Sarassanti, M.Pd	Statistik Pendidikan	Referensi RPS	2023
<b>F</b>	<b>Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)</b>				
	Tidak menyerahkan data				
<b>G</b>	<b>Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)</b>				
	Tidak menyerahkan data				
<b>IV</b>	<b>Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)</b>				
<b>A</b>	<b>Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)</b>				
1	Latar Belakang Narapidana Remaja Melakukan Tindakan Pencurian di LPKA Sungai Raya	Hesty Nurrahmi	BK Anak dan Remaja		
2	Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Dampak Bermain Video Game Melalui Layanan Konseling Informasi Menggunakan Media Cerita Bergambar	Hesty Nurrahmi	BK Kelompok		
3	Peningkatan Pemahaman Bahaya Merokok Siswa Melalui Media Poster dan Video di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya	Hesty Nurrahmi	Media Tik dalam BK	Sebagai materi pembejalaran pada pertemuan 7-16 dengan bahan kajian " (PBL) Project Based Learning, coaching hasil riset eksplorasi (pra PBL), coaching pembuatan media BK".	

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
4	Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Menangani Peserta Didik Yang Membolos	Amalia Irfani	Pemahaman Tingkah Laku	Sebagai materi pembelajaran pada pertemuan 7 dengan bahan kajian "Konsep dasar perilaku sosial (persepsi dan kognisi sosial, konformitas, prososial, agresi)."	
5	Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021	Amalia Irfani	Patologi Sosial	Sebagai materi pembelajaran pada pertemuan 12 dan 13 dengan bahan kajian "Masalah orientasi seksual (LGBT)"	
6	Layanan Informasi Tentang Penyesuaian Diri Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pontianak	Amalia Irfani	Patologi Sosial	sebagai materi pembelajaran pada pertemuan 14 dengan bahan kajian "Konsep penanggulangan masalah sosial".	
<b>B</b>	<b>Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)</b>				
1	Kritik Konsep Humanisme Islam Muhammad Arkoun	Dr. Sahri, M.A.	Akhlaq Tasawuf	RPS	2022
2	Dialektika Pemahaman Hadis tentang Isbal: Dari Konfigurasi Tekstualis Ke Transformasi Kontekstualis	H. Hepni Putra, M.Ag	Ulumul Hadis	RPS	2022
3	Nuansa Dakwah Hamka Dalam Tafsir Q.S. AL-'Asr: Dari Historisitas Narasi, Linguistik Persuasi dan Aspek Kontekstualisasi	H. Hepni Putra, M.Ag	Studi Naskah dan Pemikiran Tafsir Nusantara	RPS	2022
4	Vernakularisasi Tafsir Al-Qur'an di Kalimantan Barat (Studi Atas Tafsir <i>Āyāt aṣ-Ṣiyām</i> Karya Muhammad Basiuni Imran)	Wendi Parwanto, M.Ag	Studi Naskah dan Pemikiran Tafsir Nusantara	RPS	2022
5	Muhammad Basiuni Imran: Tokoh Legendaris Islam, Sambas, Kalimantan Barat Abad 20 M	Wendi Parwanto, M.Ag	Studi Naskah dan Pemikiran Tafsir Nusantara	RPS	2022
6	Corak Penafsiran Tafsawuf Q.S. Al-Fatihah Dalam Manuskrip Tafsir	Wendi Parwanto, M.Ag	Studi Naskah dan Pemikiran Tafsir Nusantara	RPS	2022

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
	Karya M. Basiuni Imran, Sambas, Kalimantan Barat				
7	The Concept of Mysticism in Islam and Christianity	Dr. Sahri, M.A.	Moderasi Beragama	RPS	2021
8	Resepsi Estetis dan Fungsional Atas Adegan Ruqyah dalam Film Roha Fasik: Kajian Living Al-Qur'an	Dr. Luqman, M.S.I.	Living Qur'an	RPS	2021
9	Term-Term Hoak dalam Al-Qur'an (Relasi Antara Firman Tuhan dan Media Sosial Perspektif Tafsir)	H. Hepni Putra, M.Ag	Tafsir Ahkam	RPS	2021
10	Studi Perbandingan Fitur-Fitur Aplikasi Al-Quran Digital Karya Greentech Apps Foundation dan Aplikasi Al-Quran Muslim Media untuk Mengetahui Perbedaan Kedua Fitur aplikasi	H. Hepni Putra, M.Ag	Al-Qur'an dan Teknologi Informatika	RPS	2021
11	Visualization and Legalization of KH Ahmad Dahlan's Hisab Method in Tafsir al-Azhar by Hamka	Wendi Parwanto, M. Ag	Studi Naskah dan pemikiran Tokoh Tafsir Kalsik dan Kontemporer	RPS	2021
12	Pemikiran M. Syahrur Tentang Pakaian Perempuan (Dari Konfigurasi Aurat Hingga Konstruksi Hirarki Pakaian Perempuan Dalam Islam)	Wendi Parwanto, M.Ag	Studi Naskah dan pemikiran Tokoh Tafsir Kalsik dan Kontemporer	RPS	2021
13	Terjemahan Al-Quran Bahasa Dayak Kanayatn: Telaah Vernakularisasi sebagai Upaya Awal menuju Indigenisasi	Wendi Parwanto, M.Ag	Tarjamah al-Qur'an	RPS	2021
14	Konsep Syura dan Demokrasi dalam Wacana Kontekstual: Studi Terhadap Pemikiran Kontekstual Abdullah Saeed	Taufik Akbar, S.Th.I, M.Ag.	Hermeneutika	RPS	2021
15	Understanding the Teaching of Religious Moderation from a Sufistic Perspective and Its Implications for Student Performance	Dr. Syarif, M.A.	Moderasi Beragama	RPS	2021
16	Tafsir Ad-Dur Mantsur fi Kitab Al-Ma'tsur Karya Imam Suyuti: (Studi Deskriptif Atas Metodologi Hingga Aspek Pendekataan Interpretasi)	Ica Fauziah Husnaini, M.Ag.	Studi Naskah dan pemikiran Tokoh Tafsir Kalsik dan Kontemporer	RPS	2021
17	Nazhratul Al-Mufassirin Al-Mutaqaddimin 'an Al-Ayat Al-Naswiyyah Fi Al-Qur'an	Ica Fauziah Husnaini, M.Ag.	Studi Naskah dan pemikiran Tokoh Tafsir	RPS	2021

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
			Kalsik dan Kontemporer		
18	Theology of Jihād based on the hadīth: Ṣaḥīḥ Bukhārī's perspective	Prof. Dr. Wajadi Sayadi, M.Ag	Ulumul Hadis	RPS	2020
19	Merawat Toleransi Antar-Umat Beraga,a di Kabupaten Kubu Raya: (Tinjauan Living Hadits pada Masyarakat Multikultural)	Prof. Dr. Wajadi Sayadi, M.Ag	Moderasi Beragama	RPS	2020
20	Hamka, Social Criticism and The Practices of Polygamy in Minangkabau	Dr. H. Saifuddin Herlambang, M.A.	Studi Naskah dan Pemikiran Tafsir Nusantara	RPS	2020
21	Misinterpretation of the Qur'an: Thesis Analysis of Students of the Pontianak State Islamic Institute	Dr. H. Saifuddin Herlambang, M.A.	Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir	RPS	2020
22	Gramatikal Al-Qur'an: Menjawab Tuduhan Kesalahan Gramatikal Dalam AL-Qur'an	Buhori, S.Pd.I., M.Pd.	Balaghahl al-Qur'an	RPS	2020
23	The Style of Sufistic Interpretation: A Philological Study and Content Analysis of the Manuscripts By Three Popular Ulemas in West Kalimantan	Dr. Syarif, M.A.	Studi Naskah dan Pemikiran Tafsir Nusantara	RPS	2020
24	Periwayatan Perempuan Dalam Hadis-Hadis Tentang Perempuan (Studi Atas Kitab Tahrir Al-Mar'ah)	Prof. Dr. Wajadi Sayadi, M.Ag	Mabahis fi Ulumul Hadis	RPS	2019
25	Struktur Epistemologi Naskah Tafsir Surat Al-Fatihah Karya Muhammad Basiuni Imran Sambas, Kalimantan Barat	Wendi Parwanto, M.Ag	Studi Naskah dan Pemikiran Tafsir Nusantara	RPS	2019
<b>C</b>	<b>Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)</b>				
1	Pengelolaan kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi mahasiswa di kampus IAIN Pontianak	Prof. Dr. Ibrahim, S.Ag., MA	Komunikasi Antar Budaya	Bahan Kajian/Materi	2020
2	Dakwah Patterns and Communication of Student Character Program at Al-Fityan Kubu Raya	Dr. H. Harjani Hefnil, Lc., MA	Ilmu Komunikasi Islam	Materi	2021
3	Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Komunikasi Pembangunan Di Perbatasan Antar Negara	Dr. Syarifah Aminah, S.Sos.I., M.Si.	Sosiologi Komunikasi	Studi kasus	2019
4	Pola Komunikasi Organisasi Perempuan Di Kota Pontianak	Dr. Fitri Kusumayanti, S.Sos, M.Si	Komunikasi Organisasi	Studi kasus	2020

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
5	Teknik Komunikasi Dakwah Melalui Kesenian Tundang Mayang Sanggar Pusaka Kalimantan Barat	M. Habibi, S.Sos.I., M.Ikom	Ilmu Komunikasi Islam	Studi kasus	2020
6	Internalisasi Pesan Dakwah Kultural Pada Masyarakat Melayu Sambas	Bob Andrian, S.Th.I., M.Sos	Komodifikasi Dakwah, Sosiologi Dakwah	Materi Perkuliahan	2020
<b>D</b>	<b>Program Studi Manajemen Dakwah (MD)</b>				
1	STRATEGI DAKWAH BAGI LANSIA BERBASIS PONDOK	Dr. Cucu, S.Ag., M.Ag.	Manajemen Masjid	Penelitian	2021
2	Dayaknese and Islam: A Confluence from Borneo's Hinterland, Indonesia	Dr. Faizal Amin, M.Ag	Peta Dakwah	Penelitian	2022
3	POLA KOMUNIKASI ORGANISASI PEREMPUAN DI KOTA PONTIANAK	Dr. Fitri Kusumayanti, S.Sos., M.Si.	Sosiologi Dakwah	Penelitian	2020
4	Dakwah Patterns and Communication of Student Character Program at Al-Fityan Kubu Raya	Dr. H. Harjani Hefni, LC., M.A.	Manajemen Komunikasi	Penelitian	2021
5	The socio-psychological predictors of support for post-truth collective action	Dr. Hj. Fitri Sukmawati, S.PSi., M.PSi., PSIKOLOG.	Psikologi Dakwah	Penelitian	2022
6	KAUM AL HADRAMAUT DAN PENYEBARAN ISLAM DI KALIMANTAN BARAT	Dr. Patmawati, S.Ag.M.Ag.	Sejarah Dakwah	Penelitian	2023
7	The Ambiguity of Peace Narratives in Religious Communities of West Kalimantan	Dr. Samsul Hidayat, S.Ag., M.A.	Komodifikasi Dakwah	Penelitian	2023
8	Gaya Kepemimpinan Walikota untuk Meningkatkan Kinerja dan Akhlak Aparatur Sipil Negara di Kota Pontianak	Dr. Suhra Wardi	Manajemen Sumber Daya Manusia	Penelitian	2020
9	Resilience of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Through Islamic Social Finance (ISF) after the Covid 19 Pandemic	Raziki Waldan, M.M.	Strategi Fundraising	Penelitian	2022
10	STRATEGI PEMASARAN TRAVEL UMSRAH PT. MUZDALIFAH PONTIANAK DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK MASYARAKAT	Santa Rusmalita, S.Sos.I., M.Ag.	Strategi Pemasaran	Penelitian	2022
11	The Material of Wawasan Nusantara as Indonesian Geopolitic Note and the Implementation in Islamic State University	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Pancasila dan Kewarganegaraan	Penelitian	2021

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
12	MODEL & METODE PEMBELAJARAN INOVATIF: Teori dan Panduan Praktis	Fitri Susanti Ilyas, S.Pd., M.A.	Bahasa Inggris	Penelitian	2023
13	Private Cloud Storage Sebagai Media Pencadangan Data dan Berbagi Data Secara Real-Time	Musa Amin, S.Kom., M.T.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Penelitian	2020
14	Decision-Making Policies of Leaders within Islamic Boarding School's Institute to Improve Formal Education Managerial's Quality	Syarif Ali AL Qadrie, M.Pd.	Manajemen organisasi dan kelembagaan Islam	Penelitian	2022
<b>E Program Studi Psikologi Islam (PI)</b>					
1	Bagaimana Sih Mendidik Anak Ketika Orang Tua Bekerja di Paud Wiyata Bakti Gerantung	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
2	Dampak Dari Toxic Friendship Terhadap Perkembangan Anak Usia 6-11 Tahun di SDN Sungai Raya (1)	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
3	Dampak Dari Toxic Friendship Terhadap Perkembangan Anak Usia 6-11 Tahun di SDN Sungai Raya	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
4	Kebutuhan Perkembangan Operasional Konkret Pada Anak Usia (7-11 Tahun) di MIN 1	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
5	Kemampuan Sosialisasi Siswa SD Ke Teman-temannya di mIS darul Fallah Sungai Belitung Pontianak Barat	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
6	Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini- Di PAUD Atta-Lim Desa Retok	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
7	Cara Menyampaikan Rasa Marah dan Nasehat yang Tepat bagi Anak Usia Sekolah Di SD Negeri 25 Pontianak Utara	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
8	Dampak Memanjakan Anak Berlebihan terhadap Pengetahuan dan Kemampuan untuk Menyelesaikan Masalah Di TK Bina Sari	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
9	Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Mandiri Anak Sebelum Masuk Sekolah Dasar (Usia 3-6 Tahun) Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
10	Perkembangan Motorik Anak Di Raudhatul Athfal Dharma Wanita Persatuan	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
11	Mengenal Psikologi Perkembangan Kognitif Anak Usia 7-11 Tahun Di Sdn 25 Pontianak Utara	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
12	Memahami Perkembangan Awal Bayi Fase oral Paud Taklim Desa Retok	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
13	Membangun Rasa Percaya dan Kepercayaan Diri Pada Anak Tengah di Desa Kuala Dua Kiwi	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
14	Mengapresiasi Kemampuan Anak di Paud Asasul Muttaqin Mempawah Hilir	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
15	Mengenal Perkembangan Motorik Pada Anak Usia Dasar Melalui Permainan di SDn 18 Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
16	Meningkatkan Kemandirian dan Inisiatif Pada Naka Usia 3 Tahun di TK Aisiyah 3 PTK	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
17	Pengaruh Kelekatan Orang Tua Dan Anak Terhadap Tumbuh Kembang Anak di Majelis Ta-lim Raudhatul Jannah Desa Kubu Padi	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
18	Penggunaan Kata Jangan Sesuai Porsinya di Majelis Ta-lim Raudhatul Jannah Desa Kubu Padi	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
19	Pentingnya Menjaga Kesehatan Pranatal Pada Ibu Hamil Di Desa Sungai Segak RT 03 Tanjung Sogor	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
20	Peran Orang Tua dalam Membangun Perkembangan Emosional Pada Anak Usia Sekolah Dasar -Di Madrasah Diniyah Mujahid , Sungai Raya, Kab Kubu Raya	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022



No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
21	Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Bahasa Anak di Raudhatul Athfal Dharma Wanita Persatuan	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
22	Strategi Dalam Menghadapi Stress Kehamilan di Posyandu Kenanga	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
23	Tingkatkan Pengetahuan Di Kecil Melalui Eksplorasi Lingkungan di Paud Wiyata Bakti Gerantung	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2022
24	Anak Anda Ingin Mencoba Ini dan Itu- Memahami Fase Autonomy Vs Shame And Dount Di Majelis Ta-lim Allqra Wal Hafadz Desa Sungai Bemban Timur	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
25	Dampak Negatif Orang tua Sering Membentak dan Berteriak Pada Anak di SD Kartika XVII-1 Pontianak Kota	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
26	Dampak pola asuh orang tua terhadap anak di KB Hidayatul ummah	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
27	Kembali Kondisi Sunting Pada Anak di Taman Kanak-kanak Aisiyah 3 Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
28	Larang Si Kecil Dengan Cara Yang Tepat Di TK Al-Muqaddimah	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
29	Melatih Anak Memiliki Nilai Moral Yang Baik Sejak Dini Paud KB Assasul Muttaqin Kec Mempawah Hilir	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
30	Melatih Kognitif Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Permainan Tradisional di SDN 18 Pontianak Utara	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
31	Melatih Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini 3-5 Tahun Di Desa Wajok Hilir	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
32	Membantu Anak memahami emosi 6 sampai 12 tahun di Sekolah Dasar negeri 16	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
33	Mengembangkan interaksi sosial anak di SDN 42 Pontianak Utara	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023



No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
34	Meningkatkan Kelekatan Antara Orang Tua dan Anak Di TK Negeri Pembina Akcaya	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
35	Menjadi Ibu yang Kreatif dan Bijak Dalam Mengembangkan Kognitif Anak Usia 2-5 Tahun Untuk Mendapatkan Pengetahuan	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
36	Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak SDN 21 Sui.Raya	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
37	Penyuluhan Peran Orang Tua Dalam Kemandirian Anak Di TK Al-Muqaddimah	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
38	Peran Guru taman Kanak-kanak Dalam Mengembangkan Keterampilan Sosial Siswa Di Taman Kanak Kanak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
39	Perkembangan Emosi Ana dan Metode Stimulasi Yang Tepat 3-5 Tahun	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
40	Perkembangan Moral Anak Melalui Metode Bercerita	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
41	Stimulus Perkembangan Kognitif Anak Usia 0-12 Bulan Bersama Posyandu Jarak Kecamatan Pontianak Kota	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
42	Strategi menghadapi anak yang memiliki keingintahuan yang tinggi di majelis taklim an-najah	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 1	Penyuluhan	2023
43	Psikologi Stop Bullying Di SD Islam Al Azhar 21 Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Patologi	Penyuluhan	2023
44	Kenali Tanda Kamu Mengalami Kecemasan di PPBQ Iltizam	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Patologi	Penyuluhan	2023
45	Gangguan Pada Anak dan Remaja Di Gugus Depan Pramuka SMPN 17 Pontianak Barat	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Patologi	Penyuluhan	2023
46	Gangguan Makan Pada Anak di Posyandu Pelangi	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Patologi	Penyuluhan	2023
47	Psikologi Stop Bullying Di SD Islam Al Azhar 21 Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Patologi	Penyuluhan	2023
48	Psikologi Islam Mengabdikan di Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) Amanah Masjid Ma'Ash Shabirin	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Patologi	Penyuluhan	2023
49	Psikologi Islam Mengabdikan di Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) Amanah Masjid Ma'Ash Shabirin	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Patologi	Penyuluhan	2023

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
50	Mengenal Psikologi Islam lebih Dekat Stop Self Diagnose Di MAS Al Mujtahid	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
51	Mitos-mitos Psikologi Di Pondok Pesantren As Salam	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
52	Komunikasi Asik Tanpa Toxic Di Pondok Pesantren Al Fath	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
53	Perilaku Agresif Pada Remaja Akhir Di Pondok Pesantren Al Hamidiyah	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
54	Inner Child yang Terluka Di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Di Kubu Raya	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
55	Mengenal Psikologi Islam Lebih Dekat Di MAN 1 Kubu Raya	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
56	Mengenal Psikologi Di MAN 3 Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
57	Mengenal Apa Sih Self Harm Itu Di MTs Negeri 1 Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
58	Promosi Program Studi Psikologi Islam Di Pondok Pesantren Raudlatul Firdaus Kubu Raya	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
59	Mengenal People Pleaser Di SMPIT Anak Sholeh Mempawah	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
60	Promosi Prodi Psikologi Islam lain Pontianak Di Pondok Ma. Darunnaim Putri Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
61	Promosi Prodi Psikologi Islam lain Pontianak Di Pondok Pesantren Darul Khairat	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
62	Sosialisasi Dan Promosi Program Studi Psikologi Islam Di Smk Abadi Khatulistiwa	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
63	Mengatasi Insecure Pada Remaja Akhir Di Sma Taman Mulia Kubu Raya	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
64	Meraih Cita-cita dan Membangun Masa Depan yang Gemilang Di SMA Indonesia Muda Kubu Raya	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
65	Merawat Kesehatan Mental Masa Remaja Sekaligus Promosi Prodi Di Al Mansyur Islamic Boarding School	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
66	Pentingnya Keterampilan Komunikasi Dalam Membangun Hubungan yang Sehat Di Madrasah Aliyah Al Adabiy	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
67	Promosi Prodi Psikologi Islam Di SMA Sirojul Ulum	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
68	Psikoedukasi Stop Bullying Di Pesantren Salafy Nurul Huda 2	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Komunikasi	Penyuluhan dan Promosi Prodi	2023
69	Bermain Plament Atau Sensori Pat Dalam Meningkatkan Sistem Motorik Anak di Paud Cahaya Ilmu	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembanagan kepada Masyarakat	2023
70	Bimbingan Karir Remaja di Panti Asuhan Tunas Melati	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembanagan kepada Masyarakat	2023
71	Implementasi Program berbasis Perkembangan Motorik Anak Di KB Perempuan Mujahidin	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembanagan kepada Masyarakat	2023
72	Implementasi Program Berbasis Perkembangan Psikoedukasi Tentang Pubertas Untuk Membantu Kesiapan Menuju Masa Remaja di SDIT AIMadinah	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembanagan kepada Masyarakat	2023
73	Intervensi Self Discovery Untuk Menyelami Potensi Diri Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Remaja Panti Asuhan Nur Fauzi	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembanagan kepada Masyarakat	2023
74	Melatih Keterampilan Sosial Pada Masa Anak Akhir Melalui Permainan di MIS Darussalam	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembanagan kepada Masyarakat	2023
75	Pengaruh Permainan Tradisional Untuk Mengurangi Kesepian Pada Lansia Di panti jompo Kasih Bapa Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembanagan kepada Masyarakat	2023
76	Pengenalan Emosi Dasar Pada Anak-anak di Panti Asuhan Harapan Bangsa	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembanagan kepada Masyarakat	2023
77	Perkembangan Psikoedukasi Sebagai Prevensi Perilaku Seksual pranikah Pada Remaja di SMAN 1 Nanga Mahap	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembanagan	2023

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
				kepada Masyarakat	
78	Permainan Pemecahan Masalah Pada Remaja Untuk Melatih Kognitif	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembangan kepada Masyarakat	2023
79	Program Berbasis Perkembangan Moral di MTs Negeri 1 Pontianak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembangan kepada Masyarakat	2023
80	Psikoedukasi Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Yayasan Aku belajar desa jeruju besar	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Perkembangan 2	Implementasi program stimulasi perkembangan kepada Masyarakat	2023
81	Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Interaksi sosial anak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikologi Sosial 2	Penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa	2022
82	Efektivitas Islamic Time Management Terhadap Penurunan Prokrastinasi Mahasiswa	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikoterapi Islam	Penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa	2023
83	Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Interaksi sosial anak	Ema Zati Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikoterapi Islam	Penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa	2023
<b>F</b>	<b>Program Studi Studi Agama Agama (SAA)</b>				
1	Eksistensi Tasawuf di Kalimantan Barat	Elmansyah, M.S.I	Akhlaq Tasawuf	Masuk dalam beban kerja mata kuliah	2021
2	Fenomenologi Agama	Prof. Zaenuddin, MA.	Fenomenologi Agama	Masuk dalam beban kerja mata kuliah	2020
3	Islam dan Budaya Lokal : Pemak-Pernik Tradisi Islam Borneo	Dr. Munawar, M.Si.	Cultural Studies	Masuk dalam beban kerja mata kuliah	2019
4	Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kontestasi Pilgub Kalimantan Barat 2018 (Analisis Terhadap Konten Media Komunikasi Politik Tim Pemenangan Calon Selama Masa Kampanye).	Eka Hendry AR, M.Si.	Agama dan Perdamaian	Masuk dalam beban kerja mata kuliah	2021

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
5	Komodifikasi Tatung Singkawang: sintesa sakral & komersial	Dr. Samsul Hidayat, M.A.	Simbol Simbol Keagamaan	Masuk dalam beban kerja mata kuliah	2021
6	Sekte Kristen di Kalimantan Barat	Dr. Ahmad Jais, M.Ag.	Agama Agama Dunia	Masuk dalam beban kerja mata kuliah	2019
<b>V</b>	<b>Pascasarjana</b>				
<b>A</b>	<b>Magister Ekonomi Syariah (MES)</b>				
1	Kajian Sosiologis Tentang Eksistensi Perempuan Di Tepi Sungai Kapuas, Pontianak – Kalimantan Barat	Dr. Ismail Ruslan, M.Si	Islam dan Budaya Borneo	Hasil penelitian menjadi bahan perkuliahan yang diinput di RPS	2018
2	Eksistensi Perempuan Di Tepi Sungai Kapuas Pontianak				2018
3	Analysis Of Disaster Vulnerability Capacity In Mempawah Hilir				2019
4	Kelompok Lain Dalam Pandangan Pelajar Di Wilayah Bekas Konflik Di Sanggau Ledo, Kalbar		Islam dan Moderasi Beragama		2019
5	Pendidikan Islam Pemuda Cina Muslim Kota Pontianak Dalam Mendapatkan Pengakuan Identitas Kewarganegaraan				2020
6	Religion And Malay-Dayak Identity Rivalry In West Kalimantan				2021
7	Stability of Demand from the Perspective of Islamic Economics in the Market of Pontianak City, West Kalimantan, Indonesia	Dr. Ichsan Iqbal, MM	Ekonomi Makro Islam	Hasil penelitian menjadi bahan perkuliahan yang diinput di RPS	2022
8	Supply Stability, From the Islamic Economic Perspective, in the Markets of Pontianakcity, West Kalimantan, Indonesia				2022
9	Zakat: Macroeconomic And Microeconomic Demands		Ekonomi Mikro Islam		2020
10	Professionalism Urgency in Zakat Management to Increase 'Amil Welfare and Performance				2020
11	Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal Analysis on Dompot Ummat Pontianak Indonesia				2020
12	Genealogi & Anatomi Doktrin Teologi Politis Kelompok Teroris Relijius	Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA	Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah	Hasil penelitian menjadi bahan	2023

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
13	Actualization Of Performance Management Models For The Development Of Human Resources Quality, Economic Potential, And Financial Governance Policy In Indonesia Ministry Of Education			perkuliahan yang diinput di RPS	2023
14	Inspirasi Islamisme Kemenangan Taliban				2022
15	Theological Basis Of Religious Tolerance Prophet Muhammad's Experiences				2022
16	A Portrait Of Chinese Diaspora In Cidayu Area: Dinamika Persepsi dan Argumentasi Antar Etnis				2019
17	Malay And Chinese Indonesian: A fragile Relation in The Northern Coast of West Kalimantan				2018
18	Kupon Berhadiah Menurut Tokoh Agama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya	Dr. Syahbudi, M.Ag	Analisis Ayat dan Hadist Ekonomi	Hasil penelitian menjadi bahan perkuliahan yang diinput di RPS	2022
19	Tinjauan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Terhadap Praktik Jual Beli Buku Fotokopi Di Sintang				2022
20	Respon Terhadap Fatwa-fatwa Cryptocurrency Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Socio-Legal Studies				2022
21	Analisis Praktik Jaminan Fidusia Pada Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Area Pontianak Barat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah				2021
22	Hijrah, Negara & Pembentukan Identitas Muslim				Dr. Luqman, M.S.I
23	Potret Ekonomi Jamaah Ahmadiyah	Analisis Ayat dan Hadist Ekonomi	2019		
<b>B Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI)</b>					
1	Preserving Diversity: Lessons from Batang Tarang Village of West Kalimantan	Dr. H. Hermansyah, M.Ag.	Studi Islam Borneo	Hasil penelitian menjadi bahan perkuliahan yang diinput di RPS	2022
2	Religion and Occultism: Contestation of Islam and Local Culture in Malay Society				2020

No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
3	Dayak and Malay Brotherhood in the Malay Collective Memory of Post Independence Indonesia		Kajian Islam Komprehensif		2018
4	Khalfiyat wa taḥaddīyāt al-aqalīyah al muslimah al-ṣīnīyah fi Pontianak				2018
5	Islam di Borneo				2017
6	Islamic Educational Institutions and Social Change In Rural Communities	Dr. Sukino, S.Ag., M.Ag.	Teknologi Pengembangan Bahan Ajar PAI	Hasil penelitian menjadi bahan perkuliahan yang diinput di RPS	2023
7	Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Modal Sosial		Teori Sosial dan Pendidikan Islam		2023
8	Contextualization of The Concept of Amal Saleh in the Textbook of Al-Quran Hadits at Madrasah Ibtidaiyah		Pengembangan Materi dan Kurikulum PAI		2022
9	The effect of the adversity quotient on student performance, student learning autonomy and student achievement in the COVID-19 pandemic era: evidence from Indonesia		Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI		2021
10	Integrasi Pendidikan Islam dan Budaya Lokal		Pengembangan Kurikulum dan Materi PAI		2021
11	Agama di Area Digital (menelusuri Pola Bekal keagamaan Generasi Milenial)	Dr. Abdul Mukti, MA	Islam dan Moderasi Beragama	Hasil penelitian menjadi bahan perkuliahan yang diinput di RPS	2021
12	Santri Mengaji Pandemi: Refleksi, Solusi dan Aksi				2021
13	Ulama, Masjid Dan Ruang Demokrasi (Pergumulan Elit Agama Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kalimantan Barat)				2019
14	Posmodernisme: Dampak dan Penerapannya pada Studi Islam				2019
15	Contemporary islamic thought paradigm in understanding turāth and modernity				Filsafat Ilmu Keislaman
16	The Effect of Character Teaching on College Student Social-Emotional Character Development: A Case in Indonesia	Dr. Wahab, M.Ag.	Penjaminan Mutu Pendidikan Islam	Hasil penelitian menjadi bahan perkuliahan yang diinput di RPS	2023
17	Warasya Model Pola Asuh Anak Masa Kini dan Masa Akan Datang		Pengembangan Strategi		2022



No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
			Pembelajaran PAI		
18	Implementasi Strategi Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam		Pengembangan Media Pembelajaran PAI		2021
19	Strengthening Of Social Competency Through Learning Independence Of Islamic Education Of Reciprocal Teaching Models With Metacognitive Approach Of Primary School Students		Pengembangan Desain Pembelajaran PAI		2020
20	Ku Paham Agama Bagian 1 (Agama Islam yang Berkearifan Lokal)		Teknologi Pengembangan Bahan Ajar PAI		2019
21	Participation Of The Al-Munawaroh Muslimat Ta'lim Community Channel 7 In Building Religious Social Attitude Relations In The Community		Studi Islam Borneo		2023
22	Jejak Sang Imam H. Muhammad Jabir (1872-1947)	Dr. Erwin, S.Ag., M.Ag.	Pengembangan Materi dan Kurikulum PAI	Hasil penelitian menjadi bahan perkuliahan yang diinput di RPS	2022
23	Konsep dan Implementasi Kebijakan Visi Kebudayaan Borneo dalam Kurikulum IAIN Pontianak		Sejarah Sosial Pemikiran Pendidikan Islam		2022
24	Karya Pusaka Maharaja Imam Sambas, H. Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)		Pengembangan Evaluasi PAI		2021
25	Membaca Ulang Ideologi Pendidikan Islam Potret Sejarah di Era Dinasti Saljuk		Teori Sosial dan Pendidikan Islam		2022
26	An Analysis On The Readiness Of Using E Learning In Teaching And Learning Strategies In Higher Education	Dr. Usman, M.Pd.	Pendidikan Islam Multikultural	Hasil penelitian menjadi bahan perkuliahan yang diinput di RPS	2021
27	Kepemimpinan dan Penjaminan Mutu; Peran Kepala Sekolah dalam Menunjang Penjaminan Mutu SMA YP 17 Surabaya		Sejarah Sosial Pemikiran Pendidikan Islam		2020
28	Ideologi Pendidikan Islam Pesantren Di Indonesia Perspektif Muhammad Jawwad Ridla dan William F. O'nea		Analisis Data Berbasis Komputer		2019



No.	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun (YYYY)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
29	Makna Pendidikan Pesantren & Pendidikan Formal Perspektif Blater di Madura		Metodologi Penelitian Pendidikan		2018

## **LAMPIRAN**

Berikut ini adalah beberapa contoh hasil penelitian yang dihasilkan oleh para dosen.

## **Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Metode RGEC dan SCnP Model Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2016-2020**

**Dini Lestari<sup>1</sup>**

**Firdaus Achmad<sup>2</sup>**

**Dinda Nursaini<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>IAIN Pontianak, Indonesia*

### **ABSTRACT**

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on all industrial sectors to the Indonesian economy. According to the Minister of Finance and several Islamic economists, Islamic banking shows positive growth against the threat of Covid-19 and has strong resilience so that it can survive in the face of the crisis caused by the pandemic. The formulation of the problem in this study is how to assess the financial performance of Islamic banking using the RGEC method and the SCnP Model. The purpose of this study is to determine the financial performance of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. assessed from the RGEC and SCnP factors for the 2016-2020 period. The method in this study is descriptive with a quantitative approach. Data collection techniques are carried out with documentation techniques and library research. The results of the study using the RGEC method showed that the financial performance of Bank Muamalat Indonesia was assessed from the Risk Profile of Good Corporate Governance and Capital factors including the good category, while the earnings factor showed poor performance. Bank Muamalat Indonesia's financial performance using the SCnP method shows that during the 2016-2020 period it was spread across four quadrants, namely in 2016 it was in the URQ quadrant (Upper Right Quadrant), in 2017 and 2019 it was in the LLQ (Lower Left Quadrant) quadrant, in 2018 it was in the ULQ (Upper Left Quadrant) and in 2020 it was in the quadrant in the LRQ (Lower Right Quadrant).

**JEL:** G21, G32

**Keywords:** *Financial Performance, Islamic Banking, RGEC, SCnP Model*

### **1. PENDAHULUAN**

Pandemi Covid 19 yang muncul di penghujung 2019 menjadi fenomena baru yang mengguncang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid 19 berdampak signifikan terhadap aktivitas di bidang ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Sektor ekonomi syariah juga terkena imbas dari wabah tersebut, termasuk perbankan syariah. Menurut Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global (*State of Global Islamic Economy/SGIE Laporan*) 2020/2021, pengeluaran umat Islam global pada sektor ekonomi diperkirakan akan menurun sebesar 8% pada 2020. Selanjutnya, perekonomian Indonesia juga mengalami juga mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada 2020 (LPKSI, OJK 2020).

Meskipun ada kekhawatiran perlambatan pertumbuhan keuangan syariah pada 2020, Wabah Covid 19 juga berdampak baik bagi pertumbuhan keuangan syariah, salah satunya adalah mempercepat transformasi berbasis digital untuk menawarkan produk dan layanan berbasis digital yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang dibatasi mobilitas akibat Pandemi Covid 19, contohnya pendirian Bank Digital di Kazakhstan oleh *Al-Rayan Investment*, anak perusahaan keuangan Islam oleh

---

<sup>1</sup> Email: Lee.dinilestary10@gmail.com

MyEG dari Malaysia serta peluncuran aplikasi seluler QIB oleh *Qatar Islamic Bank*.

Dikutip dari kumparan.com semua sektor industri sampai perekonomian nasional menjadi lemah dan menghambat segala kegiatan masyarakat. Akan tetapi, sektor perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif terhadap ancaman Pandemi Covid 19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan beberapa ahli ekonomi syariah, Perbankan Syariah mempunyai kestabilan yang kuat sehingga sanggup bertahan dalam menghadapi krisis akibat pandemi tersebut. Keadaan ini dibuktikan dengan lajunya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah yang bergerak lebih aktif dibanding dengan bank konvensional.

Kinerja perbankan syariah 2020 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset Perbankan Syariah dari tahun ke tahun, menunjukkan bank syariah dapat mengelola likuiditasnya dengan baik sehingga jumlah aset terus bertambah. Demikian pula dengan dana pihak ketiga yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Artinya, perbankan dapat memanfaatkan sepenuhnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan nasabah mulai menyadari manfaat dari produk yang mereka tawarkan. Sementara itu, pembiayaan bank syariah pada 2020 turun 8,08%. Salah satu alasannya adalah pertumbuhan pembiayaan modal kerja melambat dari tahun ke tahun. Perbankan syariah masih mencatat pertumbuhan yang positif meskipun pertumbuhan melambat akibat Pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap penyaluran pembiayaan pada sektor industri.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum di Indonesia yang pertama kalinya mengaplikasikan prinsip Islam dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 01 November 1991 yang merupakan gagasan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), Pemerintah Republik Indonesia, Cendekiawan Islam dan masyarakat luas. Mulai beroperasi pada 1992, Bank Muamalat Indonesia mendapat persetujuan untuk membuka kantor cabang di Malaysia pada 2009, dan menjadikannya satu-satunya Bank pertama di Indonesia yang memperluas ekspansinya di Malaysia. Bank saat ini memiliki 249 kantor cabang tercatat cabang di Malaysia. Aktivitas bank terus didukung oleh jejaringan layanan yang besar dengan 619 ATM Muamalat, 120.000 ATM Prima dan ATM Bersama, serta 55 *Mobile Cash Car*.

Dilansir dari [bisnisjadimudah.id](https://www.bisnisjadimudah.id), beberapa periode terakhir ini, Bank Muamalat Indonesia dilanda isu yang menyatakan bahwa bank terancam pailit. Peristiwa ini disebabkan semenjak 2015 keadaan keuangan Bank Muamalat Indonesia memperoleh kinerja yang tidak memuaskan. Pada September 2017, beredar rumor bahwa Bank Muamalat Indonesia telah menemukan *buyer*, yaitu PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. untuk mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia. Bahkan PT Mina Padi telah melakukan penandatanganan atas perjanjian untuk mengakuisisi saham bank dalam bentuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED) sebagai *Standby buyer*. Namun pada awal Februari 2018, PT Mina Padi Investama Sekuritas Tbk mengatakan tidak dapat mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia karena berakhirnya perjanjian pemesanan bersyarat atau *Conditional Share Subscription Agreement (CSSA)* sejak Desember 2017. Beberapa pengamat mengatakan, bahwa Bank Muamalat Indonesia terancam bangkrut dikarenakan bank kekurangan modal, kredit bermasalah (NPF) dan biaya operasional yang besar (<https://www.bisnisjadimudah.id/bank-muamalat/>).

Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya lembaga keuangan syariah di Indonesia tentu wajib mengawasi perkembangan serta kemajuan dari kegiatan yang dilakukan dalam operasionalnya. Perkembangan ini terlihat dari pertumbuhan kondisi keuangan Bank dari tahun ke tahun yang dituangkan dalam laporan tahunan yang disusun oleh Bank. Berdasarkan ikhtisar keuangan laporan tahunan yang telah dipublikasikan Bank Muamalat Indonesia, aset, DPK dan pembiayaan yang dimiliki diketahui berfluktuasi lima tahun terakhir.

Berdasarkan laporan grafik dari OJK, Pertumbuhan Aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia selama 2016 hingga 2020 berfluktuatif. Pada 2016, aset yang diperoleh oleh sebesar Rp 55,786 Miliar. Pada 2017, aset mengalami peningkatan, sebesar Rp 61,697 Miliar. Kemudian pada 2018 dan 2019, pertumbuhan aset mengalami penurunan yang signifikan. Dana pihak ketiga yang diberikan oleh pada 2016 sebesar Rp 41,920. Pada 2017, dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp 48,686. Kemudian dana pihak ketiga mengalami penurunan pada 2018-2019, masing-masing sebesar Rp 45,636 dan Rp40,357. Dana pihak ketiga yang diberikan sebesar Rp41,424 pada 2020. Pembiayaan yang dihasilkan oleh bank, sebesar Rp40,050 pada 2016. Kemudian meningkat pada 2017 sebesar Rp41,332. Pada 2018 sampai 2020, pembiayaan mengalami penurunan, masing-masing sebesar Rp33,566, Rp29,877 dan Rp29,084.

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai penyedia jasa keuangan, bank syariah harus menilai kembali tujuannya sendiri sesuai dengan *Shari'ah maqashid*. Tujuannya agar bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain. Hal ini disebabkan bank syariah memiliki target pengukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bank tradisional (Arimiko, et al., 2020: 229).

Dari gambaran di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia. Kinerja keuangan suatu bank dapat dilihat melalui analisis laporan keuangannya. Laporan keuangan ini menggambarkan tingkat kinerja (baik atau buruk) bank. Untuk melihat apakah kinerja suatu bank baik atau buruk dapat dianalisis secara khusus berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan sumber literatur lainnya.

Berdasarkan regulasi oleh Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank umum wajib melakukan evaluasi sendiri terhadap tingkat kesehatan banknya dengan pendekatan peringkat berbasis risiko *Risk-based Bank Rating* (RBRR) baik secara individu ataupun konsolidasi, dengan lingkup evaluasi pengukuran terhadap faktor *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings* dan *Capital* atau yang disingkat RGEC (Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011).

Bersumber dari regulasi tersebut, metode RGEC hanya dipakai untuk bank umum tradisional. Namun, sejak OJK menerbitkan peraturan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah No. 8/POJK.03/2014, perbankan syariah memiliki pedoman dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC. Pasalnya, isi dalam ketentuan POJK No. 8/POJK.03/2014 hampir serupa dengan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank bisa dilakukan dengan pendekatan peringkat berbasis risiko (RBRR) dengan memperhatikan aspek-aspek RGEC.

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode model RGEC dan SCnP. Peneliti memilih model RGEC karena didasarkan pada regulasi Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS. Selain itu, peneliti juga memilih metode kepatuhan syariah dan profitabilitas atau yang dikenal dengan model SCnP, karena metode SCnP ini merupakan metode sesuai dengan spesifikasi perbankan syariah atau disesuaikan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dan karakteristik perbankan syariah.

Penilaian kinerja dengan menggunakan metode SCnP ini lebih terhimpun, karena menggabungkan dua arah penilaian, yaitu orientasi penilaian dengan kepatuhan syariah dan orientasi dengan profitabilitas bank. Jadi dengan menggabungkan kedua orientasi penilaian SCnP Model, maka

perolehan dari penilaian dengan metode ini akan menjadi lebih efektif. Sebab itu penilaian kinerja keuangan dengan metode SCnPini dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah (Prasetyowati & Handoko, 2016). Dengan menggunakan kedua metode tersebut peneliti ingin mengetahui perbedaan dari metode model RGEC dan SCnP terhadap keadaan kesehatan Bank Muamalat Indonesia dan juga melihat metode yang mana lebih baik dalam mengevaluasi kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Metode RGEC

Bank harus menilai secara *self assessment* mengenai tingkatan kesehatan bank dengan pendekatan Risiko, baik itu secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor- faktor: Profil Risiko (*risk profile*), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*earning*); dan Permodalan (*capital*) atau yang dikenal dengan RGEC untuk memperoleh rating komposit tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dapat dilakukan dengan dua *step* yaitu, individual atau konsolidasi, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah, penilaian tingkat kesehatan dilakukan secara individual saja. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang penilaian tingkat kesehatan kesehatan bank umum No. 13/1 /PBI/2011 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah No. 8/POJK.03/2014. Berikut indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja keuangan perbankan (Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014):

#### 1) *Risk Profile* (Profil Risiko)

*Risk profile* adalah indikator penilaian terhadap faktor risiko inheren dan kualitas pelaksanaan manajemen risiko dalam kegiatan usaha bank. Parameter/indikator dalam menilai profil risiko meliputi:

1. Risiko kredit merupakan risiko nasabah atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan akad yang disepakati (SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014). Rasio yang digunakan untuk menilai risiko kredit adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dengan ketentuan kurangan lancar, diragukan dan macet. Semakin rendah nilai NPF, maka akan semakin tinggi juga kualitas aset perusahaan (Istan et al., 2021: 100). NPF dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}}$$

**Tabel 1.** Predikat Komposit *Non Performing Financing*

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	<2%	Sangat Baik
2	PK-2	2% - <5%	Baik
3	PK-3	5% - <8%	Cukup Baik
4	PK-4	8% - <12%	Kurang Baik
5	PK-5	≥12%	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP Tahun 2011 (dalam Anik & Ningsih, 2020)

2. Risiko Likuiditas adalah ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari

sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat disimpan, tanpa mempengaruhi operasional dan keadaan keuangan Bank (SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014). Rasio yang digunakan untuk menilai risiko likuiditas adalah rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk rupiah dan valuta asing, bukan bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang meliputi giro, tabungan dan deposito. Semakin rendah nilai rasio FDR yang didapatkan maka semakin likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dibebankan (Instan et al., 2021: 100). Rasio FDR dihitung dengan rumus:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah DPK}}$$

**Tabel 2. Predikat Komposit FDR**

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	50% - <75%	Sangat Baik
2	PK-2	75% - <85%	Baik
3	PK-3	85% - <100%	Cukup Baik
4	PK-4	100% - <120%	Kurang Baik
5	PK-5	≥120%	Tidak Baik

Sumber: Chofifah, 2021

2) Good Corporate Governance (GCG)

Sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank umum syariah secara berkala melakukan penilaian sendiri atas praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan.

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah perbankan yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kewajaran, dan pertanggung jawaban. Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* merupakan evaluasi bank dalam menerapkan lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional dan kewajaran (SEOJK No. 10/SE.OJK.03/2014).

**Tabel 3. Predikat Komposit GCG**

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	<1,5	Sangat Baik
2	PK-2	<2,5	Baik
3	PK-3	<3,5	Cukup Baik
4	PK-4	<4,5	Kurang Baik
5	PK-5	<5	Tidak Baik

Sumber: Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR (dalam Wahasusmiah & Watie, 2018)

3) *Earning* (Rentabilitas)

*Earning* adalah kesanggupan suatu bank dalam menghasilkan margin. Penilaian terhadap faktor *earning* meliputi pengukuran terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, pengelolaan rentabilitas serta penerapan fungsi sosial (SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014). Rasio yang dipakai untuk

menilai rentabilitas adalah Tingkat Pengembalian Asets (ROA). ROA merupakan indikator yang menggambarkan kontribusi aset terhadap perolehan total laba. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan jumlah laba yang diperoleh banyak. Sebaliknya, nilai rasio ROA yang rendah menunjukkan jumlah laba yang diperoleh sedikit (Istan et al., 2021: 100). Rasio ROA dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}}$$

**Tabel 4. Predikat Komposit ROA**

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	<1,5%	Sangat Baik
2	PK-2	<1,25% - 1,5%	Baik
3	PK-3	<0,5% - 1,25%	Cukup Baik
4	PK-4	<0% - 0,5%	Kurang Baik
5	PK-5	<0%	Tidak Baik

Sumber: Lampiran 8 Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

#### 4) *Capital* (Permodalan)

Penilaian unsur *capital* meliputi penilaian kecukupan modal dan pengelolaan modal. Parameter/indikator yang dipakai untuk menilai *capital* adalah *capital adequacy ratio* (CAR) merupakan indikator kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank yang mendukung aset menanggung risiko atau *risk-produktion* (SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014). Rasio kecukupan modal merupakan rasio total modal terhadap total aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai rasio CAR maka semakin tinggi kualitas permodalan suatu bank (Istan et al., 2021: 100). Rasio CAR dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$$

**Tabel 5. Predikat Komposit CAR**

Peringkat	Keterangan	Kriteria	Kategori
1	PK-1	CAR >12%	Sangat Baik
2	PK-2	9% ≤ CAR ≤ 12%	Baik
3	PK-3	8% ≤ CAR < 9%	Cukup Baik
4	PK-4	6% ≤ CAR < 8%	Kurang Baik
5	PK-5	CAR ≤ 6%	Tidak Baik

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP Tahun 2011 (dalam Anik & Ningsih, 2020)

## 2.2. Metode SCnP Model (*Shari'ah Conformity and Profitability*)

Metode SCnP merupakan model penelitian penilaian kinerja keuangan bank syariah yang dilakukan oleh Kuppusamy, Saleh dan Samudram pada 2010. Metode SCnP ini merupakan alat ukur kinerja bank syariah yang lahir dari pemikiran dasar bahwa kinerja keuangan perbankan syariah bisa



nilai baik apabila menggunakan parameter keuangan syariah dan konvensional. Untuk mengukur kinerja bank syariah perlu menggunakan ukuran yang mewakili sisi syariah bank, meskipun bank syariah bertujuan untuk mencari keuntungan. Sebagai salah satu entitas bisnis, profitabilitas juga perlu diperhatikan (Kuppusamy, et al., dalam Ubaidillah & Astuti, 2020: 137).

Dalam penelitian ini, metode SCnP model terdapat dua indikator yang digunakan, yakni *Shari'ah Conformity* dan *Profitability*. *Shari'ah Conformity* mengukur kemampuan bank dalam mematuhi atau memenuhi sistem syariah dan kepatuhannya dengan prinsip syariah. Sedangkan *Profitability* mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan margin dalam menjalankan usahanya pada waktu tertentu.

1) Indikator *Shari'ah Conformity*

- a. *Islamic Investments* merupakan perbandingan jumlah penghasilan syariah dengan total penghasilan investasi yang telah diperoleh. Indikator *Islamic Investments* menggambarkan investasi persentase dari investasi yang dilaksanakan bank pada produk-produk halal (Arimiko et al., 2020: 234). *Islamic Investments* dalam keuangan laporan perbankan syariah terdapat pada akun investasi pada surat berharga, sedangkan *non-Islamic Investments* dapat ditemukan pada akun penempatan pada bank lain atau rekening giro pada bank lain. Mengenai perhitungan *Islamic Investments* pada bank syariah, dilakukan dengan perbandingan antara *Islamic Investments* dengan *Islamic Investments* ditambah *non-Islamic Investments* (Ubaidillah & Astuti, 2020: 138). Investasi syariah dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Islamic Investments} = \frac{\text{Islamic Investments}}{\text{Islamic Investments} + \text{Non Islamic Investments}}$$

- b. *Islamic Income* yaitu pendapatan atas bagi hasil yang didapatkan dengan cara memberikan pembiayaan untuk memperoleh pendapatan, terdiri dari *Islamic Income* and *non-Islamic Income*. Keuangan laporan bank syariah memiliki akun pendapatan non halal yang bersumber dari sumber dan kebajikan. Riba bank dari pihak lain tidak termasuk pendapatan syariah, tetapi dimasukkan sebagai sumber dan kebajikan. Untuk mengetahui sebesar apa bank syariah mendapatkan penghasilan syariah bisa dilakukan dengan membandingkan *Islamic Income* dengan *Islamic Income* ditambah dengan *non-Islamic Income*. (Ubaidillah & Astuti, 2020: 139). Pendapatan syariah dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Islamic Income} = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non Islamic Income}}$$

- c. *Profit Sharing Ratio*, merupakan perbandingan antara pendanaan musyarakah dan mudharabah dengan total pembiayaan (Arimiko et al., 2020: 234). Rasio bagi hasil dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{\text{Mudharabah musyarakah}}{\text{Jumlah pembiayaan}}$$

2) Indikator *Profitability*

Profitabilitas merupakan pengukuran terhadap kinerja keuangan dalam SCnP model. Profitabilitas bank diukur menggunakan rasio-rasio berikut (Arimiko et al., 2020: 234):

- a. Tingkat Pengembalian Aset (ROA), adalah perbandingan antaralaba bersih dengan total aset. ROA menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan semua asetnya dan dihitung dengan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

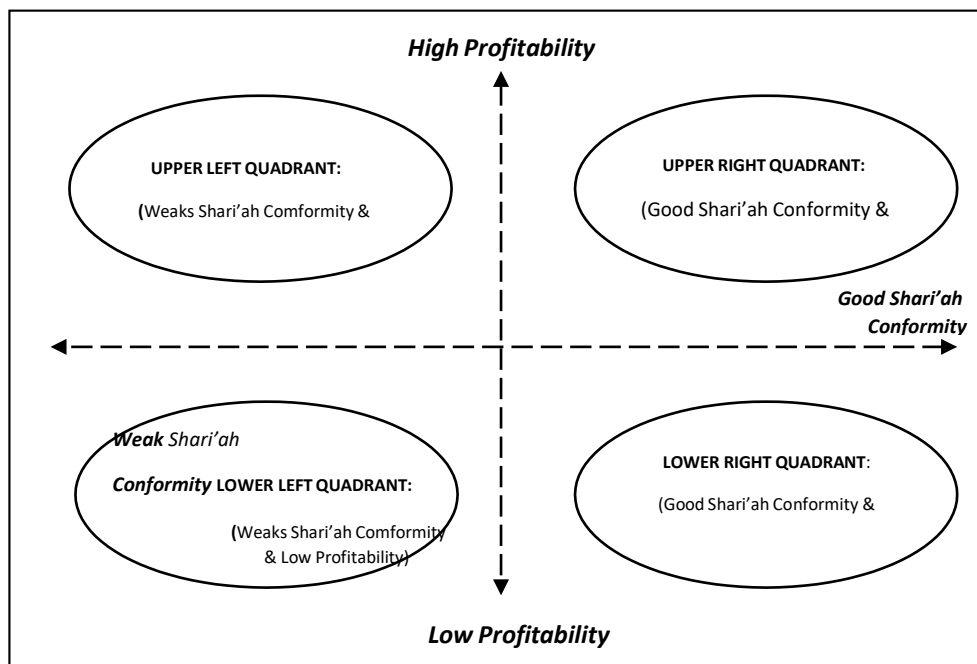
- b. Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) merupakan perbandingan laba bersih dengan total modal untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengalihan saham yang dimilikinya dan dihitung dengan rumus berikut.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

- c. Marjin Laba Bersih (NPM), adalah perbandingan antara laba neto dengan jumlah pendapatan yang diterima untuk mengetahui berapa sebenarnya pendapatan perusahaan dari kegiatan perbankan dan dihitung dengan rumus berikut.

$$NPM = \frac{\text{laba bersih}}{\text{Total Operating Revenue}}$$

Dalam model SCnP, variabel syariah dihitung dengan menghitung rata-rata tingkat kepatuhan syariah, sedangkan variabel konvensional diukur dengan menghitung tingkat pengembalian rata-rata. Variabel kepatuhan syariah diukur dengan indikator yaitu *islamic investment*, *islamic income*, dan *profit sharing ratio*. Disisi lain dari perspektif konvensional juga diukur dengan tiga indikator: ROA, ROE dan NPM. Untuk masing-masing indikator ini, hasilnya akan membentuk 4 grafik kuadran dengan masing-masing kuadran dipisahkan oleh rasio rata-rata semua bank. (Prasetyowati & Handoko, 2016: 113).

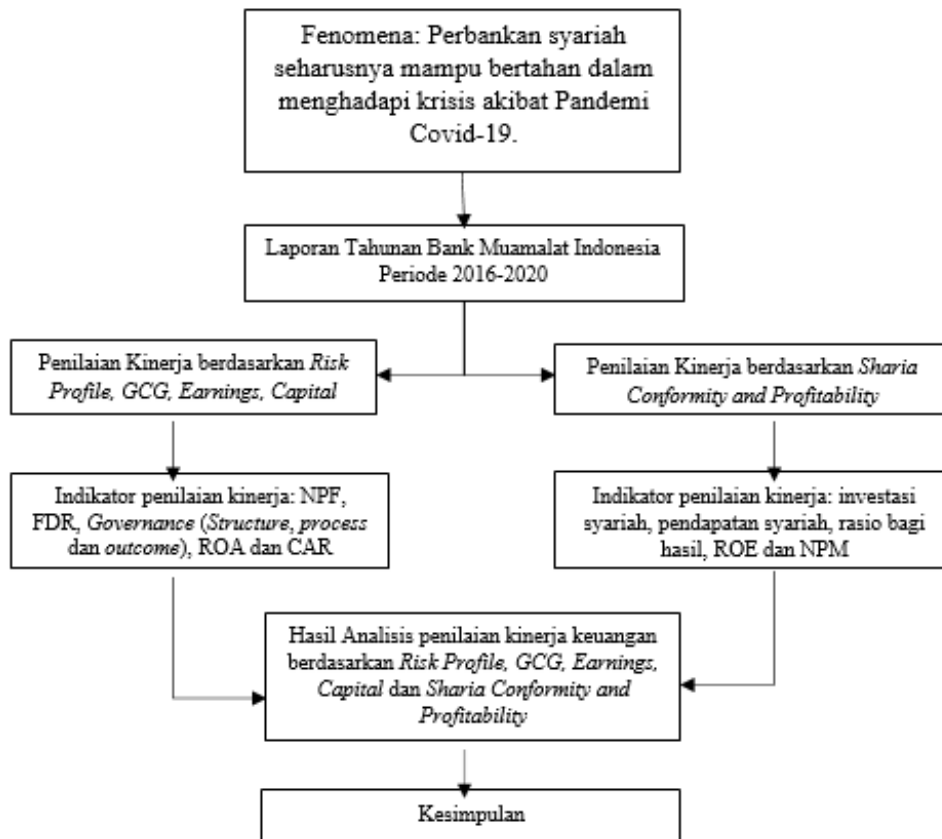


**Gambar 1. Model Shreya Conformity and Profitability (SCnP)**

Sumber: Kuppusamy, Saleh, Samudhram (dalam Ramdhoni & Fauzi, 2020)

Pada gambar di atas, model SCnP menjadi grafik menjadi empat kuadran, yakni: URQ, LRQ, ULQ dan LLQ. URQ/*Upper Right Quadrant* (kuadran kanan atas) menggambarkan bank syariah mempunyai tingkatan kepatuhan syariah yang tinggi serta memiliki tingkatan profitabilitas yang tinggi pula. LRQ/*Lower Right Quadrant* (kuadran kanan bawah) menunjukkan bank syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi tapi profitabilitasnya rendah. ULQ/*UpperLeft Quadrant* (kuadran kiri atas) menunjukkan bank syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang relatif rendah tetapi tingkat profitabilitas yang tinggi. LLQ/*Lower Left Quadrant* (kuadran kiri bawah) menunjukkan bank syariah dengan tingkat kepatuhan syariah dan profitabilitas yang lebih rendah.

Bank Muamalah Indonesia adalah bank umum pertama yang mengenalkan sistem syariah dalam operasionalnya. Penilaian kinerja keuangan bank sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kinerja keuangan bank dapat dapat dinilai melalui laporan keuangan perbankan. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia adalah RGEC dan SCnP Model. Kemudian hasil analisis akan menarik kesimpulan tentang kinerja keuangan bank syariah. Kinerja keuangan suatu bank dinilai tidak baik, apabila bank bermasalah pada salah satu faktor atau lebih begitu juga sebaliknya. Kerangka pemikiran penelitian ini diuraikan sebagai berikut.



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

### 3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fenomena atau peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat dalam kaitannya dengan subjek yang diteliti (Hardani, et al., 2020: 54). Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 yang dapat diunduh dari website Bank Muamalat Indonesia. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia yang telah dipublikasi periode 2016-2020. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel laporan Bank Muamalat Indonesia berupa akun-akun dengan penilaian kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020.

Variabel dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan melalui rasio-rasio keuangan yang terdapat didalam metode RGEC dan SCnP model peneliti menggunakan dua enam indikator. Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan	Risk Profile	NPF	Rasio
		FDR	Rasio
	GCG	Self Assessment	Rasio
	Earning	ROA	Rasio
	Capital	CAR	Rasio
	Sharia Conformity	Investasi Syariah Pendapatan Syariah Rasio Bagi Hasil	Rasio
			Rasio
Rasio			
Profitability	ROA ROE NPM	Rasio	
		Rasio	
		Rasio	

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Analisis Menggunakan Metode RGEC

##### 1) *Risk Profile* (Profil Risiko)

##### a) Rasio NPF (*Net Performing Financing*)

*Non Performing Financing* merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet.. Semakin rendah rasio NPF, maka akan semakin baik kualitas aset suatu bank. Untuk mendapatkan nilai rasio NPF adalah dengan membandingkan pembiayaan bermasalah (pembiayaan dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet) dengan jumlah pembiayaan. Berikut perhitungan rasio NPF.

**Tabel 7. Perhitungan Rasio NPF**

<b>Tahun</b>	<b>Kurang Lancar(KL)</b>	<b>Diragukan(D)</b>	<b>Macet (M)</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>NPF</b>
2016	239.751.846	141.488.543	1.144.133.397	1.525.373.786	3,81%
2017	242.055.677	513.572.116	1.110.776.050	1.866.403.843	4,52%
2018	361.083.028	60.884.010	864.680.529	1.286.647.567	3,83%
2019	323.768.301	117.327.336	947.922.824	1.389.018.461	4,65%
2020	42.649.815	76.513.909	1.264.445.964	1.383.609.688	4,76%

**Tabel 8. Peringkat Komposit NPF Bank Muamalat Indonesia**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Rasio</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>
1	2016	3,81%	2	Baik
2	2017	4,52%	2	Baik
3	2018	3,83%	2	Baik
4	2019	4,65%	2	Baik
5	2020	4,76%	2	Baik

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai NPF tahun 2016 sebesar 3,81%, pada 2017 selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 4,52%. Selanjutnya pada 2018, rasio NPF mengalami penurunan menjadi 3,83%. Pada 2019-2020, rasio NPF kembali menunjukkan peningkatan, masing-masing sebesar 4,65% dan 4,76%. Rasio NPF Bank Muamalat Indonesia selama periode 2016-2020 berada pada kondisi baik, artinya Bank Muamalat Indonesia sanggup memecahkan permasalahan pembiayaan yang dihadapi.

b) Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

*Financing to Deposit Ratio*) merupakan rasio dana yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, bukan oleh bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito. Rasio FDR yang rendah menunjukkan bank yang liquid dengan kelebihan cadangan dana yang siap untuk menghimpun dana. Sebaliknya nilai FDR yang tinggi menunjukkan pertumbuhan pembiayaan pada bank tersebut lebih tinggi dari pada pertumbuhan sumber dana pihak ketiga. Berikut perhitungan rasio FDR.

**Tabel 9. Perhitungan Rasio FDR**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Dana Pihak Ketiga</b>	<b>FDR</b>
2016	40.010.475.498	41.919.920.094	95,45%
2017	41.336.607.379	48.686.342.154	84,90%
2018	33.559.408.534	45.635.573.493	73,54%
2019	29.867.058.336	40.357.212.423	74,01%
2020	29.077.230.047	41.424.248.991	70,19%

**Tabel 10. Predikat Komposit FDR Bank Muamalat Indonesia**

No.	Tahun	Rasio FDR	Peringkat	Keterangan
1	2016	95,45%	3	Cukup Baik
2	2017	84,90%	2	Baik
3	2018	73,54%	1	Sangat Baik
4	2019	74,01%	1	Sangat Baik
5	2020	70,19%	1	Sangat Baik

Pada 2016 nilai rasio FDR Bank Muamalat Indonesia mencapai 95,45% dan dikategorikan cukup baik. Pada 2017 rasio FDR mengalami penurunan sebesar 84,90% yang mana termasuk dalam kategori baik. Tahun selanjutnya, pada 2018 kembali menunjukkan penurunan, sebesar 73,54%, pada 2019 sedikit mengalami kenaikan sebesar 74,01% dan pada 2020 rasio FDR bank menurun sebesar 70,19%. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 rasio FDR bank mengalami penurunan, meskipun pada 2019 sedikit mengalami kenaikan. Namun dalam tiga tahun tersebut kondisi bank termasuk kategori sangat baik. Artinya, Bank Muamalat Indonesia mampu memenuhi permintaan nasabah dalam mengeluarkan dana melebihi batas dana pihak ketiga yang diperoleh.

Hasil penelitian pengukuran kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 menunjukkan bahwa profil risiko menggunakan rasio NPF dan FDR berada dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio NPF Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian berada diantara 2% dan kurang dari 5%. Pada rasio FDR menunjukkan bahwa selama periode penelitian hasil persentase rasio FDR berada dibawah 100% sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Artinya selama periode penelitian Bank Muamalat Indonesia mampu meminimalisir kerugian yang dihadapi akibat dari risiko inheren selama periode waktu tertentu dimasa yang akan datang serta penerapan kualitas manajemen risiko secara komposit memadai.

## 2) *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)

Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan secara *self assessment* oleh pihak internal Bank Muamalat Indonesia. *Self assessment* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia periode 2016 hingga 2020 terdapat di dalam laporan GCG. Berikut hasil *self assessment* oleh Bank Muamalat Indonesia.

**Tabel 11. *Self Assessment* GCG Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020**

Tahun	Predikat Komposit	keterangan
2016	2	Baik
2017	3	Cukup Baik
2018	3	Cukup Baik
2019	3	Cukup Baik
2020	3	Cukup Baik

Sumber: Laporan GCG BMI 2016-2021

Dari tabel 11 diketahui hasil *self assessment Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia Pada 2016, memperoleh skor komposit 2, artinya manajemen bank telah menerapkan tata kelola yang baik. Dari 2017 hingga 2020 hasil *self assessment* GCG Bank Muamalat Indonesia adalah memperoleh nilai komposit 3, artinya Bank Muamalat Indonesia sudah melaksanakan penetapan tata kelola perusahaan yang baik secara umum cukup baik.

Hasil *self assessment* selama periode penelitian menunjukkan bahwa kondisi bank dalam keadaan cukup baik. Artinya penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran oleh Bank Muamalat Indonesia secara umum cukup baik.

3) *Earning* (Rentabilitas)

Rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset) merupakan rasio yang mengukur kontribusi aset dalam memperoleh laba kotor. Nilai rasio ROA yang tinggi menunjukkan jumlah margin yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, nilai rasio ROA yang rendah menunjukkan jumlah margin yang dihasilkan semakin kecil. Berikut hasil perhitungan rasio ROA.

**Tabel 12. Perhitungan Rasio ROA**

Tahun	Laba sebelum Pajak	Total Aset	ROA
2016	116.459.114	55.786.397.505	0,21%
2017	60.268.280	61.696.919.644	0,10%
2018	45.805.872	57.227.276.046	0,08%
2019	26.166.398	50.555.519.435	0,05%
2020	15.018.035	51.241.303.583	0,03%

**Tabel 13. Predikat Komposit ROA Bank Muamalat Indonesia**

Tahun	Rasio ROA	Peringkat	Keterangan
2016	0,21%	5	Tidak Baik
2017	0,10%	5	Tidak Baik
2018	0,08%	5	Tidak Baik
2019	0,05%	5	Tidak Baik
2020	0,03%	5	Tidak Baik

Tabel 13 menggambarkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2020, rasio ROA mengalami penurunan dan berada pada peringkat 5. Pada 2016, diketahui rasio ROA sebesar 0,21%. Tahun 2017 rasio ROA menunjukkan penurunan sebesar 0,10%. Di tahun-tahun selanjutnya pada 2018-2020, rasio ROA kembali menunjukkan penurunan kembali, masing-masing sebesar 0,08%, 0,05% dan 0,03%. Dari tabel diketahui bahwa rasio ROA dinilai tidak baik karena nilainya kurang dari 0,765%.

Hasil penelitian terhadap faktor *Earning* pada Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian menggambarkan bahwa bank dalam kategori tidak baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset) yang diperoleh selama periode 2016-2020 kurang dari 0,756% sesuai dengan kriteria standar penetapan oleh Bank Indonesia. Artinya kemampuan manajemen Bank Muamalat Indonesia dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba semakin menurun. Penurunan tersebut terjadi karena tidak stabilnya laba pada pendapatan dan jumlah aset yang dihasilkan.

4) *Capital* (Permodalan)

Rasio Kecukupan Modal (CAR) adalah membandingkan total modal terhadap total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Nilai rasio CAR yang semakin tinggi menunjukkan kualitas permodalan bank semakin baik. Sebaliknya nilai rasio CAR yang rendah menunjukkan kualitas *capital* bank semakin buruk. Berikut hasil perhitungan rasio CAR.

**Tabel 14. Perhitungan Rasio CAR**

Tahun	Modal	ATMR	CAR
2016	5.220.130.898	40.978.476.916	12,74%
2017	6.127.412.591	44.984.812.101	13,62%
2018	4.255.006.423	34.473.425.567	12,34%
2019	3.871.341.662	31.171.833.870	12,42%
2020	4.805.945.867	31.593.331.180	15,21%

**Tabel 15. Predikat Komposit CAR Bank Muamalat Indonesia**

Tahun	Rasio CAR	Peringkat	Keterangan
2016	12,74%	1	Sangat Baik
2017	13,62%	1	Sangat Baik
2018	12,34%	1	Sangat Baik
2019	12,42%	1	Sangat Baik
2020	15,21%	1	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, pada 2016 rasio CAR sebesar 12,74% dan mengalami sedikit kenaikan pada 2017, menjadi 13,62%. Pada 2018, rasio CAR mengalami penurunan sebesar 12,34% dan menunjukkan sedikit peningkatan di tahun 2019 menjadi 12,42%. Kemudian pada 2020, rasio CAR bank kembali menunjukkan peningkatan sebesar 15,21%.

**Tabel 16. Shari'ah Conformity Pada Bank Muamalat Indonesia**

Tahun	Islamic Investment	Islamic Income	Profit Sharing
2016	99,34%	99,97%	52,29%
2017	99,95%	99,98%	48,06%
2018	99,90%	99,98%	48,53%
2019	99,67%	99,98%	49,41%
2020	99,97%	99,99%	51,21%

Berdasarkan tabel di atas, Investasi syariah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada 2016 adalah 99,35%. Pada 2017 investasi syariah Bank Muamalat Indonesia meningkat sedikit yaitu 99,95% dan mengalami penurunan pada 2018 dan 2019 masing-masing 99,90% dan 99,67%. Kemudian pada 2020 investasi syariah Bank Muamalat Indonesia kembali menunjukkan peningkatan menjadi 99,97%. Pendapatan syariah yang dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia pada 2016 adalah 99,97%. Pada 2017-2019 pendapatan syariah yang dihasilkan dalam keadaan stabil yaitu 99,98% dan meningkat pada 2020 yaitu 99,99%.

Pada rasio bagi hasil, Bank Muamalat Indonesia memiliki persentase sebesar 52,29% pada 2016. Pada 2017 dan 2018 Rasio bagi hasil menunjukkan penurunan menjadi 48,06% dan 48,53%. Rasio bagi hasil Bank Muamalat Indonesia pada 2019 menunjukkan peningkatan menjadi 49,41%. Kemudian pada Hasil penelitian terhadap faktor *capital* pada Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian menunjukkan bahwa bank berada dalam kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio CAR lebih dari 12% sesuai dengan kriteria standar penetapan predikat komposit oleh Bank Indonesia yaitu >12% dengan kriteria sangat baik. Artinya Bank Muamalat Indonesia mampu menutupi atau mengatasi penurunan aktiva nya sebagai dampak dari kerugian yang dikarenakan oleh aktiva yang berisiko.



#### 4.2. Analisis Menggunakan Metode SCnP Model

Dalam penelitian ini, penilaian dengan SCnP Model menggunakan dua indikator, yaitu:

##### 1) *Shari'ah Conformity* (Kepatuhan Syariah)

Penilaian kinerja menggunakan *Shari'ah Conformity* bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam mematuhi kepatuhan syariah dalam hal investasi, pendapatan, dan bagi hasil, apakah sudah menerapkan sistem syariah atau belum. Variabel *Shari'ah Conformity* dalam penelitian ini diukur dengan tiga rasio, yakni tingkat *Islamic Investmentsratio*, tingkat *Islamic Income ratio*, dan tingkat *profit sharing ratio*. Berikut hasil perhitungan dari ketiga rasio tersebut. 2020 rasio bagi hasil Bank Muamalat Indonesia kembali menunjukkan peningkatan yaitu 51,21%.

Hasil penelitian penilaian kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian yang dinilai dari faktor *Shari'ah Conformity* dengan menggunakan rasio *Islami Investment*, *Islamic Income* dan *Profit sharing* berada dalam kategori Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Islamic Investments* dan *Islamic Income* yang hampir mendekati 100% meskipun rasio profit sharing dalam keadaan tidak stabil.

##### 2) *Profitability*

Penilaian kinerja berdasarkan *Profitability* bertujuan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam memberikan margin dalam periode tertentu selama menjalankan operasionalnya. Profitabilitas bank diukur menggunakan rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset), ROE (*Return on Equity*) dan NPM (*Net Profit Margin*). Berikut hasil dari perhitungan ketiga rasio tersebut.

**Tabel 17. Rasio Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia**

Tahun	ROA	ROE	<i>Profit Margin</i>
2016	0,14%	2,22%	2,42%
2017	0,04%	0,47%	0,93%
2018	0,08%	1,17%	1,87%
2019	0,03%	0,41%	1,16%
2020	0,02%	0,25%	0,45%

Tabel 17 menunjukkan bahwa rasio ROA yang dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia pada 2016 adalah 0,14% dan mengalami penurunan menjadi 0,04% pada 2017. Kemudian meningkat sedikit pada 2018 sebesar 0,08%. Pada 2019 dan 2020 rasio ROA Bank Muamalat Indonesia kembali menunjukkan penurunan menjadi 0,03% dan 0,02%. Hasil penilaian kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 memperoleh nilai rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset) tertinggi pada 2016 dan terendah pada 2020. Artinya pada 2016 Bank Muamalat Indonesia memperoleh kinerja yang baik dibandingkan tahun-tahun berikutnya.

Pada 2016 Bank Muamalat Indonesia menghasilkan sebesar 2,22% rasio ROE. Pada 2017 rasio ROE bank menunjukkan penurunan menjadi 0,47% dan pada 2018 mengalami kenaikan menjadi 1,17%. Kemudian pada 2019 dan 2020 rasio ROE Bank Muamalat Indonesia kembali menunjukkan penurunan menjadi 0,41% dan 0,25%. Hasil penilaian kinerja diketahui bahwa nilai rasio tertinggi terjadi pada 2016 dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Artinya, pada 2016 bank mampu dalam mengelola modal sendiri untuk mendapatkan laba atau keuntungan dibandingkan tahun lainnya dalam periode penelitian.

Rasio NPM Bank Muamalat Indonesia pada 2016 adalah 2,42% dan pada 2017 rasio *profit margin* menunjukkan penurunan menjadi 0,93%. Pada 2018 NPL Bank Muamalat Indonesia mengalami

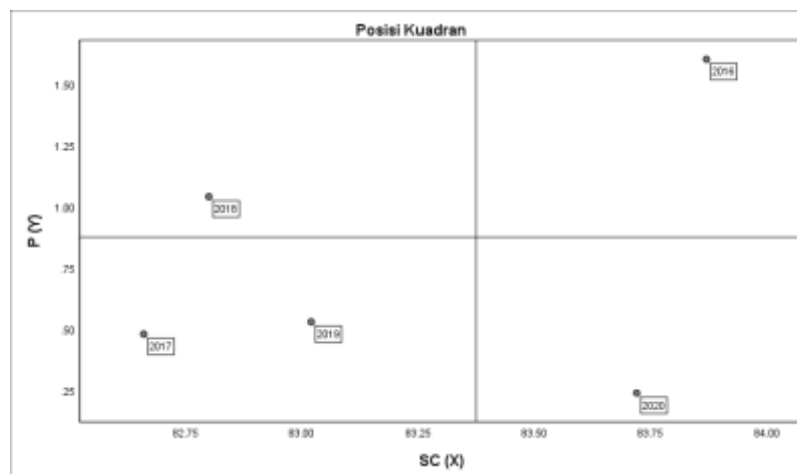
sedikit kenaikan menjadi 1,87% kemudian rasio NPM bank kembali menunjukkan penurunan pada 2019 dan 2020 menjadi 1,16% dan 0,45%. Hasil penilaian kinerja dengan rasio profitabilitas memperoleh nilai tertinggi pada 2016 dan terendah pada 2020.

Tahap selanjutnya adalah menentukan posisi kuadran Bank Muamalat Indonesia, maka perlu dilakukan perhitungan rata-rata dari variabel *Shari'ah Conformity* and *Profitability*. Berikut hasil perhitungan rata-rata *Shari'ah Conformity* and *Profitability*.

**Tabel 18. Perhitungan Rata-Rata dan Posisi Kuadran SCnP Bank Muamalat Indonesia**

Tahun	<i>Sharia Conformity</i> (SC)	<i>Profitability</i> (P)	Posisi <i>Quadrant</i> (Q)
2016	83,87%	1,60%	URQ
2017	82,66%	0,48%	LLQ
2018	82,80%	1,04%	ULQ
2019	83,02%	0,53%	LLQ
2020	83,72%	0,24%	LRQ

Berdasarkan tabel di atas, diketahui rata-rata untuk variabel *Shari'ah Conformity* (SC) dan *Profitability* (P), maka Langkah selanjutnya adalah menentukan letak koordinat variabel *Shari'ah Conformity* (X) dan *Profitability* (Y) menggunakan *software* SPSS versi 26. Sehingga didapatkan perpotongan koordinat, yaitu 83,87% untuk variabel *Shari'ah Conformity* (X) dan 1,60% untuk variabel *Profitability* (Y). Tahap selanjutnya membuat grafik, seperti gambar berikut ini.



**Gambar 3. Grafik Kuadran SCnP Model pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2017**

Grafik di atas memberikan gambaran kinerja Bank Muamalat Indonesia periode 2016 hingga 2020 tersebar di empat kuadran. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada 2016 posisi Bank Muamalat Indonesia berada pada URQ (*Upper Right Quadrant*), yang menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memperoleh tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang tinggi. Pada 2017 dan 2019 Bank Muamalat Indonesia menempati kuadran LLQ (*Lower Left Quadrant*). Hal ini berarti Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kesesuaian yang rendah dan profitabilitas yang rendah pula. Pada 2018, berada pada kuadran ULQ (*Upper Left Quadrant*), yang mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memperoleh tingkat kesesuaian syariah yang rendah, namun memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Pada 2020, menempatkan kuadran LRQ (*Lower Right Quadrant*), yang mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memperoleh tingkat kesesuaian syariah yang tinggi, namun memiliki

profitabilitas yang rendah. Hasil penelitian yang dilakukan pada periode 2016 hingga 2020 menunjukkan pergerakan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kondisi Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan selama periode 2016-2020.

## 5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 dinilai dari faktor Profil risiko (*Risk Profile*), berada pada kategori baik. Dinilai dari faktor *Good Corporate Governance* (GCG), menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia selama periode 2016-2020 berada dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil *self assessment* Bank Muamalat Indonesia yang memperoleh peringkat 3, yang artinya penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran oleh Bank Muamalat Indonesia cukup baik/memadai. Penilaian kinerja keuangan yang dinilai dari faktor Rentabilitas (*Earning*), menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 berada dalam kategori tidak baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil rasio ROA (Tingkat Pengembalian Aset) yang diperoleh selama periode 2016-2020 yang semakin menurun. Dinilai dari faktor Permodalan (*Capital*), kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 berada dalam kategori sangat baik.

Penilaian kinerja Bank Muamalat Indonesia dinilai dari faktor Shari'ah Conformity dan Profitability tersebar di empat kuadran. Pada 2016 kinerja Bank Muamalat Indonesia berada pada URQ (Upper Right Quadrant), yang menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan syariah dan profitabilitas yang tinggi. Pada 2017 dan 2019 kinerja Bank Muamalat Indonesia berada pada kuadran LLQ (Lower Left Quadrant), artinya Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan dan profitabilitas yang rendah. Pada 2018, berada pada kuadran ULQ (Upper Left Quadrant), yang mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan syariah yang rendah dan tingkat profitabilitas yang tinggi. Pada 2020 kinerja kuadran berada pada LRQ (Lower Right Quadrant), yang mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi, namun memiliki profitabilitas yang rendah. Keterbatasan pada penelitian ini adalah pada objek yang masih minim, diharapkan penelitian selanjutnya dapat berfokus pada semua bank umum syariah di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E. (2016). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pada PT. Indofarma (PERSERO) Tbk. (Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor :KEP-100/MBU/2002). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1), 103–115.
- Andrianto, & Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Anik, & Ningsih, S. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Mandiri Syariah Dengan Metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governace*, *Earnings and Capita*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 724-730.
- Arimiko, H., Mukhzarudfa, & Ilham, W. (2020). Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan *Sharia Conformity And Profitability* (SCNP) Model Dan *Sharia Maqashid Index* (SMI) Pada Bank Umum Syariah (Bus) Di Asia Tenggara Periode 2014-2018. *Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(4), 228–242.

- Aroza Siregar, H., & Suryani, F. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Produktivitas Umkm Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 105–117.
- Dangnga, Muh. T., & Haeruddin, M. I. M. (2018). *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan sistem Perbankan Yang Sehat* (A. Akbar, Ed.). CV. Nur Lina.
- Harahap, S. S. (2017). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardani, H., Juliana Sukmana, D., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Perbankan Syariah*. Referensi (GP Press Group)
- Istan, M., Permatalia, R., & Hardinata. (2021). *Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Menggunakan Metode RGEC*. 17(1), 94–107.
- Khaafi, M., et al. (2017). *Akuntansi Syariah*. Penerbit Madenatera.
- Limbong, C. H., et al. (2021). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. CV. Pena Persada
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Olivia, M. (2019). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dengan Pendekatan CAMEL Pada Pt Bank BNI Syariah, Tbk Dan Pt Bank BNI, Tbk Periode 2014-2018. *Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 8(1), 73–88.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*.
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan *Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP)*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 107–130.
- Rambe, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Al-Iqtishad Edisi*, 16, 18–37.
- Ramdhani, M. I., & Fauzi, F. A. (2020). Islamic Banks Performance: An Assessment Using Sharia Maqasid Index, Sharia Conformity and Profitability and CAMELS. *International Jurnal Of Applied Business Research* 2(1), 15-30.
- Sabirin. (2020). Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri: Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance. *Akuntabilitas*, 13(1), 51–62.
- Sarasati, Y. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode CAMEL Dan RGEC Pada Bprs Harta Insan Karimah Periode 2013- 2017*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Siregar, S. (2015). *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013*. FEBI UIN-SU Press.
- Sitoyo, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprotul, A., & Afriani, S. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja. *Ekombies Review: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 156–168.
- Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2020). *Instrumen Moneter Islam*. Rajawali Pers.

- Taufiq, I., & Rofiqo, A. (2022). Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Komparatif Menggunakan Metode CAMEL. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 20–31.
- Tyas, Y. I. W. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Elzata Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 28–39.
- Ubaidillah, & Astuti, T. P. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Sharia Conformity And Profitability (SCnP). *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 134–158.
- Wahasumiah, R., & Watie, K. R. (2018). Metode RGEC : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah. *Jurnal I-Finance*, 4(02), 170-184.
- Yunita, N. A. (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS dan PEARLS Pada Bank Umum di Indonesia*. CV. SEFA Bumi Persada.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori kePraktik*.

**PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Oleh:**

**Monica Olivia**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah, IAIN Pontianak  
*oliviaicamonica@gmail.com*

---

**.Article Info**

*Article History :*

*Received 16 July - 2022*

*Accepted 25 July - 2022*

*Available Online*

*31 July - 2022*

**Abstract**

*This research aims to examine the effects of region original revenue, general fund allocation, specific fund allocation, capital expenditure to economic growth. The population in this study were 12 counties and 2 city in West Borneo Province during the period of 2016 – 2018. The data used in this research is secondary data obtained from the document of Badan Pusat Statistik of West Borneo Province on official website <https://kalbar.bps.go.id>. The analytical method used multiple linear regression analysis with a significance level of 5% and help of SPSS version 20. The results show in partially that specific fund allocation has negative significant effects on the economic growth; but region original revenue, general fund allocation and capital expenditure has no effects on the economic growth in West Borneo Province. While in simultaneously the fourth variables has no effects on the economic growth in West Borneo Province.*

*Keyword :*

*Region Original Revenue,  
General Fund Allocation,  
Specific Fund Allocation,  
Capital Expenditure, and  
Economic Growth.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan sistem otonomi daerah. Didalam sistem ini pemerintah pusat memberikan kewenangan yang seluas - luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat/daerahnya sendiri. Pengelolaan kepentingan masyarakat/daerah ini dapat dilihat dari laporan keuangan daerahnya masing-masing. Provinsi Kalimantan Barat telah menerapkan kebijakan ini sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tingkat pertumbuhan suatu daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik. Menurut Arsa, 2015 (dalam Rasdalima dkk, 2017) "Tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau telah memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi". Sedangkan menurut Sari, 2016 "Tata kelola keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan SDM yang handal, tetapi juga didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga dapat digunakan dalam menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh sebab itu maka, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut telah memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya".

Mardiasmo, 2009 (dalam Gerungan dkk, 2016) menyatakan bahwa "Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pada dasarnya memiliki tiga misi utama yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah".

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan untuk satu tahun kedepan yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran daerah yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini berisi seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang/jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan pembiayaan Anggaran (Pembiayaan Defisit) yang digunakan untuk menutupi defisit (kekurangan) Anggaran Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetapnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal didefinisikan sebagai "Pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud". Menurut PP No. 71 Tahun 2010 "Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dari belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan keuntungan jangka panjang secara finansial. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas".

Otonomi daerah ini juga dikenal dengan istilah desentralisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, "Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya". Dalam sistem ini pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Pembangunan suatu daerah erat kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Menurut Sukirno, 2010 (dalam Dewi dkk, 2017) "Pertumbuhan

ekonomi dapat diartikan sebagai suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat mengalami kenaikan (bertambah)". Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota**  
**/Provinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun 2016-2018 (%)**

Provinsi/Kab/Kota	2016	2017	2018
Kalimantan Barat	5.20	5.17	5.06
Kab. Sambas	5.24	5.13	5.10
Kab. Bengkayang	5.15	5.66	5.37
Kab. Landak	5.28	5.21	5.12
Kab. Mempawah	5.99	5.93	5.87
Kab. Sanggau	5.34	4.50	4.47
Kab. Ketapang	7.97	7.21	7.99
Kab. Sintang	5.28	5.33	5.47
Kab. Kapuas Hulu	5.28	5.39	5.23
Kab. Sekadau	5.93	5.85	5.88
Kab. Melawi	4.75	4.79	5.44
Kab. Kayong Utara	5.98	5.42	5.02
Kab. Kubu Raya	6.37	6.56	5.49
Kota Pontianak	5.08	5.05	5.03
Kota Singkawang	5.17	5.42	4.71

Sumber : <https://kalbar.bps.go.id>, data diolah 2022

Pada tabel 1.1 diatas dapat kita lihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan yaitu 5.20% (2016), 5.17% (2017), menjadi 5.06% (2018). Brata, 2004 (dalam Dewi dkk, 2017) menyatakan bahwa "Terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka ada kemungkinan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PAD".

Ollukayode, 2009 (dalam Dewi dkk, 2017) mengatakan bahwa "Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian. Dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk menambah fasilitas publik". "Belanja modal (BM) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian daerah tersebut" (BPS, 2015). Mardiasmo, 2009 (dalam Gerungan dkk, 2016) menyatakan bahwa "Secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga akhirnya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan daerah".

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti ingin melakukan analisis tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Harapannya hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan seberapa besar pengaruh yang muncul baik secara parsial maupun simultan yang diakibatkan oleh realisasi PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Menurut Syukriy dan Halim, 2003 (dalam Dewi dkk, 2017) disebutkan bahwa "Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lainnya".

Peningkatan PAD dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar PAD membuat pertumbuhan ekonomi daerah semakin baik daripada sebelumnya. Semakin tinggi nilai PAD akan mampu memaksimalkan kegiatan pada bagian yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi contohnya bagian industri serta perdagangan, jasa, serta yang lainnya. (Anwar dkk, 2016)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 1 sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

## DANA ALOKASI UMUM



Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Menurut Gan dkk, 2005 (dalam Dewi dkk, 2017) “DAU merupakan suatu sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah, DAU dapat didistribusikan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah baik secara horizontal maupun vertikal”.

Semakin tinggi DAU yang dipakai agar tersebarnya kemampuan keuangan daerah, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Menurut Siti Dini dkk, 2021 menyimpulkan bahwa “semakin besar DAU, maka semakin tinggi nilai Pertumbuhan Ekonomi. DAU dapat mengatasi ketidakseimbangan infrastruktur dan juga dapat menekankan keadilan sesuai urusan pemerintah untuk menciptakan Pertumbuhan Ekonomi.”

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dirumuskan hipotesis 2 sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

#### **DANA ALOKASI KHUSUS**

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional”.

Apabila DAK semakin besar, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, serta apabila DAK semakin kecil, Pertumbuhan ekonomi semakin menurun. (Siagian, 2018) Jadi dapat kita simpulkan DAK menjadi penting dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten, sebab dana tersebut sumbernya dari pemerintah pusat dan dianggarkan pemerintah daerah untuk penanganan kegiatan khusus agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Makin besar DAK, makin tinggi pertumbuhan ekonominya. (Siti Dini dkk, 2021)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dirumuskan hipotesis 3 sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

#### **BELANJA MODAL**

Ollukayode, 2009 (dalam Dewi dkk, 2017) mengatakan bahwa “Pengeluaran pemerintah

merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk menambah fasilitas publik”. “Belanja modal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian daerah tersebut” (BPS, 2015). Mardiasmo, 2009 (dalam Gerungan dkk, 2016) menyatakan bahwa “Secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga akhirnya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan daerah”.

Sehingga Belanja Modal merupakan hal penting dalam Pertumbuhan Ekonomi karena makin tinggi Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi juga makin baik dan mendorong daerah untuk mengembangkan potensi fasilitas dan pelayanan publik serta meningkatkan aset jangka panjang. (Siti Dini dkk, 2021)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dirumuskan hipotesis 4 sebagai berikut:

H4: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

#### **PERTUMBUHAN EKONOMI**

Dalam Rori dkk, 2016 menyatakan bahwa “PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah semua nilai barang serta jasa yang didapatkan dari semua aktivitas ekonomi di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dengan PDRB berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dipakai untuk penjelasan umum yang menampilkan tingkat pertumbuhan negara yang dilihat lewat pertambahan penghasilan nasional riil.”

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dihitung dengan satuan PDRB yang dipakai untuk penerangan atau pengukuran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kriteria yang dipakai untuk pengukuran prestasi ekonomi negara tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kondisi meningkatnya PDRB dari suatu daerah yang dinyatakan mengalami peningkatan apabila terdapat kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya. (Siti Dini dkk, 2021)

Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan BM terhadap pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bersumber pada data sekunder yang diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: <https://kalbar.bps.go.id>. Menurut Sugiyono (2015), "Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan". Sedangkan Penelitian berbentuk asosiatif menurut Rahyuda, dkk (2004) yaitu "Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih".

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono, 2015 "Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka/bilangan". Sumber data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2018 dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan) (publikasi BPS, Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka tahun 2016-2018). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2018. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 variabel x 14 pemerintah kabupaten/kota x 3 tahun = 210.

Variabel dependen/terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, yang dihitung dengan rumus (Bappenas, 2003 dalam Dewi, dkk 2017):

$$PDRB = \frac{PDRB(t) - PDRB(t-1)}{PDRB(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB(t)= Produk Domestik Bruto Tahun Sekarang

PDRB(t-1)= Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sebelumnya

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Belanja

Modal (X4). PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU):

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus untuk menghitung Dana Alokasi Khusus (DAK):

$$\text{Rasio DAK} = \frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan rumus untuk menghitung rasio Belanja Modal (BM):

$$\text{Rasio BM} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipan dengan teknik analisis regresi linear menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, 2, 3, 4$  = Koefisien determinasi

X1 = PAD

X2 = DAU

X3 = DAK

X4 = Belanja Modal (BM)

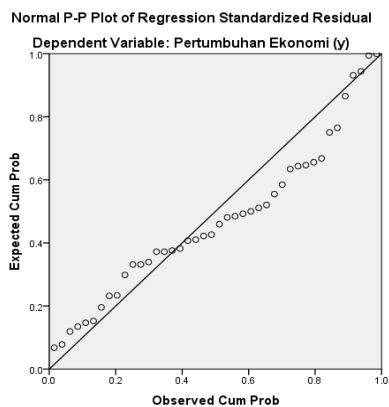
e = Error

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dipaparkan melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Serta uji regresi linier berganda yang meliputi uji t parsial dan uji f simultan, sehingga dapat menjawab hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan. Berikut pemaparan dari masing-masing hasil uji yang telah penulis lakukan dengan alat bantu SPSS versi 20.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

**Gambar 1**



Model regresi dapat dikatakan terdistribusi normal apabila data *ploting* (titik-titik) yang menggambarkan data penelitian mengikuti garis diagonal. Dilihat dari gambar 1, maka model regresi pada penelitian ini telah terdistribusi dengan normal dan layak untuk diteliti.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3.1 Hasil Uji Multikolinearitas**

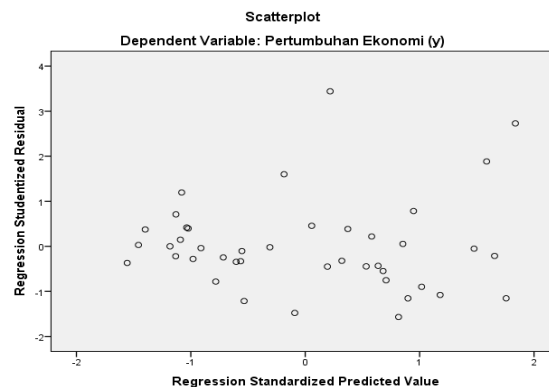
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD (X1)	.393	2.542
DAU (X2)	.531	1.882
DAK (X3)	.566	1.765
BM (X4)	.919	1.088

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini yaitu toleran PAD(X1) 0,393 > 0.100, DAU(X2) 0.531 > 0.100, DAK(X3) 0.566 > 0.100 dan BM(X4) 0.919 > 0.100 serta nilai VIF PAD(X1) 2.542 < 10.00 DAU (X2) 1.882 < 10.00 DAK(X3) 1.765 < 10.00 dan BM(X4) 1.088 < 10.00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada data penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

**Uji Heteroskedastisitas Scatterplots**

**Gambar 2**



Dalam suatu penelitian dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak membentuk suatu pola yang jelas pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola/bentuk yang jelas. Sehingga dari hasil uji heteroskedastisitas pada model regresi ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 3.2 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Squared	Adjs. R Square	Std. Error	Durbin - Watson
1	.425 <sup>a</sup>	.181	.092	.72981	2.255

Sumber: Data diolah, 2022

Suatu penelitian dapat dikatakan tidak ada gejala autokorelasi, jika nilai Durbin Watson terletak diantara du sampai dengan (4-du). Dalam penelitian ini nilai du (1.7202) < dw (2.255) < (4-du) (2.2798), artinya tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini.

**Uji Regresi Linear Berganda**

**Tabel 3.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	Standard. Coef.	T	Sig.
Cons	4.929	2.116	2.330	0.025
X1	-0.020	0.029	-0.694	0.493
X2	0.031	0.030	2.048	0.032

	X3	-	0.03	-	-	0.083
		0.053	0	0.35	1.78	
	B	0.00	0.02	0.01	0.08	0.932
	M	2	1	3	5	
Adjusted R Square		0.092				
F Hitung		2.039				
Sig. F		0.109				

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diperoleh rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.929 - 0.020X_1 + 0.031X_2 - 0.053X_3 + 0.002X_4 + e$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel PAD (X1) dan DAK (X3) memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), variabel DAU (X2) dan Belanja Modal/BM (X4) memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Kemudian dari nilai Adjusted R Square sebesar 0.092 dapat diketahui bahwa pengaruh keempat variabel independent yaitu PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap variabel dependent (Pertumbuhan Ekonomi) hanya sebesar 9.2%, sisanya 90.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### Uji T Parsial

Dalam Imam Ghozali (2006) "Jika nilai sig. < 0.05 maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent (Y). Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:155) "jika nilai t-hitung > t-tabel maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent (Y)".

Pada Tabel 3.3 diketahui bahwa nilai sig. PAD (X1) adalah 0.493 > 0,05 maka dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X1 terhadap Y. Sedangkan untuk t-hitung PAD(X1) < t-tabel yaitu -0.693 < 2,026 artinya variabel PAD (X1) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa **H1 ditolak**.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa, dkk 2017 dimana PAD memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penyebabnya adalah karena pengalokasian PAD terhadap Belanja Langsung dalam hal ini belanja modal lebih kecil dibanding dengan Belanja Tidak Langsung, sehingga Pertumbuhan Ekonominya mengalami penurunan.

Hal yang sama terjadi pada variabel DAU(X2) memiliki nilai sig. sebesar 0.302 > 0,05 sehingga diketahui bahwa DAU(X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi (Y). Untuk nilai t-hitung DAU(X2) < t-tabel adalah 1.048 < 2.026 sehingga diketahui bahwa variabel DAU(X2) tidak memiliki pengaruh parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa **H2 ditolak**.

Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Dini dkk, 2021 bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Aceh. Hal ini disebabkan karena DAU yang diperoleh tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana tetapi hanya sebagian kecil yang dipakai. Ini menunjukkan bahwa semakin besar DAU, maka akan semakin menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah malah mendapat alokasi DAU yang lebih tinggi dikarenakan perhitungan DAU berdasarkan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan potensi fiskal pada daerah tersebut.

Sedangkan untuk variabel DAK (X3) yang memiliki nilai sig. 0.038 < 0.05 maka dapat diketahui bahwa DAK (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pada nilai t-hitung DAK (X3) > t-tabel sebesar -2.780 > 2.026 maka variabel DAK(X3) memiliki pengaruh parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan bernilai negatif. Hal ini berarti, jika variabel independen lain tetap dan variabel DAK(X3) mengalami kenaikan 1% maka profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar 0,038%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H3 diterima**.

Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumala, 2018 dimana DAK memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan DAK dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomi yang panjang, termasuk juga pengadaan sarana fisik penunjang yang mana ini sesuai dengan kriteria belanja modal.

Sementara itu pada variabel Belanja Modal(X4) yang memiliki nilai sig. 0.932 > 0.05 maka dapat diketahui bahwa Belanja Modal(X4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pada nilai t-hitung Belanja Modal (X4) < t-tabel yaitu sebesar 0.085 < 2.026 maka variabel Belanja Modal(X4) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap

Pertumbuhan Ekonomi (Y). Maka disimpulkan bahwa **H4 ditolak**.

Hasil yang didapat sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Dini dkk, 2021 bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Aceh. Hal ini terjadi karena kurang tepatnya pengalokasian belanja modal dan pemerintah yang kurang produktif dalam belanja infrastruktur. Selain itu juga belanja modal tidak dapat dinikmati dalam jangka pendek/ pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

#### Uji F Simultan

Pada Tabel 3.3 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar  $0,109 > 0,05$  dan nilai Fhitung  $< F_{tabel}$  yaitu sebesar  $2.039 < 2.620$  sehingga dapat disimpulkan bahwa **H5 ditolak** yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara PAD (X1), DAU(X2), DAK(X3), dan Belanja Modal (X4) secara bersama-sama/simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Hasil tersebut berbeda dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dini dkk, 2021, dimana secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Aceh.

#### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan alat bantu SPSS versi 20 diketahui bahwa :

1. Secara parsial PAD, DAU, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan DAK memiliki pengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih memerlukan dana bantuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Hal ini ditujukan untuk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan fiskal antar provinsi agar kemandirian dalam menjalankan otonomi daerah dapat tercapai.

#### 6. REFERENSI

- Dewi, Ni Wayan Ratna, dkk. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18 No. 3, Hal 1745-1773.
- Dini, Siti dkk, 2021. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DI Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 4, Nomor 2 hal 65-80.
- Gerungan, Henri Paulus, dkk. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado, Vol. 8 No. 1 Hal 233-245.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro
- <https://kalbar.bps.go.id>
- Kumala, Dayana N.C. 2018. Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal (Studi Kasus pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 6 No. 2
- Kumendong, Febricia Frontalin, dkk. 2020 Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal: Analisa Keuangan Pada Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 5 No. 1 Hal 50-56.
- Lisa, Yulianus dkk (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Forum Ekonomi Volume 19 (2), 2017 hal 162-173
- Rahyuda, I Ketut, dkk. 2004. Metodologi Penelitian. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Rasdalima, Robert. J, dkk. 2017. Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 17 No.1 Hal 134-145.
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten (PAD) Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.

Sari, Greydi Normala. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004-2014. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*. Manado, Vol 18 No. 2 Hal 1-19.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wandiri, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No. 1 Hal 44-51.

## Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar

Verdianti<sup>1</sup>, Puja<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAIN Pontianak

<sup>1</sup>verdianti@iainptk.ac.id, <sup>2</sup>puja36427@gmail.com

**Tujuan penelitian** ini untuk mengetahui pengaruh Penggunaan digitalisasi terhadap efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

**Desain / metodologi / pendekatan** penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel penelitian 43 responden lembaga BAZNAS Kalbar. Informasi penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS Versi 25.

**Temuan Penelitian** hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara digitalisasi zakat dan efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS yang dilihat dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $t$ -statistik bernilai positif (12,122) sedangkan nilai  $t$ -tabel 1,681, berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam digitalisasi zakat terhadap tingkat efektivitas dalam pengumpulan zakat BAZNAS berpengaruh terhadap efektivitas karena dari hasil pernyataan yang ada bahwa tingkat pencapaian atau banyaknya hasil kerja yang dicapai telah sesuai dengan tingkat ukuran mutu kerja dengan sesuai tujuan BAZNAS. Melakukan transaksi digitalisasi zakat menggunakan aplikasi LinkAja, dapat dilakukan tanpa batas waktu dalam membayar zakat dan juga dapat dilakukan dengan cepat tanpa adanya hambatan dengan efektif dalam membayar zakat.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Zakat, Efektivitas.

### PENDAHULUAN

Di era digitalisasi ini, masyarakat cenderung mengubah gaya dan perilakunya kepada perilaku dan gaya hidup digital pada setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan. Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia perzakatan juga mengalami perkembangan. Teknologi digital telah digunakan dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat, pengelolaan zakat, serta sebagai sarana edukasi zakat. Dalam bidang penghimpunan, secara umum terdapat tiga platform yang tersedia untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah Pertama, internal platform adalah platform yang dikembangkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sendiri dalam bentuk *website* atau aplikasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya, menyediakan laman pembayaran zakat pada situs webnya serta aplikasi Muzakki Corner. Kedua, *external platform*, merupakan platform yang disediakan mitra OPZ untuk menghimpun dana ZIS. Ketiga, *social media platform* yang merupakan platform penghimpunan ZIS melalui media sosial (Jamaludin, N., & Aminah, S. 2021).

Harjun Muharam dan Rizki Pusvitasari (2007: 381) mengatakan efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan dan kesesuaian tugas dengan teknologi informasi memberikan pengaruh yang positif jika BAZNAS mampu menerapkan sistem informasi akuntansi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif maka akan mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya yang nantinya dapat meningkatkan

efisiensi kinerja. Potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (Pusat Kajian Strategi, 2019: 6-8). Adapun besaran kemampuan pada tahun 2017 yaitu sebesar 462 triliun rupiah. Nilai kemampuan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan zakat saat ini di mana regulasi yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Besarnya kemampuan tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal. Dari tahun 2017, jumlah zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul yaitu sebesar 6,2 triliun Pusat Kajian Strategi, 2019: 11). Walaupun mengalami peningkatan sekitar 24% atas dari pengumpulan ZIS pada tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun (Pusat Kajian BAZNAS, 2017), tetapi pengumpulan tersebut bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat (Pusat Kajian Strategi, 2019: 2).

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS**  
**Kalimantan Barat 2017-2021**

No .	Tahun	Jumlah Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah
1.	2017	4.029.732.947
2.	2018	3.715.106.301
3.	2019	3.795.405.169
4.	2020	8.763.215.583
5.	2021	4.190.041.456

Sumber: BAZNAS Kalimantan Barat

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengumpulan zakat berbeda-beda yang membayar zakat di BAZNAS Kalbar mengalami fluktuasi, yang mana Pada tahun 2017 jumlah dana zakat, infak dan sedekah Terkumpul Rp4.029.732.947, Pada tahun 2018 Jumlah pengumpulan dana zakat menurun sebesar Rp3.715.106.301, Pada tahun 2019 jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah juga meningkat sedikit dari tahun 2018 sebesar Rp3.795.405.169, Pada tahun 2020 jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah meningkat lagi dari 2019 sebesar Rp8.763.215.583 dan sedangkan pada tahun 2021 jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah menurun lagi dari 2020 sebesar Rp4.190.041.456.

Dari jumlah pengumpulan tahun 2017, mayoritas zakat yang dihimpun merupakan zakat maal penghasilan individu, yakni mencapai 44,75% dari total pengumpulan ZIS (BAZNAS, 2018). Sedangkan, proporsi terbesar dari kapasitas pengumpulan zakat adalah zakat perusahaan sebagaimana disebutkan oleh Firdaus, et.al (2012). Dengan begitu, apabila kemampuan ini dapat dioptimalkan, tentunya akan berdampak besar bagi pencapaian penghimpunan zakat nasional. Digitalisasi sistem zakat juga dapat memajukan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola zakat. Melalui para badan dan lembaga zakat, teknologi dinilai mampu memudahkan cara pemasaran hingga pendistribusian dana zakat sehingga lebih tepat guna. Kehadiran teknologi akan mempermudah pembayaran zakat, dan membolehkan mereka untuk memonitor penyaluran dana zakat yang disalurkan. Guna memaksimalkan digitalisasi sistem zakat, (Pusat Kajian Strategi, 2019: 2-3) mengatakan, setidaknya ada tiga area yang perlu dibenahi, meliputi yang pertama peningkatan kesadaran wajib zakat, yang kedua pengumpulan zakat, yang ketiga pelaporan penyaluran zakat.

Ascarya (2018:1) mengatakan alasan bernilainya digitalisasi zakat yang pertama digital *finance* itu bisa mampu membuat pengumpulan atau pengelolaan zakat dilakukan dengan efektif, transparan



dan masif, akhirnya digitalisasi mampu meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat. Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki populasi terbesar keempat di dunia dengan penduduk 255,9 juta orang pada tahun 2015 dan sekitar 85% penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim terbesar, tidak diragukan lagi Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar.

Tentunya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya atau rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia. Menurut (Ascarya dan Yumanita Diana, 2018: 1-2) setidaknya ada tiga penyebab rendahnya penghimpunan dana zakat nasional. Pertama, rendahnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, baik yang publik (BAZNAS) maupun yang privat (LAZ), dan perilaku pembayar zakat yang masih amat karitatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis, dan interpersonal. Kedua, basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan zakat profesi. Ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Namun demikian, sampai saat ini keadaan tersebut belum berubah banyak.

Baznas sebagai badan yang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana publik wajib menyampaikan transparansi capaian kinerja ke publik. Esensi pengelolaan zakat melalui institusi amil adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran zakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (kelompok penerima zakat). Sejumlah studi membuktikan bahwa penyaluran zakat secara langsung dari muzakki (wajib zakat) kepada mustahik memiliki dampak yang kurang signifikan dibandingkan dengan apabila penyaluran zakat tersebut dilakukan dengan melibatkan peran amil zakat dalam mengintermediasi muzakki dan mustahik.

Namun demikian, harus diakui bahwa kualitas program penyaluran zakat ini perlu untuk terus ditingkatkan. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan zakat, baik untuk program yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, maupun untuk program-program yang bersifat produktif, memberdayakan, dan memiliki dampak pada jangka panjang (Syauqi, Irfan, 2016). Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad mengatakan digitalisasi mempermudah umat dan masyarakat untuk menunaikan zakat, terutama saat pandemi Covid-19 karena tanpa berbelit-belit. Ia mengatakan BAZNAS harus menyesuaikan diri dengan era digital sehingga menjadi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang hadir dan dekat dengan umat serta masyarakat. Dengan begitu, BAZNAS menjadi tempat tujuan pertama para pembayar zakat. BAZNAS akan terus memanfaatkan kanal-kanal digital untuk menggandeng para *muzakki*. Optimalisasi jaringan media sosial juga terus ditingkatkan agar menjadi upaya "jemput bola" bagi penerimaan zakat.

Digitalisasi zakat akan sangat memberikan manfaat bagi badan amil maupun bagi calon mustahik. Karena proses pengumpulan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Pengelolaan zakat juga lebih efisien, transparan dan masif. Tidak banyak yang digunakan untuk administrasi, konsumsi, dan biaya marjinal lainnya.

Dengan digitalisasi, pengumpulan zakat akan dapat menjangkau kaum milenial dalam jumlah sangat besar. Selain itu, mobilisasi pembayaran zakat juga dapat diintegrasikan secara profesional. Kepercayaan dan minat masyarakat pembayar zakat (*muzakki*) juga akan meningkat. Dengan demikian, banyaknya jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan melalui aplikasi digital diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik (Basrowi, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. Untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat Lembaga amil zakat yaitu lembaga yang membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dengan adanya lembaga amil zakat, maka proses pengumpulan dan penyaluran zakat dapat lebih mudah terarah dan tertib. *Mustahik* dapat merasakan manfaatnya secara adil, distribusinya akan lebih merata tetapi sebaliknya akan terjadi apabila diserahkan secara langsung kepada *muzakki*, walaupun secara hukum Syariah sah-sah saja.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Digitalisasi Zakat

Rustam Aji (2016: 34) mengemukakan bahwa teknologi digital merupakan suatu teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual. Sistem digital yaitu perkembangan dari sistem analog. Digitalisasi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Perubahan sistem analog ke digital telah mengubah banyak hal dan mengancam eksistensi media cetak. Sebagian besar pelanggan media cetak telah beralih ke penggunaan teknologi yang lebih fleksibel, bisa membaca informasi terbaru kapan saja dan dimana saja. Bahwa teori digital selalu berkaitan erat dengan media, karena media terus berkembang seiring dengan majunya teknologi dari media lama sampai media terbaru, sehingga mempermudah manusia dalam segala bidang yang berkaitan dengan teori digital.

Digital yaitu sebuah metode yang kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Sedangkan teori digital yaitu sebuah konsep pemahaman dari perkembangan Zaman mengenai Teknologi dan Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Dan saat ini, di era teknologi digital tengah dimulai. Semua serba teknologi. Peralihan sistem analog ke digital ini, telah mengubah banyak hal (Rustam Aji, 2016: 44).”

Perubahan ini termasuk industri media. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti sebagai perantara sebuah informasi dengan penerima informasi atau media perantara. Media baru secara sederhana adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara khususnya. Salah satu contohnya sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan internet yang di dalamnya ada *social network*, situs-situs web penyedia video dan audio. Bisa juga *handphone* di zaman sekarang ini karena mirip dengan komputer (Rustam Aji, 2016: 44-45).

Kemajuan dan perkembangan teknologi di era globalisasi yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi terjadi begitu pesat. Hal tersebut telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi di dalam suatu organisasi (Astuti, Marlita, Puja dan Dharmadiaksa, Ida, Bagus, 2014: 373).

Sistem informasi akuntansi dianggap sebagai faktor penting dalam pencapaian kinerja yang lebih besar terutama dalam proses pengambilan keputusan (Al-Eqab and Adel, 2013). Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif jika sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timely*), akurat (*accurate*), dan dapat dipercaya (*reliable*) (Widjajanto, 2001) dalam (Astuti, Marlita, Puja dan Dharmadiaksa, Ida, Bagus, 2014: 374).”

“Thompson et al, (1991) dalam Astuti, Marlita, Puja dan Dharmadiaksa, Ida, Bagus (2014: 376) memberikan definisi pemanfaatan dari teknologi merupakan manfaat yang diharapkan oleh individu yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugas. Jurnal (2002) berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi sangat berhubungan dengan perilaku individu dalam menggunakan teknologi tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk diperhatikan agar mampu menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan informatif”

Muzakki dkk, (2016) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengendalian data dan penghasil data. Adanya suatu sistem informasi berbasis teknologi mengacu pada tujuan sistem informasi itu sendiri, keunggulan utama dari sistem informasi

berbasis teknologi adalah sifatnya yang online dan *realtime* laporan dapat dihasilkan langsung dari basis data transaksi sehingga mencerminkan kondisi terkini dari operasional bisnis. Semua transaksi yang tercatat bisa dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*, sehingga dapat ditelusuri dengan mudah (Muzakki dkk, 2016: 171).

Harahap, Dwi, Berlian (2017: 41) mengemukakan bahwa dimensi tentang teknologi informasi ada 2 (dua), yaitu:

- a. Kemudahan merupakan dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Transaksi keuangan dapat dilakukan hanya dengan hitungan menit.
- b. Risiko tidak selalu sesuatu hal yang buruk. Kenyataan risiko bisa mengandung di dalamnya suatu peluang yang sangat besar bagi yang mengelolanya dengan baik. Kepercayaan merupakan kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunanya.

## **EFEKTIVITAS**

Menurut Hasibuan (2019:120) “Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efektif”.

Efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Berbagai literatur konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektifitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif (Shofiana Syam, 2020: 130).

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Shofiana Syam, 2020: 134).

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut H Hermawan (2017:156) yang meliputi :

- 1) Kemampuan Menyesuaikan Diri
- 2) Prestasi Kerja
- 3) Kepuasan Kerja
- 4) Kualitas
- 5) Penilaian Oleh Pihak Luar

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif deskriptif dengan jumlah populasi 43 (empat puluh tiga) orang karyawan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini diperoleh angka-angka yang harus dianalisis. Penelitian deskriptif ini berdasarkan karakteristik dari masalah penelitian merupakan penelitian terhadap masalah yang terjadi saat ini dari suatu populasi. Jenis informasi atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner dalam pengumpulan data primer. Data yang diolah dari pengisian kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Responden penelitian ini adalah seluruh karyawan dan muzaki di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat yang bersangkutan dengan pengumpulan zakat. sampel yang digunakan sampel non probabilitas menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS Versi 25.

## HASIL DAN DISKUSI

### Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Digitalisasi Zakat

Item	Koefisien Korelasi (r)	Signifikansi	Keterangan
X.1	0,812	0,000	Valid
X.2	0,650	0,000	Valid
X.3	0,800	0,000	Valid
X.4	0,840	0,000	Valid
X.5	0,821	0,000	Valid
X.6	0,795	0,000	Valid
X.7	0,843	0,000	Valid
X.8	0,852	0,000	Valid

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji validitas variabel Digitalisasi Zakat (X) dapat diketahui bahwa semua item pernyataan memiliki nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga item X.1 – X.8 dinyatakan valid, sehingga alat ukur yang digunakan sudah dapat mengukur apa yang seharusnya diteliti. Karena variabel Digitalisasi Zakat (X) valid, maka penelitian ini dapat dilanjutkan.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Efektivitas

Item	Koefisien Korelasi (r)	Signifikansi	Keterangan
Y.1	0,789	0,000	Valid
Y.2	0,785	0,000	Valid
Y.3	0,793	0,000	Valid
Y.4	0,844	0,000	Valid
Y.5	0,871	0,000	Valid
Y.6	0,809	0,000	Valid
Y.7	0,714	0,000	Valid
Y.8	0,747	0,000	Valid

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji validitas variabel Efektivitas (Y) dapat diketahui bahwa semua item pernyataan memiliki nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga item Y.1 – Y.8 dinyatakan valid, sehingga alat ukur yang digunakan sudah dapat mengukur apa yang seharusnya diteliti. Karena variabel Efektivitas (Y) valid, maka penelitian ini dapat dilanjutkan.

## 2. Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas (X,Y)

Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Item	Keterangan
X	0,921	8	Reliabel
Y	0,916	8	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrument dengan menggunakan aplikasi statistik IBM SPSS Versi 25 pada tabel 4 di atas, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,301$  pada semua variabel yaitu X dan Y sehingga kedua variabel tersebut sudah dikatakan reliabel, artinya analisis dapat dilanjutkan.

## Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

N	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)
43	.085	.200 <sup>c,d</sup>

Hasil uji Kolmogorov Smirnov di atas menunjukkan nilainya sebesar 0,200 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa data residual telah terdistribusi dengan normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji ini telah konsisten dengan uji sebelumnya.

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	T	Sig
(Constant)	2.292	1.1352	.184
Digitalisasi Zakat	-.025	-.516	.609

Pada tabel 6 uji *Heteroskedastisitas* di atas, nilai signifikan yang diperoleh dari uji tersebut adalah sebesar 0,609 untuk variabel digitalisasi zakat. Nilai yang diperoleh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi dalam uji ini di atas 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

## Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 7 Hasil Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
Constant)	4.048	2.565		1.578	.122
Digitalisasi Zakat	.880	.073	.884	12.122	.000

Dari tabel 7 hasil analisis regresi linear sederhana di atas, diperoleh koefisien variabel efektivitas (Y) sebesar 0,880. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y = a + BX$$

$$Y = 4,048 + 0,880X$$

Dengan

Y = Efektivitas

a = konstanta

b = koefisien variabel digitalisasi zakat

X = Digitalisasi Zakat.

Sehingga dapat diartikan konstanta sebesar 4,408 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 4,408. Koefisien regresi X sebesar 0,880 menyatakan bahwa penambahan 1% digitalisasi, maka nilai partisipasi bertambah 4,408. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi penggunaan digitalisasi zakat maka akan semakin efektif juga pengumpulan zakat di BAZNAS.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.884 <sup>a</sup>	.782	.777	1.94748

Berdasarkan Tabel 8 output SPSS di atas, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,777 atau sebesar 77,7 %. Hal tersebut berarti variabel efektivitas dapat dijelaskan oleh variabel digitalisasi zakat yaitu sebesar 77,7 %. Sedangkan sisanya yang sebanyak 22,3 % ( $100\% - 77,7\% = 22,3\%$ ) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model atau di luar variabel dalam penelitian ini.

### 2. Uji T

Tabel 10 Hasil Uji T

Model	B	T	Sig
(Constant)	4.048	1.578	.122
Digitalisasi Zakat	.880	12.122	,000



Berdasarkan pada tabel 10 di atas diperoleh nilai t hitung (t-test) untuk variabel digitalisasi zakat (X) terhadap variabel efektivitas (Y) bahwa nilai  $T_{hitung}$  sebesar 12,122 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  sedangkan nilai  $T_{tabel}$  1,681 hal ini berarti nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh secara individu (parsial) antara digitalisasi zakat (X) terhadap efektivitas (Y).

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh penggunaan digitalisasi zakat terhadap efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kalbar**

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan regresi linear sederhana dengan melihat nilai Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh digitalisasi zakat terhadap efektivitas pada BAZNAS diperoleh nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  yang dengan demikian bahwa  $H_1$  diterima, artinya terdapat pengaruh positif secara individu (parsial) antara digitalisasi zakat terhadap efektivitas dan pengaruhnya sebesar 0,884 dan t-statistik bernilai positif (12,122).

Dalam penelitian ini Digitalisasi zakat menggunakan aplikasi LinkAja, Transaksi zakat dengan menggunakan LinkAja dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu dalam membayar zakat dan juga dapat dilakukan dengan cepat. Link aja merupakan perangkat sistem internal BAZNAS yang memfasilitasi semua kegiatan BAZNAS, salah satunya mengolah, menyimpan dan membayar zakat. Pendistribusian zakat yang efektif dan tepat dapat dikatakan bahwa kemampuan bekerja demi mencapai hasil yang optimal pada BAZNAS sudah efektif. Semakin efektif lembaga dalam melakukan penghimpunan, maka semakin baik pula tata kelola.

Penelitian ini selaras dengan penelitian (Siti Nur Azizah, 2018) ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula adanya kinerja organisasi zakat tersebut. Hal ini menunjukkan digitalisasi zakat terhadap efektivitas mempengaruhi kinerja BAZNAS. Organisasi zakat bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, di antaranya mampu memberikan pengaruh atau dapat membawa hasil. Penilaian efektivitas penyaluran zakat bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola Baznas telah memenuhi standar kriteria efektif sesuai dengan acuannya sehingga pengelolaannya dapat di pertanggungjawabkan (Bahri & Khumaini, (2020:169).

Partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dilakukan, mengingat tujuan dari adanya efektifnya kinerja BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat, efektivitas dalam pengumpulan zakat BAZNAS berpengaruh terhadap efektivitas karena dari hasil penelitian yang ada bahwa tingkat pencapaian atau banyaknya hasil kerja yang dicapai telah sesuai dengan tingkat ukuran mutu kerja dengan sesuai tujuan BAZNAS. Untuk melakukan transaksi digitalisasi zakat mempermudah muzakki menggunakan aplikasi LinkAja, dapat dilakukan tanpa batas waktu dalam membayar zakat dan juga dapat dilakukan dengan cepat tanpa adanya hambatan dengan efektif dalam membayar zakat. Sehingga, partisipasi masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih mandiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi digitalisasi zakat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas kemampuan bekerja demi mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jawaban setuju dalam kuesioner.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan digitalisasi zakat terhadap efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS yang dilihat dengan hasil pengujian regresi dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan t-statistik bernilai positif (12,122). Peran dalam digitalisasi zakat terhadap tingkat efektivitas dalam pengumpulan zakat BAZNAS berpengaruh terhadap efektivitas karena dari hasil pernyataan yang ada bahwa tingkat pencapaian atau banyaknya hasil kerja yang dicapai telah sesuai dengan tingkat kerja dan tujuan BAZNAS.



## REFERENSI

- Ascarya dan Diana Yumanita.2018. Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Indonesia dan Alternatif Solusinya
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas kinerja keuangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91-112.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Firdaus, M., Beik, I., & Irawan, T. (2012). Economic and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. Islamic Research and Training Institute, -.
- Harjum Muharam & Pusvitasari, 2007. Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia
- Hasibuan, Malayu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hermawan, H. (2017). Pengembangan Destinasi Wisata pada Tingkat Tapak Lahan dengan Pendekatan Analisis SWOT. *Jurnal Parivisata*, 4(2), 64-74.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180-208.
- Muzakki, M. H., Susilo, H., & Yuniarto, S. R. (2016). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. TELKOM Pusat Divisi Regional V Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(2), 169-175.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2018. Outlook Zakat Indonesia: Jakarta Pusat
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2019. Outlook Zakat Indonesia: Jakarta Pusat
- Rustam Aji. 2016. Digitalisasi, Era Tantangan Media. *Islamic Communication Journal*, 01(01), 44-45.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152.

## **Analisis Pengaruh E-Money Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2021**

**Erika Wulandari<sup>1</sup>, Aulia Azimi<sup>2</sup>, Rahmah Yulisa Kalbarini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, [erikawulandari@gmail.com](mailto:erikawulandari@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, [auliaazimi.iain@gmail.com](mailto:auliaazimi.iain@gmail.com)

<sup>3</sup> Dosen Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, [rinalbarini@yahoo.com](mailto:rinalbarini@yahoo.com)

---

**Keywords:**

*E-money,  
Money supply,  
Economic growth.*

**Abstract:** *The use of e-money in 2020-2021 has increased rapidly due to the Covid-19 phenomenon that has occurred. The government has implemented a health protocol policy to limit people's movement to carry out socio-economic activities so that people complete more transactions by using technology-based payment instruments. This study aims to determine the effect of e-money variables and the money supply on economic growth in Indonesia in 2017-2021. The type of data used is time series data with a quarterly pattern. The analysis technique used is Vector Autoregressive (VAR) analysis with the test results showing that the value of e-money transactions and the money supply show a significant influence on economic growth. The positive response shown by these two variables means that it indicates an increase in the velocity of money in Indonesia.*

**Kata Kunci:**

*E-money,  
Jumlah uang beredar,  
Pertumbuhan ekonomi.*

**Abstrak:** Penggunaan *e-money* pada tahun 2020-2021 meningkat pesat diakibatkan oleh fenomena *covid-19* yang terjadi. Pemerintah memberlakukan kebijakan protokol kesehatan guna membatasi gerak masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial-ekonomi sehingga membuat masyarakat lebih banyak menyelesaikan transaksi dengan cara menggunakan alat pembayaran berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *e-money* dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021. Jenis data yang digunakan merupakan data *time series* dengan pola kuartalan. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis *Vector Autoregressive* (VAR) dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai transaksi *e-money* dan jumlah uang beredar menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Respon positif yang ditunjukkan kedua variabel tersebut berarti menunjukkan meningkatnya perputaran uang di Indonesia.

---

**Article History:**

Received: 27-03-2023

Online : 05-04-2023



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license



## A. LATAR BELAKANG

Hadirnya era digital menciptakan beragam inovasi baru tak terkecuali pada kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan setiap harinya oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang lebih efisien dari uang tunai. Perlu diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi, hal itu biasa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan terbilang mahal belum lagi memperhitungkan efisiensi dalam waktu pembayaran. Sementara itu bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang (Bank Indonesia). Kebutuhan masyarakat saat ini sudah mulai dapat diimbangi dengan adanya kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran non tunai yang lebih cepat dan efisien melalui alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) berupa kartu ATM, kartu ATM/Debet, kartu kredit dan alat pembayaran elektronik.

Pada tahun 2014 di Indonesia dibentuk sebuah program Bank Indonesia dengan sebutan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dalam rangka mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih menggunakan instrumen non tunai (*less cash society*) seperti negara lain yang telah sukses terlebih dahulu dengan *less cash society*. Bank Indonesia berharap dengan adanya Gerakan Nasional Non Tunai nantinya akan dapat menyumbang ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data dari perkembangan alat pembayaran non tunai khususnya berbasis kartu dan elektronik di Indonesia dari tahun ke tahun perkembangannya semakin meningkat terutama setelah diadakannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014 di Indonesia. Dari sisi beredarnya dan banyaknya infrastruktur alat pembayaran non tunai berbasis kartu dan elektronik membuat masyarakat dapat semakin mudah untuk mengakses dan memanfaatkan keunggulan dengan bertransaksi menggunakan non tunai dibandingkan dengan uang tunai. Perkembangan instrumen non tunai di Indonesia sendiri sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masyarakat sedikit demi sedikit terbiasa dengan hadirnya non tunai, terlebih dengan pola kebutuhan pribadi dan rumah tangga yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat akan lebih cepat terpenuhi dengan kemudahan dalam bertransaksi secara non tunai. Namun dengan usaha dari Bank Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang sukses dengan *Less Cash Society* bagaimana dengan perkembangan perekonomian di Indonesia jika dilihat dari berkembangnya sistem pembayaran non tunai berbasis kartu tersebut.

**Tabel 1.** Volume Transaksi Melalui *E-Money* di Indonesia Tahun 2017-2021

Periode	Volume Transaksi
2017	1.162.276
2018	3.429.014
2019	7.053.582
2020	15.043.475
2021	82.632.818

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

## Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 195-206

*Bank for International Settlement* (BIS) juga menjelaskan dalam salah satu laporannya bahwa *e-money* merupakan uang giral berbentuk produk *stored-value*. Uang giral merupakan salah satu dari dua jenis uang yang terdapat pada jumlah uang beredar, jenis uang yang lainnya ialah uang kartal. (Sukirno, 2019) menyatakan bahwa jumlah uang beredar ialah semua jenis uang yang berada di tangan masyarakat.

Bank Indonesia sebagai bank sentral menjadikan jumlah uang beredar sebagai salah satu tumpuan untuk mendorong segala aktivitas perekonomian yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Tiwa, Frisyelia. R., Rimate, V. & Tenda, 2016). Lebih lanjut juga dijelaskan untuk menjaga kestabilan perekonomian dengan tingkat kestabilan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, pemerintah mengeluarkan instruksi untuk mempertahankan nilai mata uang agar selalu stabil terhadap mata uang yang lain.

Merujuk pada teori kuantitas uang, persediaan uang dan harga memiliki keterkaitan secara langsung dimana kenaikan jumlah uang Beredar akan diikuti kenaikan harga dengan besaran yang sama. Karena uang diciptakan tidak semata hanya digunakan sebagai alat pembayaran namun juga sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*), sebagai alat satuan hitung (*Unit of Account*), sebagai alat penyimpan nilai (*Store of Value*) dan sebagai alat likuiditas (*Liquidity*) (Mankiw, 2012) maka permintaan terhadap uang akan terus meningkat dan mendorong kenaikan harga.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 mengenai Bank Indonesia bahwa tugas dari Bank Indonesia tersebut pada bidang sistem pembayaran meliputi sistem pembayaran tunai dan non tunai. Jumlah penduduk yang banyak dan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas untuk menyebarkan uang rupiah dan pecahan yang cukup bagi penduduk di berbagai daerah. Pada bidang pembayaran tunai Bank Indonesia harus sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan menyebarkan jumlah uang kertas dan logam secara menyeluruh ditangan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan.

Mulyati dan Ascarya dalam (Safitri, 2021) mengkaji sistem pembayaran non tunai mulai berkembang dengan diawali munculnya instrumen pembayaran bersifat *paper based* seperti cek, bilyet giro, dan warkat lainnya. Semakin perbankan mendorong penggunaan sistem elektronik serta penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu, berangsur-angsur pertumbuhan penggunaan alat pembayaran dalam wujud *paper based* semakin menurun. Apalagi sejak sistem elektronik seperti transfer dan sistem kliring mulai banyak diterapkan.

Perubahan angka jumlah uang beredar berdampak kepada kegiatan perekonomian di sejumlah sektor. Apabila angka jumlah uang beredar terlalu tinggi, maka dikhawatirkan akan terjadi inflasi. Sebaliknya, apabila angka jumlah uang beredar terlalu rendah maka akan mengakibatkan kelesuan perekonomian. Sekiranya hal tersebut berlangsung secara berkepanjangan, maka kualitas kesejahteraan masyarakat akan menurun.

Jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2017-2021 per setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan yang cukup stabil, data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.** Jumlah Uang Beredar di Indonesia pada Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Tahun	M1	M2
2017	1.390.807	5.419.165
2018	1.457.150	5.760.046
2019	1.565.439	6.136.777
2020	1.855.693	6.905.939
2021	2.282.200	7.870.453

Sumber : BPS dan Bank Indonesia (data diolah)

Menurut (Sukirno, 2019) Jumlah uang beredar berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terdapat hubungan jangka panjang yang stabil antara kebijakan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti dalam periode yang sama, jumlah uang beredar akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi artinya semakin meningkat jumlah uang beredar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat. Berdasarkan dengan hipotesa Keynes dalam (Sukirno, 2019) penawaran uang (*Money Supply*) memiliki pengaruh positif terhadap *output* dan pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan mengambil kebijakan (menurunkan) tingkat suku bunga. Kondisi ini mendorong untuk melakukan investasi, yang pada akhirnya akan menciptakan kenaikan *output* dan memicu pertumbuhan ekonomi.

Kestabilan perekonomian suatu negara ialah salah satu hal yang harus diperhatikan karena jika perekonomian suatu negara tidak stabil otomatis akan berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut (Adisasmita, 2013), pertumbuhan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memperoleh penambahan *output*, dengan diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. Menurut Schumpeter dalam (Sukirno, 2019), pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana penggunaan faktor produksi pada proses produksi tanpa adanya perubahan cara dan juga teknologi mengalami peningkatan yang menyebabkan *output* masyarakat juga meningkat.

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu parameter marko-ekonomi yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Terlebih lagi untuk negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi senantiasa menjadi hal yang diprioritaskan guna melihat tingkat perekonomian negara (Seprillina, 2013) Angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
PDB	3.490.728	3.799.214	4.018.606	3.931.330	4.498.045

Sumber: BPS (data telah diolah)

Simon Kuznet dalam (Bonaraja, 2021) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi peningkatan jangka panjang dalam penyediaan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologis. Definisi tersebut memiliki 3 (tiga) komponen penting yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat dan baik.

Menurut (Angelica, 2021) uang elektronik (*e-money*) dan jumlah uang beredar berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, artinya kebijakan moneter memiliki peran yang cukup penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya dalam mengatur kestabilan nilai mata uang. Semakin tinggi volume transaksi menggunakan *e-money* dan jumlah uang beredar maka diduga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

### B. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode ilmiah ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru (Sugiyono, 2014).

Di dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data berupa data sekunder. Data sekunder penelitian ini berupa data *time series* kuartalan pembayaran non tunai diukur dengan nominal transaksi *e-money*, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021 yang diperoleh dari *website* resmi Bank Indonesia yaitu [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), *website* resmi Badan Pusat Statistik yaitu [www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi dan juga teknik kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan ialah Uji *Vector Autoregression (VAR)*, dalam mengolah data sekunder yang telah terkumpul, peneliti menggunakan beberapa alat statistik seperti: program *Microsoft Excel 2007* dan *E-Views 12*. *Microsoft Excel 2007* digunakan untuk pengolahan data menyangkut pembuatan tabel dan analisis. Perangkat lunak *E-Views 12* digunakan untuk pengolahan Uji *Vector Autoregression (VAR)*.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil analisis data

##### a. Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas bertujuan untuk mengetahui apakah data variabel yang diuji stasioner atau tidak. Stasioneritas merupakan konsep penting dalam analisis time series, uji stasioner data time series salah satunya dapat diketahui melalui uji unit root (ADF Test) pada derajat yang sama (level atau *difference*) sehingga akan diperoleh data yang stasioner. Hasil olahan mengenai uji stasioneritas dengan menggunakan *Augemted Dickey Fuller* (ADF) dari setiap data *e-money*, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.** Uji Stasioneritas ADF Pada Tingkat *1<sup>st</sup> Difference*

Variabel	ADF Statistik			
	T-statistic	Critical Values 5%	Prob	Keterangan
<i>E-money</i>	-5.596.861	-3.052.169	0.0004	Stasioner
Jumlah Uang Beredar	-6.850.695	-3.040.391	0.0000	Stasioner
Pertumbuhan Ekonomi	-3.567.839	-3.040.391	0.0179	Stasioner

*Sumber: Data diolah melalui Eviews 12*

Berdasarkan data pada tabel 4.2 dan dengan asumsi yang sama apabila nilai probalitas  $> \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti data tidak stasioner, dan apabila nilai probalitas  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti data stasioner. Dengan keterangan asumsi tersebut maka hasil yang didapatkan ialah variabel penelitian *e-money*, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan stasioner atau signifikan pada uji stasioneritas ADF tingkat *1<sup>st</sup> difference*.

##### b. Penentuan Lag Optimal

Uji lag optimal dalam analisis VAR bertujuan untuk menentukan panjang lag optimal. Dalam menentukan jumlah lag terdapat kriteria informasi yang akan merekomendasikan nilai terkecil dari beberapa metode yakni Final Predicial Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Criterion (SC), dan Hannan-Quinn (HQ). Dari pengujian lag tersebut akan menunjukkan simbol bintang uang ditetapkan sebagai alat ukur untuk penentuan panjang lag. Penentuan panjang lag yang diikuti sertakan dalam penelitian ini adalah mulai dari 0 sampai dengan lag 2, karena data yang di gunakan ialah data kuartalan selama 5 tahun periode 2017 sampai 2021.

**Tabel 5. Uji Lag Optimal**

<b>Metode Pengujian</b>						
<b>Lag</b>	<b>LogL</b>	<b>LR</b>	<b>FPE</b>	<b>AIC</b>	<b>SC</b>	<b>HQ</b>
0	80.62388	NA	2.17e-08	-9.132.222	-8.985184*	-9.117.606
1	85.50680	7.467986	3.62e-08	-8.647.859	-8.059.708	-8.589.395
<b>2</b>	<b>101.0355</b>	<b>18.26909*</b>	<b>1.91e-08*</b>	<b>-9.415944*</b>	<b>-8.386.680</b>	<b>-9.313633*</b>

Sumber: Data diolah melalui Eviews 12

Dari hasil uji lag optimal pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa panjang lag terletak pada lag 2, hal ini dikarenakan untuk menentukan uji panjang lag dilihat dari jumlah bintang terbanyak yang direkomendasikan dari masing-masing metode penentuan panjang uji lag.

**c. Uji Kointegrasi**

Langkah uji yang selanjutnya ialah uji kointegrasi. Uji kointegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Johansen dalam pengujian kointegrasi dimaksud untuk mengetahui hubungan dalam jangka panjang masing-masing variabel. Uji kointegrasi bertujuan untuk melihat apakah residual regresi kointegrasi pada suatu variabel stasioner atau tidak.

**Tabel 6. Uji Kointegrasi**

<b>Hypothesized No. of CE(s)</b>	<b>Eigenvalue</b>	<b>Trace Statistic</b>	<b>0.05 Critical Value</b>	<b>Prob.**</b>
None *	0.922242	59.95120	29.79707	0.0000
At most 1 *	0.690032	19.08469	15.49471	0.0138
At most 2	0.021276	0.344090	3.841466	0.5575

Sumber: Data diolah melalui Eviews 12

Kesimpulan yang diambil ialah berdasarkan atas perbandingan antara *t-statistic* dengan *critical value* pada  $\alpha = 0,05$ , serta dengan melihat nilai probalitas untuk mengetahui apakah ada tidaknya persamaan di dalam sistem yang terkointegrasi.

Dari tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji kointegritas pada taraf 5% (0,05). Nilai *t-statistic* nya lebih besar dari *critical value* ( $59.95120 > 29.79707$ ). Dengan nilai probalitas yang menunjukkan terdapat variabel yang tidak terkointegrasi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model yang paling baik untuk penelitian ini ialah metode VAR.

**d. Uji Kausalitas Granger**

Uji kausalitas ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu setiap variabel memiliki hubungan timbal balik (saling mempengaruhi) atau tidak. Ada atau tidaknya hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas dari masing-masing pengujian kausalitas yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai  $\alpha = 0,05$ . Berikut hasil dari uji kausalitas *granger*:



**Tabel 7.** Uji Kausalitas *Granger*

<b>Null Hypothesis:</b>	<b>Obs</b>	<b>F-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
EMONEY does not Granger Cause JUB JUB does not Granger Cause EMONEY	18	9.42118 0.85398	0.0030 0.4483
EMONEY does not Granger Cause PDB PDB does not Granger Cause EMONEY	18	7.88645 0.71012	0.0057 0.5097
PDB does not Granger Cause JUB JUB does not Granger Cause PDB	18	0.05367 2.31961	0.9480 0.0137

*Sumber: Data diolah melalui Eviews 12*

Berdasarkan hipotesis maka dapat dijelaskan bahwa yang memiliki hubungan timbal balik ialah variabel dengan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan uji kausalitas *granger* pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa tidak semua variabel memiliki hubungan satu dengan yang lain. Gejala kausalitas satu arah ditunjukkan oleh variabel *e-money* kepada jumlah uang beredar dengan nilai probabilitas *f-statistic* nya  $< \text{ taraf nyata } 0,05$  yaitu  $0,0030 < 0,05$ , variabel *e-money* kepada pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitasnya  $0,0057 < 0,05$  dan variabel jumlah uang beredar kepada pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitasnya  $0,0137 < 0,05$ . Sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan adanya hubungan dua arah atau nilai probabilitas *f-statistic* nya  $> \alpha = 0,05$ .

**e. Uji Vector Autoregression (VAR)**

Estimasi uji VAR berlandaskan oleh lag yang sudah ditetapkan pada uji sebelumnya. Pada penelitian ini panjang lag yang digunakan ialah lag 2 yang dimana berdasarkan hasil uji lag optimal, lag 2 memiliki nilai AIC yang terkecil. Hasil estimasi VAR ini sukar di diestimasi sehingga hasil pada uji VAR bukanlah fokus pada analisis penelitian ini. Fokus dari analisis VAR ialah pengujian *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*. Berikut hasil estimasi uji VAR:

**Tabel 9.** Uji Vector Autoregression (VAR)

	<b>D(PDB)</b>	<b>D(EMONEY)</b>	<b>D(JUB)</b>
<b>D(PDB(-1))</b>	-0.089423 (0.18448) [-0.48473]	-0.033470 (0.12971) [-0.25804]	-0.021979 (0.10024) [-0.21928]
<b>D(PDB(-2))</b>	-0.835776 (0.17057) [-4.89994]	-0.106242 (0.11993) [-0.88590]	0.007962 (0.09268) [ 0.08592]
<b>D(EMONEY(-1))</b>	-0.849516 (0.70437) [-1.20607]	-0.474746 (0.49523) [-0.95863]	-0.448107 (0.38271) [-1.17089]

## Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 195-206

	<b>D(PDB)</b>	<b>D(EMONEY)</b>	<b>D(JUB)</b>
<b>D(EMONEY(-2))</b>	1.148486 (0.58591) [ 1.96019]	0.355181 (0.41194) [ 0.86221]	-0.254526 (0.31834) [-0.79953]
<b>D(JUB(-1))</b>	1.183891 (0.54215) [ 2.18369]	0.075647 (0.38118) [ 0.19845]	0.209601 (0.29457) [ 0.71155]
<b>D(JUB(-2))</b>	0.049919 (0.60629) [ 0.08234]	-0.199873 (0.42627) [-0.46888]	-0.286032 (0.32942) [-0.86830]
<b>C</b>	0.007322 (0.03358) [ 0.21804]	0.037973 (0.02361) [ 1.60832]	0.032942 (0.01825) [ 1.80548]
<b>R-squared</b>	0.785509	0.367008	0.224514
<b>Adj. R-squared</b>	<b>0.656814</b>	<b>0.012787</b>	<b>0.240777</b>
<b>Sum sq. Resids</b>	0.043273	0.021391	0.012775
<b>S.E. equation</b>	0.065782	0.046251	0.035742
<b>F-statistic</b>	6.103668	0.966332	0.482524
<b>Log likelihood</b>	26.65234	32.64091	37.02281
<b>Akaike AIC</b>	-2.312.040	-3.016.578	-3.532.095
<b>Schwarz SC</b>	-1.968.952	-2.673.490	-3.189.007
<b>Mean dependent</b>	0.023532	0.032907	0.014688
<b>S.D. dependent</b>	0.112290	0.045958	0.032087

Sumber: Data diolah melalui Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 diatas, untuk menentukan model VAR dimana keputusan yang diambil yaitu dengan melihat hasil *R-squared* untuk model persamaan pertumbuhan ekonomi, *e-money* dan jumlah uang beredar secara berturut-turut ialah 0.656814, 0.012787, dan 0.240777. Artinya lag-lag yang ditentukan pada penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, *e-money* dan jumlah uang berturut-turut sebesar 65,7%, 1,3% dan 24,1%, selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

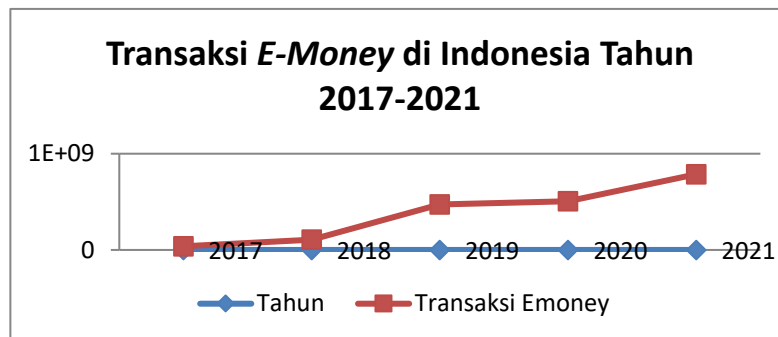
## 2. Pembahasan

### a. Pengaruh *e-money* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Menurut hasil uji kausalitas *granger* yang dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat hubungan satu arah variabel *e-money* terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas variabel *e-money* terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0057 yang dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, artinya hal ini menunjukkan bahwa variabel *e-money* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi *e-money*. Hal ini sesuai dengan penelitian (Mashabi, 2021) dalam jurnal *Analysis Of The Effect of Electronic-Based Payment Systems and Economic Growth in Indonesia* yang mengatakan bahwa sistem pembayaran elektronik atau *e-money* dan kartu debit berpengaruh positif signifikan dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh (Kartika, 2015) yang menganalisis terkait transaksi *e-money* terhadap kecepatan perputaran uang di lima negara ASEAN yaitu Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand dan Philipina dengan menggunakan analisis data panel. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa transaksi *e-money* di lima negara ASEAN tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 yang berarti terdapat *trend* yang positif dalam menggunakan *e-money*. Peningkatan tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk terus berkembang hingga sampailah ke sektor perekonomian

**Gambar 1.** Transaksi *E-Money* di Indonesia Tahun 2017-2021



Gambar di atas menunjukkan perkembangan nominal transaksi *e-money* di Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dapat dilihat bahwa pergerakan volume transaksi meningkat sangat signifikan. Berdasarkan pengalaman beberapa negara, penggunaan *e-money* sebagai alat pembayaran elektronik terbukti telah memberikan manfaat sebagai cara lain dalam melakukan transaksi khususnya transaksi yang bersifat mikro dan ritel (Hidayati, 2006). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak alat pembayaran *e-money* sesuai dengan teori ekonomi Keynesian. Apabila konsumsi masyarakat meningkat maka akan memberikan peningkatan terhadap pendapatan nasional yang secara bersama-sama juga memberikan manfaat efisiensi dan peningkatan sektor riil dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dengan kemudahan bertransaksi menggunakan *e-money* dan tidak adanya batasan penggunaan maka akan mendorong kenaikan konsumsi nasabah, hal ini juga akan mengakibatkan turunnya biaya transaksi serta waktu yang digunakan akan lebih efisien karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sehingga terus menunjukkan peningkatan yang positif diduga lama kelamaan akan mendorong peningkatan perekonomian suatu negara.

### **b. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia**

Menurut hasil uji kausalitas granger yang dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat hubungan satu arah variabel jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas variabel jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0137 yang dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 artinya hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi jumlah uang beredar.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan kesesuaian antara hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh positif dari jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil tersebut sesuai dengan teori Keynes dimana setiap masyarakat memegang uang untuk memenuhi dan melaksanakan transaksi-transaksi yang dilakukan, dan permintaan terhadap uang dari masyarakat untuk bertransaksi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga. Apabila tingkat pendapatan nasional semakin besar maka akan meningkatkan volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan terhadap uang untuk memenuhi tujuan transaksi.

Permintaan terhadap uang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga, apabila jumlah uang beredar meningkat maka Bank Indonesia sebagai bank sentral akan mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga yang akan mendorong para investor untuk melakukan investasi. Saat investasi di Indonesia meningkat maka output yang dihasilkan juga meningkat dan hal inilah yang nantinya akan memicu pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut dibuktikan dengan apabila jumlah uang beredar mengalami peningkatan maka akan membuat pertumbuhan ekonomi juga mengalami hal yang serupa. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar yang akan membuat masyarakat membagi sebagian uangnya dibagian konsumsi sehingga membuat produsen memproduksi lebih banyak barang lalu peningkatan faktor produksi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peristiwa ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tambunan, 2015) dalam jurnal yang berjudul pengaruh jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB Indonesia, dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah uang beredar memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia. Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Mutia, 2019) dalam jurnal tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar terhadap PDB Indonesia tahun 2004-2008 dengan menggunakan metode analisis OLS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari jumlah uang beredar terhadap PDB di Indonesia.

## Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram  
Mataram, 05 April 2023  
ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023  
pp. 195-206

### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh dari hubungan satu arah antara variabel *e-money* terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017-2021. Variabel *e-money* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Terdapat pengaruh dari hubungan satu arah antara variabel jumlah uang beredar terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017-2021. Variabel jumlah uang beredar juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan dalam jangka panjang variabel jumlah uang beredar memberikan pengaruh yang positif dan signifikan antara terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### REFERENSI

- \_\_\_\_\_. (n.d.) *Statistik Sistem Pembayaran*. Jakarta. [www.bi.go.id/](http://www.bi.go.id/)
- Adisasmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*. Rajawali Pers.
- Angelica, P. W. (2021). PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK, JUMLAH UANG BEREDAR, DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper STIE AAS*.
- Bonaraja, P. M. F. R. E. B. D. P. S. A. K. D. D. A. I. F. D. L. N. F. N. R. R. T. N. A. N. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Hidayati, S. D. (2006). *Operasional E-Money* (B. Indonesia (ed.)).
- Kartika, V. T. A. B. N. (2015). Analysis on Electronic Money Transactions on Velocity of Money in ASEAN Countries. *Journal of Business and Management*, 4(9).
- Mankiw, N. . (2012). *Teori Makroekonomi, Terjemahan*. Erlangga.
- Mashabi, M. W. (2021). Analysis Of The Effect Of Electronic-Based Payment Systems and Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1).
- Mutia, K. A. L. I. I. S. N. S. (2019). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA TAHUN 2004-2018. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 1(1).
- Safitri, A. dan A. A. (2021). Pengaruh Pembayaran Non Tunai, Velocity of Money dan Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional SATIESP*.
- Seprillina, L. (2013). Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Periode 1999:1 - 2012:2). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Sugiyono. (2014). *Metode Pendekatan Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Tambunan, S. N. Y. Y. (2015). PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 2(1).
- Tiwa, Frisyelia. R., Rimate, V. & Tenda, A. (2016). Pengaruh Investasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).

## **Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018**

**Fachrurazi<sup>1\*</sup>, Pratiwi Kurniati<sup>2</sup>, Nia Apri Soqdiah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Manajemen Bisnis Syariah, <sup>2</sup>Prodi Akuntansi Syariah<sup>2</sup>, <sup>3</sup>Prodi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

**Abstract:** *This study aims to find out whether budgeting, receiving funds, depositing funds, disbursing funds, bookkeeping, filing and controlling zakat funds at BAZNAS Melawi Provinsi Kalbar Regency have adjusted BAZNAS regulations Number 5 of 2018 concerning Zakat Financial Management. This study used a qualitative descriptive research method which was measured using observation data, interviews and documentation. This research was conducted at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Melawi Provinsi Kalbar Regency. The results of this study indicate that: 1) Zakat budgeting in BAZNAS, Melawi Provinsi Kalbar Regency, the preparation of the budget has not been prepared in the form of an Annual Work Plan and Budget (RKAT). 2) Each receipt of zakat funds in the form of money either through the zakat funds reception counter or electronically must issue proof of deposit. Regarding the distribution of zakat funds, the management explained the purpose for which these funds were allocated, of course these funds were inseparable from the 8 asnaf who were entitled to receive zakat. 3) Zakat funds must be stored in a place that has an adequate security system with a clear person in charge. 4) The issuance of zakat funds at BAZNAS of Melawi Provinsi Kalbar Regency has not been included in the Annual Work Plan and Budget (RKAT), must obtain approval from the authorized official. 5) Bookkeeping BAZNAS for Melawi Provinsi Kalbar Regency records and is recognized according to the amount distributed to mustahik. BAZNAS of Melawi Provinsi Kalbar Regency still manages manual and conventional bookkeeping, 6) Archiving, for proof of the release of the filing budget at BAZNAS of Melawi Provinsi Kalbar Regency there are 3 banks 2 sharia 1 including a conventional bank. 7) The existence of a control system can provide adequate guarantees for the achievement of efficiency and effectiveness of zakat management. So that the purpose of the zakat can be achieved*

**Keywords:** *Budgeting, Receiving Funds, Depositing Funds, Spending Funds, Bookkeeping, Archiving and Controlling*

**Paper type:** *Research paper*

**\*Corresponding author:** *ferry.7co@gmail.com*

Received: 01 November 2022; Accepted: 16 November 2022; Published: Desember 2022

**Cite this document:** Fachrurazi, Kurniati, P., Soqdiah, N.A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 7(2), 113-122

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penganggaran, penerimaan dana, penyimpanan dana, pengeluaran dana, pembukuan, pengarsipan dan pengendalian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sudah menyesuaikan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang di ukur dengan menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penganggaran zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar penyusunan anggarannya belum disusun dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 2) Setiap penerimaan dana zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana zakat maupun melalui elektronik harus diterbitkan bukti setoran. Mengenai pembagian dana zakat, pengurus menjelaskan tujuan diperuntukkannya dana tersebut, tentu saja dana tersebut tidak terlepas dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. 3) Penyimpanan dana zakat wajib disimpan di tempat yang memiliki sistem pengamanan yang memadai dengan penanggung jawab yang jelas. 4) Pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. 5) Pembukuan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar melakukan pencatatan dan diakui sesuai dengan jumlah yang disalurkan kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar pengelolaan pembukuannya masih secara manual dan konvensional, 6) Pengarsipan, untuk bukti keluarnya anggaran pengarsipan di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar ada 3 Bank 2 syariah 1 diantaranya bank konvensional. 7) Dengan adanya sistem pengendalian dapat memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat. Sehingga tujuan dari zakat tersebut dapat tercapai.

**Kata Kunci:** Penganggaran, Penerimaan Dana, Penyimpanan Dana, Pengeluaran Dana, Pembukuan, Pengarsipan dan Pengendalian.

## **Pendahuluan**

Pengelolaan keuangan zakat yang dilakukan secara optimal dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat banyaknya masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada lembaga atau badan amil zakat yang terpercaya.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional serta memiliki laporan keuangan yang terpercaya, peran peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat dapat diterapkan di BAZNAS Kabupaten Melawi. Adapun ketentuan umum yang dimaksud peraturan badan ini yaitu, bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengelolaan keuangan zakat, perlu mengatur mengenai mekanisme pengelolaan keuangan zakat pada pengelola zakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas maka ditetapkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Mengingat adanya peraturan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508), Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317). Maka, mendukung munculnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Lingkup peraturan badan ini terdiri atas penganggaran, penerimaan dana, penyimpanan dana, pengeluaran dana, pembukuan dan pengarsipan, serta pengendalian.

Zakat telah dikenal luas oleh warga suatu negara maupun mancanegara sejak berabad-abad lalu, namun permasalahan disekitar sampai sekarang masih tetap aktual untuk dibahas. Paling pokok dari persoalan itu adalah bagaimana pengelola dan pengolahannya. Dengan adanya persoalan ini bukan berarti masalah kesadaran membayar zakat dengan serta-merta tidak patut dioptimalkan. Sebab jika dihitung secara matematis dalam penerimaan zakat saja, umat islam sebenarnya tidak harus terperosok dilembah kemelaratan jika zakat mampu di kelola dengan baik dari penerimaan maupun pendistribusiannya. Apabila merujuk pada pusat data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di ketahui Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yaitu 217 triliun. Namun, nampaknya potensi zakat yang sangat besar tersebut masih jauh dari cukup. BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum memiliki administrasi yang rapi dan lengkap termasuk laporan keuangan zakat, dikarenakan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Informasi tersebut penulis peroleh dari narasumber Bapak Ali Murtadho (2022) selaku ketua BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar.

Atas dasar dugaan itulah patut dipersoalkan, bagaimana lembaga pengelola dan pengolahannya yang sampai sekarang oleh banyak orang masih dipertanyakan atau belum mendapatkan kepercayaan secara penuh. Walaupun, pemerintah telah membentuk BAZNAS di bawah koordinasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang sebenarnya merupakan langkah maju, namun dalam praktiknya terjadi dua sikap dari pembayaran zakat itu sendiri, yaitu pada satu sisi umat islam telah mengetahui bahwa dalam membayar zakat harus melalui lembaga yang ditunjuk BAZNAS atau melalui BAZNAS langsung. Tetapi pada sisi lain, banyak yang tidak berkenan melalui lembaga ini karena ada semacam keraguan dalam proses pendistribusiannya. Pada faktanya, jika merujuk pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka belum diatur secara komprehensif mengenai standarisasi yang ideal dari proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

Walaupun sikap paradoks diatas cenderung berlebihan, tetapi seharusnya hal itu harus ditangkap sebagai suatu permasalahan yang mendorong tidak efektifnya pengelola dan pengolahan zakat di Kabupaten Melawi. Dalam Al-



Qur'an dinyatakan bahwa lembaga amil zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا اصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ”.*

Sejarah membuktikan di masa Abu Bakar para muazzaki pernah mogok enggan menyerahkan zakat kepada lembaga bentukan khalifah, hanya lantaran ketidakpercayaan terhadap do'a amilin. Pada sisi lain, ada harapan bahwa masalah ini harus diselesaikan lebih serius lagi, mengingat bagi umat islam zakat merupakan sumber dana pemberdayaan umat yang sangat strategis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan zakat terhadap administrasi BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar yang berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif (prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati). (Muhammad Rijal Fadli:2021)

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu ditentukan berdasarkan batasan dari kasus, seperti seorang individu, beberapa individu, sekelompok, sebuah program atau sebuah kegiatan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Zakat BAZNAS Kabupaten Melawi. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung dari pada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang. Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara dan analisis dokumen.

### **Hasil dan Pembahasan**

Peneliti menemukan beberapa program dan proses penganggaran, penerimaan dana, penyimpanan dana, pengeluaran dana, pembukuan, pengarsipan dan pengendalian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum menerapkan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. Namun proses pengelolaan zakat sudah berjalan dengan baik, produktif dan konsumtif.

## **Penganggaran**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar merupakan salah satu lembaga Amil Zakat yang berada di Kota Nanga Pinoh. Sebagai lembaga amil zakat yang mengelola dana amanah umat, BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan untuk mendukung kinerja yang telah dibuat mulai dari pengumpulan dana zakat dan pendistribusian sampai dengan operasional untuk mencapai tujuan lembaga. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu melalui penganggaran, karena dengan penganggaran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar dapat merencanakan pengalokasian dana jangka pendek yang dibutuhkan serta dapat melakukan pengendalian keuangan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena penganggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah dibuat. Sehingga perlu upaya mengembangkan efisiensi dan keefektifan proses penganggaran serta pengalokasian penganggaran BAZNAS Kabupaten Melawi.

Namun demikian pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar seharusnya melakukan penyusunan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih banyak kendala dalam melakukan penganggaran serta keterbatasan pengelolaan sehingga BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum menerapkan penyusunan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Sedangkan posisi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar penyusunannya masih mengikuti laporan keuangan masjid masih manual dan otodidak. Karna keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya jadi BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum menerapkan sistem Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang sesuai dengan isi peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018.

## **Penerimaan Dana**

Zakat adalah salah satu pranata keagamaan (Islam) yang sejatinya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat dibayar oleh mereka yang mampu dan mempunyai hasil sesuai takaran yang telah ditentukan agama (Islam). Potensi zakat di Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sangat besar, baik dari zakat harta maupun zakat fitrah. Setiap menjelang lebaran, umat Islam yang memenuhi syarat membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerima, lazim disebut mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sebagai lembaga resmi yang di bentuk oleh pemerintah, memiliki hak dan kewenangan mengelola dana zakat dari masyarakat muslim di Kabupaten Melawi. BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar menerima dana zakat melalui

perantaraan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Melawi. Tidak ada penerimaan dana secara online seperti transfer melalui ATM. Bukti-bukti diserahkan melalui via whatsApp, sms, telpon dan dokumentasi hasil kegiatan.

### **Penyimpanan Dana**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lembaga yang dibentuk pemerintah selaku amil zakat untuk menangani masalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah tentunya memiliki peran yang sangat penting sebagai amil zakat yang penuh dengan tanggungjawab, bijaksana dan dapat dipercaya. Dalam hal ini penyimpanan dana zakat harus disimpan sebaik mungkin. Umumnya dana zakat yang terkumpul dalam Lembaga zakat harus dijaga dengan amanah oleh manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada mustahik.

Namun BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sejauh ini belum pernah menerima dana zakat secara langsung. Dengan sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, Sehingga tidak ada metode penyimpanan khusus. Sebab kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempengaruhi kinerja pengurus sehingga tugas dan fungsinya belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena memang banyaknya kendala di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar jadi kepengurusan yang aktif hanya dua orang saja dari 5 orang pengurus yaitu ketua BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar dan wakil ketua III dibidang keuangan dan pelaporan. Oleh karena itu, penyimpanan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar memang belum memiliki penyimpanan yang khusus seperti yang tercantum di peraturan Baznas Nomor 5 Tahun 2018 bahwa penyimpanan dana seharusnya disimpan ditempat yang memiliki sistem pengamanan yang memadai dengan penanggung jawab yang jelas.

### **Pengeluaran Dana**

Pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Karena BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar hanya menerima laporan dalam bentuk via whatsApp, sms, telpon dan dokumentasi melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid masing-masing Desa atau Kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi. Setelah diterima oleh panitia di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan barulah dana tersebut didistribusikan kepada mustahik sesuai kriteria 8 asnaf penerimaan zakat. Berikut ini 8 asnaf yang berhak menerima dana zakat. Orang Fakir, Orang Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah, Ibnu Sabil.

Kemudian panitia di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan memberikan laporan pendistribusian dana zakat tersebut dengan cara mengkonfirmasi via whatsApp, sms, telfon dan dokumentasi sebagai bukti kegiatan tersebut. Jadi tidak ada laporan tertulis. Seperti yang sudah

disampaikan sebelumnya bahwa BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar tidak ada membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), karena pengumpulan dan penyaluran dana zakat sudah dilaksanakan secara langsung oleh panitia Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid masing-masing Desa atau Kecamatan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum memiliki administrasi yang rapi dan lengkap termasuk laporan keuangan zakat, sehingga sistem pengeluaran dana zakat belum sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar merekapitulasi hasil pendistribusian dana yang sudah dikumpulkan melalui laporan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan yang mana laporannya melalui via whatsApp, sms, telpon dan dokumentasi hasil kegiatan.

### **Pembukuan dan Pengarsipan Dana**

BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih memiliki banyak kendala seperti halnya pembukuan dan pengarsipan dana yang di Kelola. Pengelolaan sistem pembukuan di BAZNAS sebenarnya ada dua. Ada yang namanya PSAK 103 dan Simba. Tetapi khusus di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar pengelolaan pembukuannya masih secara manual dan konvensional, kemudian belum mengikuti standar peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Sistem pembukuan dan pengarsipan dana di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih menggunakan sistem seperti laporan keuangan masjid. *BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih memiliki banyak kendala seperti halnya pembukuan. Pengelolaan sistem pembukuan di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sebenarnya ada dua. Ada yang namanya PSAK 103 dan Simba. Tetapi khusus di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar pengelolaan pembukuannya masih secara manual dan konvensional, kemudian belum menyesuaikan standar peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. Sistem pembukuan dan pengarsipan dana BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar masih menggunakan sistem seperti laporan keuangan masjid.*

Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang memiliki tugas pokok masing-masing. Pada bagian keuangan dan pelaporan menjadi tugas pokok wakil ketua III. Karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembukuan di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum dilaksanakan berdasarkan format dan ketentuan dalam peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Dengan demikian pengarsipan laporan (pembukuan) pengelolaan keuangan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa Pembukuan dan

Pengarsipan hanya sebatas catatan kas masuk dan keluar zakat. Adapun rekapan dana tersebut di peroleh dari Masjid masing-masing desa di Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar.

### **Pengelolaan Sistem Pengendalian Dana**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat tidak hanya sekedar sebagai kewajiban, akan tetapi zakat juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Dengan pengelolaan yang baik zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana potensi yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan zakat memerlukan sebuah sistem pengendalian. Dengan adanya sistem pengendalian dapat memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat. Sehingga tujuan dari zakat tersebut dapat tercapai.

Pengendalian di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum tersusun dengan baik. Ada lima orang komisioner memiliki proposi masing-masing. Namun petugas BAZNAS yang aktif hanya dua orang saja yaitu ketua 1 (Ketua Umum) dan ketua III (bagian keuangan dan pelaporan) seharusnya disini Ketua umum dibantu oleh empat ketua. Yaitu ketua 1 (bidang pengumpulan), ketua II (bidang pendistribusian) ketua III (bidang keuangan dan pelaporan) dan ketua IV (bidang administrasi, SDM, dan umum). Keempat wakil ketua belum melakukan porsi masing-masing. Hanya dua petugas kepengurusan BAZNAS yang melakukan tugasnya dan menghendel semua. Namun pengendalian yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar tidak sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. Pengendaliannya hanya berbentuk arahan kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan. Tidak ada bukti-bukti kuitansi karena di Melawi Provinsi Kalbar penerimaan dana zakat untuk di Desa atau Kecamatan ada yang berbentuk uang dan beras sesuai yang di peroleh dari masyarakat. Jadi pengendaliannya hanya berbentuk arahan saja dan peran sistem Akuntansi dalam hal ini belum di aplikasikan pada BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar karena pengendalian dana kelola masih dilakukan secara manual.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis pengelolaan keuangan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar dalam pengelolaan keuangan zakat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penganggaran, dan Penerimaan Dana di BAZNAS Kabupaten Melawi. Pengelolaan penyusunan anggaran BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum melakukan penyusunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Kemudian Setiap penerimaan dana zakat pengurus BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar tidak menerima dana secara langsung, namun sistem yang digunakan melalui panitia Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid

masing-masing Desa atau Kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi. Jadi tidak ada penerimaan dana baik secara online (transfer) maupun tunai.

Penyimpanan Dana dan Pengeluaran Dana di BAZNAS Kabupaten Melawi. Pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) karena pengumpulan dan penyaluran dana zakat sudah dilaksanakan secara langsung oleh panitia Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid masing-masing Desa atau Kecamatan. BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum memiliki administrasi yang rapi dan lengkap termasuk laporan keuangan zakat, sehingga sistem pengeluaran dana zakat belum sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018.

Pembukuan dan Pengarsipan Dana yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Melawi. Berdasarkan data yang telah saya dapatkan disimpulkan bahwa pembukuan di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum dilaksanakan berdasarkan format dan ketentuan dalam peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Dengan demikian pengarsipan laporan (pembukuan) pengelolaan keuangan belum dapat dilaksanakan dengan baik, karna keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh kepada kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengelolaan Sistem Pengendalian Dana oleh BAZNAS di Kabupaten Melawi. Pengendalian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar hanya berbentuk arahan kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid masing-masing Desa atau Kecamatan dan peran sistem Akuntansi dalam hal ini belum di aplikasikan pada BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar karena pengendalian dana kelola masih dilakukan secara manual.

## Referensi

- A Diem, A. B. M. B. M. (2018). Peranan BAZNAS Dan Sistem Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kelompok Bina Zakat (KBZ) Di Kabupaten Oku Timur. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2).
- Amrullah, Arif Rijal, 2021. Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7(2)
- Fachrurazi, Eko Bahtiar, 2020. *Strategi Baitul Maal Wat Tamwil*. Pontianak : IAIN Pontianak Press
- Fachrurazi, Ihsan dkk, 2019. Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui Pengelola Dana Humailah, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. 21(1)
- Ii Sumantri, 2020. Administrasi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal At-Tamwil*. 2(1)
- Muhammad Rijal Fadli, 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. 12(1)

- Qomariyah, Muhammad. 2020. Tata Kelola Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X. *Journal of Islamic Accounting Research* 4(1)
- Sayyid Sabiq, 2016. *Fiqih Sunnah (Jilid 1)*. Surakarta : Insan Kamil.
- Sutantri, 2020. Analisa Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri.
- Umat Di Masjid Kapal Munzalan Mubarakah. *Jurnal Of Islamic Economics*. 1(1)

## Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS untuk periode tahun 2013 hingga 2017

Hani Meilita Purnama Subardi

IAIN Pontianak

[hanimeilita@gmail.com](mailto:hanimeilita@gmail.com)

### ABSTRAK

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari pengelolaan dana zakat yang telah dihimpun dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional pada periode 2013 hingga 2017.

**Desain / metodologi / pendekatan:** Analisis pada tingkat efisiensi ini diolah menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan produksi. Variabel Output yang digunakan meliputi dana terhimpun dan dana tersalurkan. Sedangkan variabel input yang digunakan adalah Biaya Personalia, Biaya Operasional dan Biaya Sosialisasi.

**Temuan Penelitian:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 BAZNAS sempat mengalami inefisiensi pada tahun 2013 sebesar 84,73% dan pada tahun tahun 2015 sebesar 75,14%.

**Kontribusi Teoretis / Orisinalitas:** Kontribusi penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi bagi Badan Pengelola Zakat dalam hal mengelola dana dan mentaur strategi dalam penghimpunan dan penyaluran dana lebih baik lagi.

**Keterbatasan dan implikasi penelitian:** Penelitian ini masih terbatas pada analisis tingkat efisiensi pada pengelolaan dana zakat. Sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang telah dikelola.

**Kata kunci:** Efisiensi, Badan Pengelola Zakat, *Data Envelopment Analysis*.

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu diantara lima pilar rukun islam yang menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim dengan cara menghibahkan sejumlah harta yang sudah mencapai nisab dan haul dengan mekanisme dan persyaratan tertentu yang akan diberikan kepada penerima manfaat untuk mencapai pada *maqashid syariah* yakni menjamin tercapainya keadilan sosial ekonomi (Razimi dkk, 2016). Menurut *fiqh al-zakat* salah satu manfaat sosial yang melekat pada zakat yakni adanya distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil sehingga tujuan jangka panjang dari zakat ini untuk meningkatkan status sosial ataupun taraf hidup para penerima manfaat (*mustabiq*) sehingga lebih sejahtera. Dengan tujuan tersebut memperlihatkan bahwa urgensi zakat bukan hanya dapat memperbaiki perekonomian penerima zakat, namun juga sebagai alat dalam peningkatan ekonomi nasional.

Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Staistik dan Bank Dunia pada tahun 2018 tentang Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:**

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kemiskinan Relatif</b> (% dari populasi)	11.5	11.0	11.2	10.7	10.1
<b>Kemiskinan Absolut</b> (dalam jutaan)	28.6	27.7	28.5	27.8	26.6
<b>Koefisien Gini/ Rasio Gini</b>	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39

**Gambar 1.1 Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia**

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kemiskinan relatif yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 10,1% atau sebesar 26,6 juta jiwa penduduk. Sedangkan pada koefisien gini di tahun yang sama sebesar 0,39 (BPS,2018). Hasil ini menunjukkan sebesar 45,1% aset nasional dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan dalam pendistribusian kesejahteraan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi umat muslim terbesar di dunia, idelanya dapat menghidupkan dan mengembangkan lembaga pengelola zakat dalam perekonomian Indonesia. Terdapat harapan besar pada institusi zakat agar dapat menjadi faktor penunjang dalam mengurangi tingkat kesenjangan sosial serta dapat menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya organisasi pengelola zakat diharapkan juga mampu melayani para pemberi dan penerima zakat secara efisien dan efektif (BAZNAS,2016).

Terdapat berbagai penelitian terkait potensi dan pengelolaan dana zakat diantaranya yakni pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia, menunjukkan proyeksi potensi dana zakat yang mencapai 12,7 triliun. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS bekerja sama dengan IPB pada tahun 2011 yang berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara proyeksi dana zakat yang terhimpun sebesar Rp217 triliun namun yang terjadi di lapangan, dana yang terhimpun hanya sebesar 1% dari potensi zakat yang sebenarnya.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup besar antara potensi penghimpunan dana zakat dan realisasi dana yang terhimpun. Data teraktual dari BAZNAS menunjukkan pada tahun 2015 total secara kumulatif untuk dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf pada skala nasional hanya terkumpul sebesar Rp 3,7 triliun atau dapat dikatakan kurang dari 1,3 persen dari proyeksinya. Hasil dari data yang telah dihimpun dan diolah oleh BAZNAS memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 realisasi penerimaan zakat di Indonesia sebesar 3,2 triliun (Sitorus, 2015) sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan dalam jumlah penghimpunan dana zakat yakni dari Rp3.65 triliun menjadi Rp5 triliun.

Di tahun 2016 tingkat daya serap pengelolaan dana zakat sebesar 58,42% yang mana secara kumulatif total penghimpunan dana mencapai Rp5.017.293.126.950 dengan total pendistribusian sebesar Rp2.931.156.809.405. selanjutnya adana yang masih tersisa pada tahun tersebut yang belum tersalurkan, akan didistribusikan pada tahun selanjutnya. Kualitas penyaluran zakat ini perlu untuk terus ditingkatkan menuju nilai efektif (>70-90%) dan sangat efektif (>90%) melalui peningkatan kapasitas penyaluran zakat OPZ baik dengan berbagai kegiatan yang memiliki sifat konsumtif dalam

jangka waktu yang pendek, maupun melalui program-program produktif, memberdayakan dan memiliki dampak jangka panjang.

Organisasi saat ini menghadapi tantangan yang membutuhkan keputusan manajemen yang efektif yang akan mencapai tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi (Wahab, 2013). Pada penelitian ini, tingkat efisiensi badan pengelola zakat akan ditinjau sebagai salah satu dari alat penilaian kinerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS untuk periode tahun 2013 hingga 2017.

## TINJAUAN PUSTAKA

### ***Shariah Enterprise Theory (SET)***

*Shariah enterprise theory* merupakan sebuah teori yang mengakui tentang konsep hubungan secara vertical maupun horizontal. Dimana pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di muka bumi ini mencakup hubungan secara vertikal yakni kepada Allah Swt selaku pencipta dan juga secara horizontal yakni dengan sesama makhluk dan lingkungan sekitar. Itu artinya pemaknaan konsep akunabilitas dalam penelitian ini menekankan pada sistem pengelolaan akuntansi zakat yang merupakan amanah dari Allah yang harus dijalankan sesuai dengan kejujuran berniat, kejujuran lahiriah serta kejujuran batiniah (Triyuwono, 2006).

*Syariah enterprise theory* melihat bahwa pengumpulan dana ZIS yang dilakukan tidak serta merta dilihat dari aspek fisiknya melainkan dari niat dalam hati, dan rasa ikhlas karena memberikan pelayanan. Hal ini di dalam *syariah enterprise theory*, Allah merupakan sumber amanah yang paling utama (Meutia, 2010). Keamanan ini diwujudkan karena bentuk transparansi (keterbukaan) merupakan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

### **Efisiensi**

Efisiensi di dalam ekonomi adalah ketika semua barang dan faktor produksi dalam suatu aktivitas ekonomi dapat didistribusikan ataupun dialokasikan secara tepat dan minim pemborosan. Menurut Karim (2011) efisien artinya melakukan sesuatu secara tepat atau dapat dikatakan usaha dalam melakukan berbagai hal secara tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Efisiensi dalam kacamata produksi berada dalam cakupan teknis dan operasional, yakni mengubah input menjadi output. Adapun berdasarkan sisi ekonomi, efisiensi merupakan pengalokasian sumberdaya di dalam perekonomian yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Sukirno, 2015).

### **Zakat**

Berdasarkan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menjelaskan bahwa Zakat merupakan harta yang wajib diberikan oleh *muṣakki* berdasarkan aturan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Adapun menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengartikan zakat sebagai harta yang hukumnya wajib diserahkan oleh umat muslimm atau badan usaha untuk diberikan kepada kelompok yang berhak mendapatkannya sesuai dengan aturan hukum islam yang berlaku.

Dari aspek sosial dan ekonomi, tujuan yang mendasari zakat yakni untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin melalui sistem distribusi zakat yang tepat dan menyeluruh diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi (Qardawi, 2004).

### **Data Envelopment Analysis (DEA)**

*Data envelopment analysis* merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan efisiensi unit organisasi homogen yang disebut dengan DMU (*Decision Making Unit*) yang menggunakan input yang sama untuk menghasilkan output yang sama. DEA mengambil nilai input dan output yang diamati untuk membentuk ruang kemungkinan produksi yang dibandingkan dengan masing-masing unit untuk menentukan efisiensinya.

Metode DEA ini cocok diterapkan ke lembaga zakat karena berhasil digunakan sebagai indikator efisiensi sektor organisasi nirlaba dan publik. Kemudian, Norazlina & Abdul Rahim (2013) menilai pertumbuhan produktivitas lembaga zakat dengan menggunakan *variabel return to scale* (VRS) dan menemukan bahwa sebagian besar lembaga zakat beroperasi di non-CRS (*Constant Return Scale*). Dengan demikian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak perbaikan oleh lembaga zakat untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

### **Gap Pada Penelitian Tingkat Efisiensi pada Badan Pengelola Zakat**

Penelitian tentang analisis tingkat efisiensi pada lembaga zakat di Indonesia berawal dari Nasher Akbar (2009) yang berjudul Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan *data envelopment analysis* dengan menggunakan variabel output dana tersalurkan, dana terhimpun serta variabel input Biaya operasional, biaya sosialisasi dan operasional. Hasil studi menunjukkan efisiensi OPZ pada tahun 2005 masih lebih baik dari tahun 2006 dan 2007 dengan skor *overall* 71,27%. Penyebab utama inefisiensi pada tahun 2006 dan 2007 adalah tidak optimalnya dana tersalurkan dan dana terhimpun. Selanjutnya Selanjutnya, Wahyuni (2016) meneliti terkait efisiensi organisasi pengelola zakat nasional dengan metode *data envelopment analysis* dengan variabel input biaya personalia, biaya operasional, biaya sosialisasi ziswaf dan variabel output dana ziswaf yang disalurkan, aktiva tetap, aktiva lancar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada OPZ Nasional menggunakan pendekatan intermediasi memperlihatkan kinerja yang efisien pada BAZNAS, Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Adapun inefisiensi ditunjukkan pada kinerja BAZNAS dan Dompot Duafa pada variabel biaya operasional, biaya personalia, biaya sosialisasi ziswaf dan dana ziswaf yang disalurkan.

Al-ayubi et. al (2018) meneliti tingkat efisiensi lembaga zakat dengan judul, *Examining the Efficiency of Zakat Management: Indonesian Zakat Institutions Experiences*. Dengan variabel yang lebih bervariasi yakni jumlah amil, jumlah sukarelawan, biaya personalia, biaya operasional, biaya sosialisasi, jumlah kantor sebagai variabel input dan jumlah zakat yang dihimpun, jumlah distribusi zakat, jumlah *mustahiq*, jumlah *muzakki*, jumlah distribusi zakat yang produktif sebagai variabel output. Penelitian yang menggunakan DEA ini menghasilkan tingkat efisiensi lembaga zakat pada tahun 2011-2013 mengalami peningkatan namun kemudian menurun pada tahun 2014-2016. Efisiensi IZI mengalami kenaikan selama 2011-2012 kemudian sedikit menurun pada 2013. Meskipun efisiensi meningkat di tahun 2014-2015 namun terjadi penurunan pada tahun 2016. Setelah periode fluktuasi selama 2011-2013, efisiensi skala IZI menurun pada tahun 2014 dan stabil pada tahun 2015-2016.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode dan Objek Penelitian**

Metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah metode yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka. Tahapan pengolahan yang dimulai dengan pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Data yang

digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan BAZNAS yang mempublikasikan laporan tahunannya melalui laman resminya selama periode 2013 hingga 2017.

### Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yakni variabel input dan output dengan menggunakan pendekatan produksi. Dimana variabel input yang digunakan adalah Biaya Personalia, Biaya Sosialisasi dan Biaya Operasional lainnya. Adapun variabel output yang digunakan pada penelitian ini yakni dana terhimpun dan dana tersalurkan. Data operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel Input</b>	<b>Definisi</b>	<b>Sumber Data</b>
Input 1 ( $X_1$ )	Biaya Personalia	Laporan Perubahan Dana Amil
Input 2 ( $X_2$ )	Biaya Sosialisasi	Laporan Perubahan Dana Amil
Input 3 ( $X_3$ )	Biaya Operasional Lainnya	Laporan Perubahan Dana Amil
<b>Variabel Output</b>	<b>Definisi</b>	<b>Sumber Data</b>
Output 1 ( $Y_1$ )	Dana Terhimpun	Laporan Perubahan Dana
Output 2 ( $Y_2$ )	Dana Tersalurkan	Laporan Perubahan Dana

Sumber : Data Olahan, 2018

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mukhtakhir (Sekaran, 2017). Data sekunder bisa saja dari data internal amupun eksternal organisasi yang dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi seperti laporan keunagan dan lain-lain.

### Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang diambil pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional secara konsisten dari tahun 2013 hingga tahun 2017 di situs resminya. Selain itu juga dilakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa jurnal, buku, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengukur efisiensi dalam penelitian ini adalah *Data Envelopment Analysis*. DEA dipilih karena telah distandarisasi sebagai alat untuk mengukur kinerja dan efisiensi suatu unit. Seluruh variabel input dan output menggunakan *Software Warwick* DEA, sehingga diperoleh tingkat efisiensi setiap Organisasi Pengelola Zakat dari pendekatan produksi. Efisiensi ditunjukkan dengan skor 100% yang berarti efisien dan kurang dari 100% menunjukkan adanya inefisiensi. Dapat dilihat pula variabel apa saja yang kurang efisien dalam pengelolaannya,

sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang bersangkutan dalam mengambil keputusan. Secara matematis formulasi DEA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Es = \frac{\sum_{i=1}^m U_i Y_{is}}{\sum_{j=1}^n V_j X_{js}}$$

Keterangan :

Es = Efisiensi BPZ s

M = Output BPZ s yang diamati

N = Input BPZ s yang diamati

Y<sub>is</sub> = Jumlah Output ke i yang dihasilkan

X<sub>js</sub> = Jumlah input ke j yang digunakan

U<sub>i</sub> = s x 1 jumlah bobot output

V<sub>j</sub> = s x 1 jumlah bobot input

## HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menggunakan alat analisis DEA dengan menggunakan *Software Warwick* DEA. Pengukuran efisiensi pada Badan Pengelola Zakat didasarkan pada orientasi output. Tujuan pemilihan orientasi output karena untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Badan Pengelola Zakat dalam menghimpun dana Zakat dan menyalurkannya dengan sejumlah input tertentu. Pendekatan output dirasa lebih tepat digunakan untuk Badan Pengelola Zakat sebagai alat evaluasi bagi amilin dalam mengukur kinerja mereka dalam hal penghimpunan dan penyaluran serta dapat menentukan prioritas variabel yang harus ditingkatkan dari sisi output.

Skor efisiensi yang digunakan antara 0 dan 100% dengan tingkat efisiensi yang sempurna ketika mencapai 100%. Sebuah organisasi pengelola zakat dapat dikatakan efisien bila nilainya semakin mendekati dan mencapai angka 100%. Pencapaian angka 100% menunjukkan OPZ beroperasi pada ukuran skala terbaik. Semakin ia menjauh dari angka 100% maka semakin tidak efisien atau masih terdapat inefisiensi skala yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Terdapat tiga kondisi dalam hasil perhitungan DEA yang ditunjukkan pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Kondisi Efisiensi Hasil Perhitungan DEA**

NO.	Range Condition	Score (%)	Efisiensi	Keterangan
1.	<i>Range Red</i>	0-89,99	Tidak Efisien	Kondisi Proyek beresiko karena jauh dari score yang ingin dicapai sehingga perlu adanya tindakan manajemen.
2.	<i>Range Amber</i>	90-99,99	Tidak Efisien	Kondisi proyek mungkin beresiko jika permasalahan yang ada tidak segera ditangani, sehingga memerlukan perhatian khusus.
3.	<i>Range Green</i>	100	Efisien	Kondisi proyek aman terdapat score yang sesuai dengan harapan.

Sumber : Santoso, 2010

**Tingkat Efisiensi BAZNAS tahun 2013-2017**

**Tabel 1.3**  
**Hasil Perhitungan Efisiensi DEA BAZNAS Periode 2013 – 2017**

No.	Tahun	<i>Efficiency</i> %	<i>Condition</i>
1.	2013	84,73%	<i>Red</i>
2.	2014	100,00%	<i>Green</i>
3.	2015	75,14%	<i>Red</i>
4.	2016	100,00%	<i>Green</i>
5.	2017	100,00%	<i>Green</i>

*Sumber : data diolah*

**Tabel 1.4**  
**Dana Terhimpun, Dana Tersalurkan,  
 Total Biaya dan Perhitungan Rasio BAZNAS Periode 2013 – 2017**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Dana Terhimpun	Rp69.210.804.676	Rp94.047.882.590	Rp112.055.384.724	Rp142.927.009.265	Rp213.296.280.009
Dana Tersalurkan	Rp45.068.566.496	Rp64.265.141.159	Rp66.766.033.369	Rp67.727.019.807	Rp118.071.046.770
Total Biaya	Rp8.622.560.606	Rp8.673.572.688	Rp11.413.022.487	Rp12.569.771.789	Rp17.691.061.692
Rasio : Total Biaya Dana Terhimpun	0,12	0,09	0,10	0,09	0,08

*Sumber : data diolah*

Pada tabel di atas memperlihatkan hasil pengukuran efisiensi dengan menggunakan *data envelopment analysis* untuk Badan Amil Zakat Nasional pada periode 2013 hingga 2017. Dapat terlihat bahwa tingkat efisiensi yang terjadi pada BAZNAS terjadi sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 2014, 2016 dan 2017. Adapun pada tahun 2013 dan 2015 terjadi inefisiensi pada BAZNAS sebesar 84,73% dan 75,14%.

Penyebab terjadinya inefisiensi pada BAZNAS yang terjadi tahun 2013 disebabkan diantaranya sebagai berikut :

1. Rasio total biaya terhadap dana terhimpun pada tahun 2013 sebesar 0,12 yang mana artinya dari jumlah dana yang terhimpun sebesar Rp69.210.804.676 pada tahun tersebut, terdapat 12% dana yang digunakan oleh pihak amil dalam mendanai kegiatan zakat atau setara dengan Rp8.622.560.606. dari jumlah biaya tersebut, terdapat pengeluaran untuk keperluan operasional seperti Biaya Perjalanan Dinas dan Beban Umum Administrasi yang totalnya mencapai Rp2.033.212.532. nominal ini cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2014 biaya operasional yang digunakan oleh BAZNAS hanya sebesar Rp1.368.064 atau 33% lebih rendah dari tahun sebelumnya.
2. Dengan perolehan persentase biaya yang mendekati ambang batas bagian yang berhak diambil oleh amil tersebut, penyaluran dana zakat yang terjadi pada tahun 2013 hanya sebesar 65%. Sedangkan pada tahun 2014 dengan rasio total biaya terhadap dana terhimpun sebesar 9%, para amil dapat menyalurkan dana zakat sebesar 68% dari dana terhimpun.



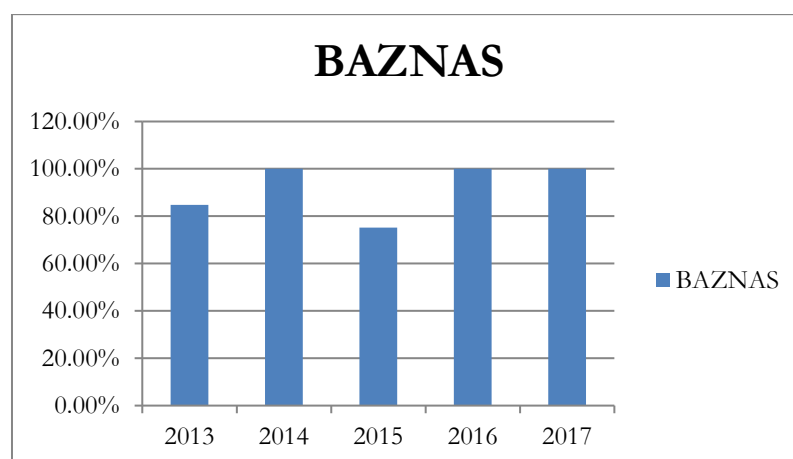
3. Pada tahun 2013, terdapat kenaikan pada belanja pegawai hingga 115%. Dari semula sebesar Rp2.808.333.411 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp6.030.097.807 pada tahun 2013. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penambahan jumlah amil atau peningkatan pada kompensasi yang diberikan seiring dengan upaya Baznas dalam peningkatan kesejahteraan amil.
4. Selanjutnya jika dibandingkan dengan tahun 2012, kenaikan pada biaya perjalanan dinas juga terjadi sebesar 72% dari semula sebesar Rp310.749.622 menjadi sebesar Rp744.636.038. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada Biaya Umum dan administrasi sebesar 142% dari yang semula sebesar Rp578.991.668 menjadi Rp1.398.639.627. Kenaikan pada biaya perjalanan dinas saat itu dikarenakan adanya kunjungan BAZNAS pusat ke beberapa kota untuk melakukan koordinasi dengan BAZNAS tingkat provinsi. Sedangkan kenaikan pada Biaya Umum dan Admisitrasi disebabkan oleh pengembangan pada sarana operasional yang membantu amil agar lebih efisien dalam urusan operasional kantor.

Selanjutnya, inefisiensi terjadi pada tahun 2015, dengan presentase efisiensi sebesar 75,14% yang mana penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015, rasio total biaya terhadap dana terhimpun sebesar 10% yang artinya dari total dana yang terhimpun sebesar Rp112.055.384.724, para pengurus zakat atau pihak amil menggunakan biaya sebesar Rp11.413.022 untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan zakat. Meskipun hasil pada rasio di tahun 2015 tidak sebesar di tahun 2013, namun dapat dilihat bahwa terdapat dua item biaya yang memiliki lonjakan terbesar yakni biaya operasional sebesar Rp3.231.368.402 dan Biaya Sosialisasi sebesar Rp2.679.042.962. Itu artinya peningkatan pada biaya operasionalisasi mencapai 63%.
2. Pada tahun 2015 BAZNAS belum mendapatkan dana hibah dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra BAZNAS untuk membantu pelaksanaan dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga untuk kegiatan operasionalnya tersebut, pihak BAZNAS sepenuhnya menggunakan bagian dana dari amil yang diambil dari penghimpunan dana zakat, serta sebagian lagi didukung oleh dana APBN sebesar Rp6.000.000.000. Itulah yang menyebabkan terjadinya lonjakan pada biaya pada tahun 2013 yang mana jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tingkat efisiensi BAZNAS sepanjang tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik 1.1

**Grafik 1.1**  
**Tingkat Efisiensi BAZNAS Periode 2013 – 2017**



Sumber : data diolah, 2019

Pada periode 2013 hingga 2017 secara keseluruhan kinerja keuangan BAZNAS mengalami perbaikan meskipun sempat mengalami penurunan efisiensi pada tahun 2013 dan 2015. Efisiensi yang terjadi pada tahun 2014, 2016 dan 2017 pada BAZNAS sebesar 100%. Adapun untuk rata-rata pada Rasio Total Biaya terhadap dana yang telah dihimpun amil sebesar 0,1% yang artinya dari rata-rata dana terhimpun sebesar Rp126.307.472.253, pihak pengurus zakat hanya menggunakan 10% dari dana tersebut atau setara dengan Rp11.793.997.852 untuk gaji atau upah amil serta untuk biaya operasional dan sosialisasi. Berdasarkan data rata-rata biaya dari yang terbesar hingga terkecil yang digunakan oleh BAZNAS pada tahun 2013 hingga 2017 yakni biaya personalia sebesar Rp8.465.337.234, selanjutnya adalah biaya operasional sebesar Rp1.835.305.647 lalu yang terakhir adalah biaya sosialisasi sebesar Rp1.493.354.971. Rata-rata rasio dana zakat yang didistribusikan oleh amil sebesar 59% atau Rp72.379.561.520 dari rata-rata terhimpun sebesar Rp126.307.472.253. perolehan ini dapat dikatakan positif meskipun terdapat inefisiensi pada tahun 2013 dan 2015. Kedepannya diharapkan kinerja amil dapat terus meningkat dari tahun ke tahun agar penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dapat mengalami peningkatan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Mayoritas Nilai Efisiensi dari tahun 2013 hingga 2017 pada BAZNAS telah menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal yakni 100%. Hanya saja terdapat inefisiensi yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi penghimpunan dan penyaluran zakat BAZNAS diantaranya yaitu berbagai program pendistribusian yang tepat guna, kebijakan pemerintah, dan inovasi zakat yang semakin memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya.

### **Saran**

#### **Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengevaluasi kinerja pengelola zakat yang telah mereka bentuk terkait pencapaian dana terhimpun dan penyaluran zakat yang telah dilakukan. Sehingga kedepannya pemerintah dapat menentukan strategi yang tepat dalam mensinergikan kebijakan dalam rangka memperkecil kesenjangan potensi zakat dan penghimpunannya serta masalah pendistribusian yang praktiknya akan dilakukan oleh Badan Pengelola Zakat.

#### **Bagi Badan Pengelola Zakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan pihak manajemen Badan Pengelola Zakat dalam mengevaluasi hasil kinerjanya selama ini dalam hal pengelolaan dana zakat.

#### **Bagi Peneliti Berikutnya**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria pemilihan sample yakni Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah, maka diharapkan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan sampling dengan memasukkan lembaga zakat yang dibentuk oleh swasta sebagai kriteria dalam pemilihan sampling. Kemudian diharapkan pada penelitian kedepan dapat menambah jumlah variabel input seperti modal yang dimiliki BPZ yang mana jumlah modal yang dimiliki BPZ juga turut mempengaruhi efisiensi penghimpunan dana zakat dan penyalurannya.



## REFERENSI

- Abd Wahab, N., & Rahim, A. (2013). Determinants of Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: A Nonparametric Approach. *Asian Journal of Business and Accounting* .
- Akbar, N. (2009). Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Tazkia Islamic Finance & Business Review* .
- Al-yubi, S., Ascarya, & Possumah, B. T. (2018). Examining the Efficiency of Zakat Management: Indonesian Zakat Institutions Experiences. *International Journal of Zakat Vol.3 (1)* , 37-55.
- Anderson, M. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral Ecology*, 32-46.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Outlook Zakat Indonesia*. 2017: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi*. Dipetik April 07, 2019, dari <https://pid.baznas.go.id/badan-amil-zakat-nasional/>
- Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia. (2018). *Laporan Statistik Angka Kemiskinan dan Ketidakesetaraan di Berbagai Negara*. Indoensia: BPS .
- Badan Zakat Amil Nasional. (2015). *Laporan Penerimaan Zaakat BAZNAS* . Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I., Nursechafia, Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., & Nazar, J. (2014). Towards an Establishment of an Efficient and Soakat Supervision. *The Working Group of Zakat Core Principles*, 3-43.
- Creswell, J. (2010). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. London: Sage.
- Departemen Agama RI. (2007). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Firdaus, M. (2012). *Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Harto, P. P., Anggraeni, V. S., & Bayinah, A. N. (2018). Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol 6*, 19-33.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: IAI.
- Indonesia Magnificience of Zakat. (2011). *Indonesia Zakat and Development Report 2011 : Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Ciputat: IMZ.
- Indonesia, P. R. (2001). *KEPRES RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Karim, A. (2011). The Significance of Management Information Systems for Enhancing Strategic and Tactical Planning. *Journal of Information System and Technology Management*, 459-470.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods For Business : A Skill Building Approach* . Wiley.

Sukirno. (2015). *Mikroekonomi Teori Pengantar* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widyaningrum, N. (2018). Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional di Indonesia dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol.7*.

**Analysis of Fundraising and Distribution of Zakat Infaq and Sadaqah at PT.  
Cepat Versi Arli in Singkawang City;**

**Rahmah Yulisa Kalbarini, Tergyesa**

IAIN Pontianak

[rinikalbarini@yahoo.com](mailto:rinikalbarini@yahoo.com), [elfinasia123@gmail.com](mailto:elfinasia123@gmail.com)

**Abstract**

Zakat is part of the property with certain requirements that Allah SWT obliges the owner to hand over to those who are entitled to receive it, with all certain conditions that have been determined. Zakat is the third pillar of the Islamic pillars. In the Al-Quran, Allah mentions it together with the prayer, which is approximately eighty-two times.

This research was conducted using a descriptive qualitative method. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation and used a source triangulation analysis technique where the researcher checked the data through interviews with several parties to validate the data that had been obtained.

The results of this study show the analysis of fundraising in ways, campaigns, communication concepts, campaign materials, campaign language, campaign media, program cooperation, seminars and discussions, and account utilization. The distribution are in the form of temporary assistance (consumptive), empowerment (productive), traditional consumptive distribution, creative consumptive distribution, traditional productive distribution, creative productive distribution, productive distribution patterns, local distribution, fair distribution of all groups at PT. Cepat Versi Arli in Singkawang City.

**Keywords :** *Analysis, fundraising, Distribution, Zakat*

**INTRODUCTION**

Singkawang is already known as a Chinese city and has spread to various places. Besides that, Singkawang City is also known as a multi-ethnic area including Chinese, Malay, Dayak, Javanese, Madurese, and others. According to data compiled by BPS, most religions in Singkawang City are Muslims by 53%, but Singkawang City is better known as the city of a Thousand Temples because of the strong Chinese culture there.

PT. Cepat Versi Arli is a shopping center in Singkawang. It is located on Aliyang street, No.74 A, Kelurahan Melayu, West Singkawang District. The local community and outsiders know it as CV Arli, which is different from other supermarkets. The owner of PT. Cepat Versi Arli is also a local Muslim. The owner requires all his employees to dress in Shari'a and even all female employees at PT.



Cepat Versi Arli wear a veil. Something that makes this shopping center different from others is that every prayer time, this shopping center closes and reopens after praying.

The total of employees at PT. Cepat Versi Arli is 127 people, consisting of 46 men and 81 women. Everyday the visitors are always crowded, even on holidays it can be more than weekdays. The existence of zakat at PT. Cepat Versi Arli is one of the reasons of the strong Islamic nuances there. Zakat is an obligation for all muslims If they have reached the requirements to religious rules and as thanksgiving to Allah SWT and get closer to him.

PT. Cepat Versi Arli, the only Muslim Supermarket in Singkawang, consistently doing its obligations as a Muslim, namely zakat. PT. Cepat Versi Arli collects and manages its own zakat so that the zakat collected can be on target. This research is important to do to analyze the collection and distribution of zakat at PT. Cepat Versi Arli.

## LITERATURE REVIEW

### ZAKAT

Zakat according to language means *al barakatu* "blessing", *al-namaa*, growth and development", *ath-thaharatu* "purity". Terminologically, zakat is part of the property that has certain requirements required by Allah SWT to be given to certain groups based on its regulations (Hafidhuddin, 2005)

Etymologically in the book Mu "jam Wasit as quoted by Yusuf Qardhawi, zakat means blessing, growth, clean and good. So it can be interpreted that zakat is part of the property owned by Muslims called muzakki who have fulfilled certain requirements and given to certain groups called mustahiq with a certain requirement as well. The purpose of zakat is to get the grace of Allah SWT. Zakat is one of the important instruments related to the welfare of the people. Zakat that has been collected if managed properly and distributed with the right target is expected to welfare not only mustahiq but also the people and the country. (Hafidhuddin, 2005)

### Fundraising zakat

fundraising zakat is the activity of collecting funds or other resources from the community, both individuals and groups, organizations and companies and the government. The funds collected can be used to finance the institution's program activities so that the institution can carry out its functions (Soetanto, 2008)).

The collection of ZISWAF has the role and task of collecting zakat, infaq and waqaf funds originating from the community both individuals and groups to be given to mustahiq zakat. (Sudewo, 2005)

It is further explained that the objectives of raising funds according to (Juwaini, 2005) are:

1. To add the candidate of donors or increase the donor's population.
2. To improve or build the image of the institution.
3. To build relationships and supporters.
4. Increase donor's satisfaction

According to (Sudewo, 2005) there is a special division or section that handles fundraising which has the task of collecting donor funds. Activities that can be carried out to raise zakat funds include:

1. Campaign

Zakat awareness must be done continuously as a never-ending process. In this campaign process, what must be prepared is the resilience of the institution itself. In conducting zakat socialization campaign, there are several things that must be considered, namely:

- a. Communication Concept, is a concept that becomes the foundation of zakat institutions, which will penetrate donors. This concept contains choices, strategies, campaign themes, parties that are partnered, time schedule and how to achieve the goals that have been set.

- b. Campaign Material, In designing a campaign, pay attention to the material that will be presented, which cannot be equated, society consists of several social levels. Each segment has its own taste. Each group has its own character. But if all segments want to come to a mall or hypermarket, for example, its advantages lie in comfort, attractive appearance, low prices and guaranteed fresh goods. What about zakat institutions? Zakat institutions must create programs that can multiply the reward of muzaki. Remember that zakat is a worship that is related to the perfection of worship. A program that can overcome the difficulties of mustahik, if it changes essentially, releasing them from poverty, is a program that is very big in virtue.

- c. Campaign Language, in campaigning the language used is also important because by using good language it is expected that the objectives of zakat socialization can be achieved. Soft speech and not yelling, language that is not useless. But emphasize persuasively. What needs to be said, say it without covering it up. If the rich community has a mistake, for example, say it in a ma'ruf way. Don't say the wrong thing that makes them upset so that communication fails. donors need to be opened to their hearts, that's the purpose of zakat campaigns. But don't do it by begging for mercy. Remember, if zakat is not paid, the muzaki's wealth and soul are damaged. Therefore, awareness-raising is an obligation, reminding our brothers and sisters so that it will not be a disaster in the Last Day.

- d. Campaign Media, nowadays the media has grown increasingly widespread. In the campaign, zakat institutions can choose which media is suitable for the targeted donor segment. Do not make the wrong choice, including the calculation of the cost of



broadcast advertising in a very diverse media, which is on average expensive. There are not many zakat institutions are able to campaign in the media.

## 2. Program Cooperation

Fundraising can also be done by cooperating with other related institutions, it is hoped that with this cooperation, the network will become wider and the goal of raising funds will be achieved more quickly. For example, many programs are carried out in the month of Ramadan by various zakat institutions. For example, the theme is "Zakat Awareness Month". Or Perfect Your Fasting Worship with Zakat. If criticized, this theme does not educate donors. Without being told, donors understand that Ramadan is a month full of blessings. Therefore, most of the people distribute their wealth zakat funds (excluding zakat fitrah) also in the month of Ramadan.

## 3. Seminar and Discussion

Zakat collection can be done in various ways such as conducting seminars and discussions. The purpose of this activity is not only to raise funds, but also to provide information and knowledge to muzakki about zakat and matters related to zakat. The theme of the seminar can be anything as long as it is still relevant to the activities and direction of the zakat institution. The theme can be about corporate zakat, about empowerment, about JPS, about Microfinance Institutions and about education and health services. Themes are not always related to the people being empowered. Talking about the finances of non-profit organizations also has its own segment. Talking about the back office of zakat institutions will also be attended by different participants. Remember the product of zakat institutions is value and morality. So in conclusion, this seminar and discussion is also expected to increase public trust in zakat institutions.

## 4. Utilization of Bank Account

In this digitalization era, the use of bank accounts in fundraising of zakat is important. Today's zakat institutions are required to have a bank account to make it easier for muzakki to give zakat. Today, transparency of funds can be done more using a bank account, incoming funds can be seen clearly by zakat institutions. Utilization of bank accounts is also useful in cooperation with various parties. One of them is a bank, if zakat institutions collect a lot of funds through bank accounts, it is not impossible that banks will become partners and facilitate zakat institutions through their programs. For the bank, the fundraising can get around the money that has not been used, placed as a deposit with adequate profit sharing.

### **The Distribution of Zakat Funds**

Distribution means channeling or distributing both funds and other sources to those in need. While the zakat distribution system means the collection of both assets and other resources, both physical and non-physical, which are related to one another to distribute zakat to mustahiq who have met the requirements with the aim of



prospering mustahiq in the economic field, so that it can turn mustahiqs into muzakki and increase the amount of zakat revenue. (Mursyidi, 2003)

The way of zakat distribution when viewed in the era of the Prophet Muhammad and his companions, then adapted in this era there are two ways, namely: (Hafidhuddin, 2005)

### **Momentary Assistance (Consumptive)**

Momentary assistance or better known as consumptive is more emphasized on the distribution of zakat consumable consumptive goods and not productive goods that can be managed and developed by mustahiq. This is done to mustahiq who meet certain criteria such as the impossibility of managing the zakat assets they get. In this case, mustahiq who can receive zakat funds are elderly parents, disabled people, displaced refugees or victims of natural disasters.

### **Empowerment (productive)**

Productive zakat funds are zakat funds that can be used by mustahiq to manage and develop their businesses. Productive zakat funds are usually in the form of business capital that aims to increase the economic independence of mustahiq. This empowerment is accompanied by coaching or mentoring for the business being carried out so that not only the capital increases, but also the innovation and skills of mustahiq. Arief Mufraini states that productive zakat today is divided into four forms: (Mufraini, 2012)

1. Traditional consumptive distribution, which is zakat distributed to mustahiq to be used directly and to meet basic needs such as zakat fitrah in the form of rice given to the poor to meet their daily needs or zakat mal distributed to victims of natural disasters so that they can use the zakat funds directly to cover their needs.
2. Creative consumptive distribution, namely consumptive zakat in the form of consumables but realized in other forms, such as given in the form of school equipment, scholarships, and others or assistance with worship equipment such as mukena, prayer mats, sarongs, and so on.
3. Traditional productive distribution, in this case zakat is given in the form of productive goods that can be used as capital to mustahiq such as shaving tools, carpentry tools and so on.
4. Creative productive distribution, realized in the distribution of zakat in the form of capital which is more focused on building activities or projects social such as the construction of schools, places of worship, health facilities.

Furthermore, according to Yusuf Al-Qardhawi in (Mukhlisin, 2009) the distribution of professional zakat funds can be done in various ways, namely

1. Productive Distribution, the zakat fund distribution pattern to mustahik that is borrowed by amil for the benefit of a business or business activity. The productive distribution pattern (empowerment) is the distribution of zakat and



- others with the target of changing the recipient's condition (more focused on mustahik or the poor) from the mustahik category to the muzakki category.
2. Local Distribution, zakat funds should be given to mustahiq according to the respective locations where zakat institutions and mustahiq are located, as we know with the concept of regional autonomy. some areas that are nearby are prioritized to get zakat of local rich people through amil zakat institutions.
  3. Fair Distribution to All Groups, fair means proportional according to the needs of mustahiq and the existing benefits.

The purpose of distributions are divided into two types, namely: (a). So that wealth is not concentrated to a small part of the community, (b). various factors of production of national wealth must be shared fairly with the community. The function of the distribution of zakat funds is to minimize the gap between rich and poor because part of the wealth of the rich helps and fosters the economic life of the poor, so that the economy of the poor can be improved. (Rahman Ritonga and Zainudin in (Mukhlisin, 2009))

## RESEARCH METHOD

This research was a field research where the researchers found the reality in the field about the collection and distribution of zakat in PT. Cepat Versi Arli. The data collection methods used were observation, interview and documentation. The researchers conducted observations at PT. Cepat Versi Arli to see the activities of collecting and distributing zakat. After that, the researchers conducted interviews with the manager of PT. Cepat Versi Arli who was appointed by the owner to carry out the collection and distribution of zakat. The researchers also conducted interviews with employees who give zakat at PT. Cepat Versi Arli. The documentation in this study was related to the collection and distribution of zakat at PT. Cepat Versi Arli.

The analysis technique in this study used the analysis technique of Miles and Huberman in Sugiyono (2013: 91-94). The data analysis technique consists of data collection carried out by observation, interviews and documentation. After collecting data, the researchers reduced the unnecessary data. The data presentation was done by using data that had been reduced to draw conclusions. The data validity technique used in this research was source triangulation, where the manager of PT. Cepat Versi Arli was the main informant in this research. The answers given by the Manager were supported by employees who pay zakat at PT. Cepat Versi Arli.

## RESULT AND DISCUSSION

### **The analysis of the fundraising of zakat of, Infaq and Shadaqah at PT. Cepat Versi Arli in Singkawang City.**

In the fundraising of zakat, infaq and shadaqah at PT. Cepat Versi Arli in Singkawang City, researchers divide into 7 parts, namely:  
Raising



The fundraising of zakat at PT. Cepat Versi Arli is carried out by the fund collecting division to collect not only from employees but also from the community and other institutions. According to (Eri sudewo, 2004), the fundraising comes from donors both partnerships and companies. The ways used by PT. Cepat version Arli to raise zakat funds from muzakki are through various ways, namely campaigns, establishing good communication with employees and the community, using good campaign language and media to provide information to muzakki about zakat. In addition, PT, Cepat Versi Arli also collaborates with several institutions engaged in zakat such as baznas to conduct discussion or seminar activities to raise zakat funds. PT. Cepat Versi Arli also uses a bank account to make it easier for muzakki to give zakat.

### **The Analysis of the Distribution of Zakat, Infaq and Shadaqah Funds at PT. Cepat Versi Arli in Singkawang City**

The distribution of zakat, infaq and shadaqah funds at PT. Cepat version arli in singkawang city is divided into several parts based on the type of property to be used, namely consumptive where according to Didin Hafidhudin that consumptive zakat is given to mustahiq who cannot work to fulfill their daily needs while productive zakat is given in the form of business capital to help mustahiq in running their business.

PT. Cepat Versi Arli also conducts traditional consumptive distribution where the zakat given can be used directly such as zakat fithrah in the form of rice and can be used directly by Mustahiq. Zakat is also given in the form of creative consumptive where zakat funds are given for school needs, worship and others. The distribution is also given in the form of traditional and creative productive in the form of productive goods that can be used in long term.

PT. Cepat Versi Arli conducts local distribution to be more effective and right on target and is given to those in need according to the provisions of the Qur'an and Hadith.

### **CONCLUSION**

The conclusion in this study was that the fundraising of zakat carried out at PT. Cepat Versi Arli was carried out in several ways a). Campaign, b). Good communication, c). Campaign language, d). Campaign media, e). Program cooperation, f). Seminars and discussions, g). Bank account utilization

The distribution model of zakat funds at PT. Cepat Versi Arli can be divided into several types, namely 1). Momentary assistance (consumptive), 2). empowerment (productive), 3). Distribution of "traditional consumptive", 4). Distribution of "creative consumptive", 5). Distribution of "traditional productive", 6). Distribution of "creative productive", 7). Productive distribution model, 8). Local distribution, 9). fair distribution to all groups.



Suggestions in this study are for the public to be able to give zakat if it has reached nisab and haul through PT. Cepat Versi Arli or other institutions. PT. Cepat Versi Arli can inform about the zakat collected so that more muzakki give zakat at PT. Cepat Versi Arli. In addition, it is also hoped that PT. Cepat Bersi Arli will collaborate with several parties so that the zakat received will increase and bring benefits to many mustahiq.

## **LITERATURE**

- Hafidhuddin, D. (2005). *Zakat Infaq & Shadaqah Kami Menjawab*. BAZNAS.
- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Piramedia.
- Mufraini, A. (2012). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana.
- Mukhlisin. (2009). *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang*. *Skripsi UIN Jakarta*.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- Soetanto, H. (2008). *Bank Strategy on Funding and Liability Management*. Elex Media Komputindo.
- Sudewo, E. (2005). *Manajemen Zakat*. UIN Jakarta.

## **Decision-Making Policies of Leaders within Islamic Boarding School's Institute to Improve Formal Education Managerial's Quality**

**Syarif Ali Al Qadrie**  
IAIN Pontianak  
[sahihag@gmail.com](mailto:sahihag@gmail.com)

DOI: 10.35719/jieman.v4i1.107

### **Abstract**

The rationale of the research context in this study is mainly related to the fact that there is such a significant impact of the decision-making procedure taken by leaders in Islamic Boarding School, mostly known as *pesantren*, to improve the quality of managerial activities in formal educational institutions. Islamic boarding school institutes that oversee formal educational institutions have different strategies and decision-making with targeted goals and distinctive considerations in regulating the decisions to be reached. This study focuses on the design, implementation, and evaluation of decision-making. This study used a descriptive qualitative approach. The data were collected through observation, documentation, and interviews. The data analysis used is data reduction, data presentation, and data verification. The results showed that: first, the decision-making design consisted of steps like forming a team, identifying needs analysis, program designing, employing program socialization, and undergoing process evaluation, while the focus of the decision-making design was to improve the quality of management. Second, the implementation of decision-making procedures from the leaders can be seen in improving the quality of human resources, where they fixed and highlighted this particular aspect as they are directly

related to the quality of school management. Third, the leaders' evaluation process was done directly and indirectly through some discussion. The evaluation standard used is the evaluation undergoes the process within the decision is implemented and at the impact of the decision to measure how significant it is.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pengambilan keputusan pimpinan yayasan yang dalam kaitannya meningkatkan mutu pengelolaan di lembaga pendidikan formal. Yayasan yang menaungi lembaga pendidikan formal memiliki strategi dan pengambilan keputusan yang berbeda dengan tujuan yang terarah dan adanya sebuah pertimbangan khusus dalam menetapkan keputusan yang akan direalisasikan. Kajian ini difokuskan pada desain, implementasi dan evaluasi pengambilan keputusan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa metode yaitu, observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, desain pengambilan keputusan terdiri dari langkah-langkah berupa pembentukan tim, analisis kebutuhan, rancangan program, sosialisasi program, evaluasi proses, sedangkan bentuk desain pengambilan keputusan pimpinan yayasan dalam meningkatkan mutu pengelolaan. Kedua, pada Implementasi pengambilan keputusan dari pimpinan yayasan terlihat pada peningkatan mutu SDM, dimana pimpinan yayasan membenahi dan fokus pada SDM. Karena bagi pimpinan yayasan hal yang terkait langsung dengan pengelolaan sekolah yakni terletak pada SDM yang berkualitas. Ketiga, evaluasi dari pimpinan yayasan yakni secara langsung dan tidak langsung dan selalu dimusyawarahkan. Standar evaluasi yang digunakan yakni pada evaluasi ketika dilakukan saat proses maupun akhir dari keputusan tersebut dan mengukur seberapa jauh pengambilan keputusan tersebut

**Keywords:** *policy, quality management, leadership, Islamic boarding school*

## **Introduction**

Currently, there is a strong tendency to have an institutional organization's consolidation, especially in the aspects of leadership

and management. The institutional development of *pesantren* is mainly caused by the diversification of the education held, which also includes madrasas and public schools that adhere to a more rational, democratic, and open system.<sup>1</sup> Thus, some *pesantren* develop institutions as institutes representing collective leadership.<sup>2</sup>

*Pesantren* is also one of the educational institutions spreading rapidly in Indonesia. In this era of modernization, *pesantren* have been more adapted to times by establishing formal educational institutions so that *pesantren* are no longer left behind in the academic domain.

*Pesantren*, established through an institute, has changed its nature into an organization that is no longer personal. Having an established institute, it can provide an excellent cooperative atmosphere following the responsibilities of each member. Thus, the educational institution within *pesantren* has the right to regulate its course at its own pace.

Leadership within an institute significantly contributes towards various tasks divisions of the *pesantren* itself. This case is related to the decision-making policies towards the quality of Islamic boarding school education where the leaders will have to organize and manage *pesantren* education according to the projected policies. Policy decisions are arranged through various ideas from the institutions and the needs of stakeholders so that all parties can accept these decisions.

An institute of a *pesantren* becomes an institution that overshadows and overcomes every problem in *pesantren* education. Therefore, the leader can make a decision that is in accordance with the needs of all parties, and it has been socialized to the parties involved and implements the decisions that have been taken.

There are some differences in each decision-making or

---

<sup>1</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipres, 1999), 11.

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan" Pengantar dalam *Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Proses Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), xx

policy for a leader. It also has various characteristics. Some have an authoritarian nature in making decisions, and some are democratic. It depends on the way a leader copes with his leadership.

The type of leadership can be interpreted as a pattern or type of leadership that can be implemented by more than one behavior and a leadership style supporting it. Meanwhile, the leadership style can be interpreted as behavior or method chosen and used by the leader in influencing the thoughts, feelings, attitudes, and behavior of members of the organization and their subordinates. According to Eugene Emerson Jennings and Robert T Golembiewski, leaders in any organization can be classified into five main types; an autocratic leader, a militaristic leader, a paternalistic leaders, a charismatic leader, and a democratic leader.<sup>3</sup>

Looking at the reality of Islamic boarding schools, some remarkable things exist, primarily related to decision-making and policies aiming for a more progressive development than before. Because for Islamic boarding schools, a leader is considered the leading power in making decisions for all aspects of the boarding school itself. It is as if the decision-making cannot be changed or discussed when a leader at the Islamic boarding school establishes a policy.

This applies to the leadership of the Islamic boarding school itself or to the leadership of an institute that manages educational institutions. There will be no difference between the two because when a top leader no longer takes care of such things, a middle leader will have to handle it. Therefore, both of these leadership typologies will have the same characteristics. So they will rely on supremacy in determining and making decisions.

At least in a decision-making process, a good objective or goals for all parties should be considered in a discussion forum where all parties participate in deciding the best policy. Both the *top*

---

<sup>3</sup> Rahmat Hidayat, Andi Samsu Alam, and Suhardiman Syamsu. "Analisis Tipe Kepemimpinan Aras Tammauni di Kabupaten Mamuju Tengah." *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 4, no. 1 (2018), 46-59. DOI: <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5904>

*leader* as a *kiai* and *the middle leader* as the leader of the institute that oversees formal educational institutions should discuss the decision-making procedure with their subordinates so that various inputs will be accepted and provide more cooperative and effective policies.

In reality, a decision given by the institute's leaders does not lead to the promptness of the school parties to implement a program. When a decision is given, some obscurities exist in the implementation stage. Therefore, the decisions or policies related to the program itself cannot be managed efficiently. Most of the time, the leaders of the institute provide programs that do not adjust to the level of readiness of the schools and institutions. Hence, the program implementation experienced obstacles in the evaluation, in which the entire program needed an evaluation in each process. Sometimes each institute has a different evaluation system; even evaluation is only done at the end of the program being implemented.

## **Methods**

The approach used in this study is qualitative. The qualitative approach is one approach using a natural research paradigm, which is trying to find theories by exploring data from the real world, namely data obtained from research locations conducted at the Bustanul Ulum Islamic Boarding School, which have been adapted with a research focus, then conceptualized into a particular theory. This qualitative approach is used to describe and reveal phenomena or events purely related to the research focus, namely about decision making by foundation leaders in improving the quality of management, as well as trying to find elements of knowledge that do not exist in the applicable theory related to the research focus.

The type of research used in this study is a case study, which is qualitative research that seeks to find meaning, investigate processes, and gain a deep understanding and understanding of individuals, groups, or situations. Case study research focuses on

one particular object raised as a case to be studied in depth. Case study model research emphasizes the depth of understanding of the problem under study. The case study in this study means that researchers are trying to find the true meaning of what information is related to the policies of the foundation leadership in improving the quality of management.

Because a case study is an in-depth study of an individual, a group, an organization, an activity program, and so on at a particular time, the aim is to obtain a complete and in-depth description of existing reality and phenomenon. Case studies produce data for further analysis in order to produce theories. As with the procedures for obtaining qualitative research data, case study data were obtained from interviews, observations, and documentation. In the case of studies, each event cannot be separated from its complexity and uniqueness because, in one event, there must be a complex problem.

## **Discussion**

### **Design of Decision Making by Institute's Leaders in Improving Management Quality**

In its development, Islamic boarding schools have gone through various cycles of development, both in terms of methodology and in the organization of the *pesantren* itself. Even more regarding institutional modernization, which is a word that is synonymous with the development of Islamic boarding schools today. Modernization has become a general trend in all aspects of life, such as political, economic, social, educational, and even religious matters.

The competition within *pesantren*, especially in the education sector, has been increased to satisfy the needs of the social community. Islamic boarding schools are no longer just developing education in a religious context, but *pesantren* include formal education through their institutions or an institute that oversees formal educational institutions.

Formal education is one of the provisions of Islamic



boarding schools, especially for the students. Formal education under Islamic boarding school institute cannot be separated from the leadership in developing the formal education by making various efforts to develop it.

Leaders in an institute have various descriptions of ideas that will be outlined in a program and then become decision makers to improve the quality of the formal educational institution itself. Therefore, an institution with an intellectual leadership figure can provide quality ideas and programs to improve the quality. The ideas or programs will then be outlined in leadership decision-making that sees the *pesantren* stakeholders' needs.

In decision-making, first of all, there should be an option based on logical consideration. Second, some other alternative options will be chosen from the best. Third, there is a goal to be achieved so that the decision is close to the initial goal.<sup>4</sup>

Therefore, decision-making cannot be separated from the process of intelligence activity or based on situations and conditions experienced. Further, it should be related to design activity or finding problems. Then the problem is analyzed and developed. Moreover, it also needs to cope with choice activity or the existence of many choices of an action from the alternatives that will produce problem-solving.<sup>5</sup>

The design steps for decision-making by leaders within an institute in improving the quality of management are:

1. Decision-making design steps
  - a. Team formation
  - b. Needs analysis
  - c. Program design
  - d. Program socialization
  - e. Process evaluation

---

<sup>4</sup> Herson Anwar, "Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8, no. 1 (2014), 37-56. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/Nadwa/article/viewFile/569/516>

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005), 146

2. Forms of decision-making in improving the quality of management

a. Appointment of a compatible principal

The appointment of a principal is one of the decisions taken by the institute's leaders. A voting system will be held regarding the election of school principals. However, the final decision lies within the institute's leaders themselves.

b. Designing a Joint learning program to improve teacher's competence

A joint discussion program is a discussion program or joint learning activity for teachers. Each teacher is obliged to make presentations to other teachers in accordance with their respective fields and will be supervised by the principal and the institute's leaders. The objective of this program is to enrich teachers' knowledge related to things that are not yet known by each teacher.

c. The assignment of teachers to continue their studies to a higher level to improve professionalism.

The institute provides scholarships for teachers who want to continue their studies to a higher level, with the criteria determined by the institute. This program aims to increase the school grades when the teachers' education level is higher.

This is in accordance with the opinion stated by KH. Robiatul Firdaus:

Each institute has different decision-making processes, so I just focus and make three crucial decisions, the first is regarding the appointment of the principal, the second is the joint learning program, and the third is teacher assignments for a higher level of education. In my opinion, the three programs are directly related to improving the quality of schools. Furthermore, he said: Now we are starting to disseminate teachers to higher school. Currently, one of the

teachers in our senior high school holds a master's degree, and the other two are studying for their master's degrees. In other words, we will have more teachers having master's degree qualifications next year. For the senior high school, for example, we do not need all of the teachers to have master's degrees. Having ten or seven master's degree teachers will increase our school's quality. Every year, this program disseminates one or two teachers to continue their studies. Maybe in the next four or five years, there will be at least seven or five teachers who have master's degrees. In this case, there is not even a public high school to reach this accomplishment (having more teachers who hold master's degrees). Because this is not solely for the institute, but it is for the teacher.<sup>6</sup>

The term decision-making can be interpreted as a program or action that leads to goals proposed by a person, group, or government in certain environmental aspects to seek solutions to problems faced in realizing the main desired goals. Therefore, in an institution where an institution that established an Islamic boarding school oversees formal educational institutions, the decision-making, in general, is based on the leaders, whose decision-making procedure is fully guided by the universal vision and mission of the institute. Thus, decision-making is a program or action that is directed toward its goals. All in all, decisions made by taking all relevant facts into account will have better quality than those made based on speculation or speculative personal tendencies.

### **Decision-Making Process of Institute's Leaders in Improving Management Quality**

1. Formulation of decision-making in improving the management quality

---

<sup>6</sup>Researcher interview with Dr. KH Robiatul Firdaus at Ponpes Bustanul Ulum

The formulation of decision-making by the institute leaders is adjusted to the needs of the relevant parties and the designated vision and mission of the institute itself. In making these decisions, discussion and socialization are carried out regarding the results of decision-making, aiming to accommodate ideas from related parties. KH Robiatul Firdaus said:

Yes, it is according to the needs. It is not just a need but more directed towards the institute's vision and mission because, for example, senior high school teachers do not have to hold master's degrees. But, it is related to the institute's vision and mission to improve school quality. Actually, it is not a requirement, so it is not in accordance with needs. But the direction of where this school is going to need to be taken into consideration.<sup>7</sup>

Although in the provision, the discussion on decision-making is carried out among certain groups. Nevertheless, at least, it seems that there is some kind of involvement within parties in it. This is in accordance with the theory put forward by William Dunn: The provision of the decision-making agenda begins with a discussion on improving the quality of management.

In particular, Mc. Camy stated that the decision-making process in formal organizations is as follows:

a. Problem identification

A problem is defined as anything that contains uncertainty, doubt, difficulty, or a question that demands a solution or discussion. Problem identification means an activity to determine the types of deviations that can cause interference in achieving goals so that solutions need to be found.

b. Situation analysis and problem formulation

---

<sup>7</sup>Researcher interview with Dr. KH Robiatul Firdaus at Ponpes Bustanul Ulum

This includes a systematic effort to present facts, opinions, and ideas about the existing situation or estimate the situation when the facts, opinions, and ideas are challenging to obtain. The formulation of the problem must be related to the goals of the organization and the goals of the individuals who are members of the organization.

c. Alternative formulation and analysis

It includes a systematic effort to present facts, opinions, and ideas about the existing situation or estimates about the situation when the facts, opinions, and ideas are challenging to obtain. The formulation of the problem must be related to the goals of the organization and the goals of the individuals who are members of the organization.

d. Implementation and evaluation of decisions

Implementing the decisions is about giving the proper orders and estimating the allocation of resources according to needs. Implementation of a decision involves a deciding process of who to do what, when, where, and how to do it. In contrast, decision evaluation is an activity of estimating and considering the results achieved in problem-solving. It is all about the effectiveness of a decision.

The discussion of decision-making by the leaders of the institute, it is done by looking at the needs of the school which is then assigned to the institute. The institute should be open in accepting the needs following the vision and mission of the institute itself. In the process of decision-making, the institute also uses a limited (internal) discussion system but does not exclude the need for ideas from related parties. So there is involvement even though it is limited.

Regarding the decision-making, the leaders of the institute should always lead to the results of the discussion and options suggested by related parties. However, the final decision depended

on the institute's leaders, who were proposed to the caretaker of the Islamic boarding school with consideration of rational and spiritual aspects. As KH Robiatul Firdaus said:

The idea may come from me systematically, then I will discuss it, or I will directly instruct not to use the discussion, or if the ideas are from the principals or teachers who have disclosed to me then it will be discussed. Given the opportunity, yes, but whether all of them are approved or not, it depends on me. As what we have in the selection of school principals, all of the teachers were given a plain forms later the forms were put in an envelope to be collected by me. So only I know who has more or fewer votes. However, even then, I did not take this as a reason for choosing the principal because this is an institution under the auspices of a *pesantren*. So, in this case, I usually consult with the caretaker of the boarding school to balance rational considerations and spiritual considerations, or in our, we call it *istikhara* (application to god for instructions in determining the right choice).<sup>8</sup>

Decision-making can be seen as the primary measure of the performance of a *pesantren's* leader. All the main results of the leadership decisions will be a reference for thinking, acting, and doing within the *pesantren's* community. Therefore, *kiai* as the central figure of the *pesantren* needs to explore the principles, concepts, and techniques of educational decision-making that continue to develop. In the formal education system, according to Hoy and Miskel, decision-making is the primary responsibility of all administrators (including *pesantren's* leaders).<sup>9</sup>

### **Implementation of Decision-Making by Institute's Leaders in Improving Management Quality**

Implementation of the decision-making from the institute's leaders can be seen in the quality improvement of the human

---

<sup>8</sup>Researcher interview with Dr. KH Robiatul Firdaus at Ponpes Bustanul Ulum

<sup>9</sup> Sulthon Masyhud and Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 46.

resources, where they resolve and solely focus on human resources. It is due to the belief that the quality that is directly related to school management lies in the quality of the human resources, so the phases are:

1. Requires a decision-making strategy

Leaders can decide on a problem for their responsibility through actions that include: identifying and describing a problem or issue, examining various difficulties in a particular situation, establishing indicators for a satisfactory solution, developing a strategy for action, triggering an activity plan, and giving an evaluation.<sup>10</sup>

Regarding the strategy, the institute's leaders have a different strategy in every decision-making. It will be adjusted to the conditions and circumstances of the objects involved in the decisions it makes. In implementing the program, the institute's leaders give more emphasis on implementing the commitment. The decision that has been given by the institute's leaders becomes a new regulation that must be implemented and accounted for in carrying out the tasks given

2. HR (Human Resources) in improving the quality of management

In relation to human resources, the decision-making of the institute's leader as a whole is goal-oriented, aiming to improve the quality of human resources. For the institutes, HR is the perpetrator in every policy-making process. HR is a resource with a lot of potential, contribution, and role, which is very influential regarding the achievement of organizational goals.<sup>11</sup>

The implementation of decision-making by the institute's

---

<sup>10</sup> Veitzhal Riva'i, *Education Manajement*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 258.

<sup>11</sup> Kadek Hengki Primayana, "Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi," *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1 no. 2 (2015), 7-15. <http://www.ejournal.ihtdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/File/45/54>

leaders can be seen in the efforts to improve the quality of human resources, where they try to resolve and highlights this aspect. They also believe that the quality of human resources is directly related to the quality of school management itself.

Making decisions, according to George R. Terry and Iqbal Hasan, can be based on five categories, they are:

- a. Intuition, the decision-making based on intuition or feelings, has a subjective nature, so it is easily affected by the experience. Decision-making based on experience benefits practical knowledge because it is based on one's experience and estimates the state of something where it can calculate the pros and cons as well as the good and bad decisions that will be produced.
  - b. Facts, making decisions based on facts can provide sound, solid, and good decisions. Having facts-oriented decision-making, the level of trust can reach a higher level so that people can accept the decisions made willingly and gracefully.
  - c. Authority, decision-making based on authority is usually carried out by the leader against his subordinates or people of lower position.
  - d. Rational in rational-based decision-making, the resulting decisions are objective, logical, and transparent. It is also consistent with maximizing results or values within certain constraints so that it can be said that this is close to the truth or in accordance with what is desired.<sup>12</sup>
3. Having the competence to improve management quality

Decision-making by the leaders, related to the selection of alternative solutions to problems, will involve all related parties in educational institutions. This is because the supremacy of the leaders cannot be operationalized when it is not supported and assisted by all personnel who have different knowledge and experience. Leaders must develop the concept of

---

<sup>12</sup>Eti Rochaety. Education Management Information System. ( Jakarta: Earth Literacy, 2006), 156



interpersonal cooperation so that the implementation of alternative problem solving is faster and easier. Cooperation can be created when the leader is skilled in regulating human aspects of human.<sup>13</sup>

The existence of decision-making from alternative activities in improving human resources, such as joint discussions held by the institute's leader. This is one of the policies to improve the competence of HR. Directing that each task and responsibility given is in accordance with the expertise possessed by HR.

4. Commitment to decision-making by the institute's leaders in improving the quality of management.

Commitment has the most important role in making policy. By having the commitment, the level of compliance and discipline will be better so that the policy can be adequately realized. This is seen as the basis in policy making.

In making decisions, the institute's leaders will fully direct the vision and mission. By directing the vision and mission, the institute will have a firm commitment to realizing the decisions it makes. In addition, the institute's leaders also have a personal element in their decisions. However, the decisions are for the sake of all parties' needs.

### **Evaluation of Decision-Making by Institute's Leaders in Improving Management Quality**

In the decision-making procedure, apart from the design process and the implementation of decision-making itself, the most important thing is the evaluation in decision-making. Evaluation of decision-making functions to supervise how far the decision-making has been carried out. Evaluation of decision-making plays a role in seeing the shortcomings and success of the decision-making itself within its implementation.

1. The standard process of evaluating decision-making in

---

<sup>13</sup> Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 63

improving the quality of management

Evaluation of decision-making is based on the evaluation standards used. Thus, the evaluation aims to give follow-up activities on the implementation of decision-making that has been applied.

KH Robiatul Firdaus said: In discussing the evaluation, I never evaluate it myself. The evaluation is always done in a discussion forum. He further said that overall, if it is good, then we will continue. The success or failure aspect of the objectives within the decision-making procedure will always abide by the standard process known.<sup>14</sup>

2. The process of measuring the decision-making procedure in improving the quality of management

Evaluation within the decision-making procedure is carried out directly and indirectly by the institute's leaders, both in long-term and short-term activities. Evaluating the success rate of decision-making is done by comparing the impact obtained by related parties and the gap between decision-makers and related parties or from decision-making programs with the level of success and implementation of decision-making itself.

KH Robiatul Firdaus, in regards to the evaluation phase, said: The evaluation can be done in a direct or indirect manner. It means that it could be done once for short-term activities. For long-term activities, the evaluation is done continuously, such as incidental activities that are routinely carried out. The evaluation is done after the event is held.<sup>15</sup>

To assess the level of performance of a decision making, the leader should be able to measure the impact of the decisions that have been made. A reassessment needs to be carried out. The determinants to be assessed should be decided early on and

---

<sup>14</sup> Researcher interview with Dr. KH Robiatul Firdaus at Ponpes Bustanul Ulum.

<sup>15</sup> Researcher interview with Dr. KH Robiatul Firdaus at Ponpes Bustanul Ulum.

not after the implementation. In such ways, while it is easier to have a heated debate, the accuracy of the decision-making is guaranteed.

Based on the various opinions of the experts above, it can be concluded that the stages of the decision-making process are: 1) problem formulation, 2) determination of problem-solving criteria, 3) identification of alternative problem solving, 4) assessment of alternative problem solving, 5) selection of the best alternative, 6) decision making or implementing the chosen alternative.

The evaluation carried out by the institute's leaders was also carried out using the discussion method. Sometimes, related parties also participate in observing the decision-making process and directly evaluate the program being implemented. In other words, there is someone who is responsible for the program or decision made by the institute's leaders. The institute's leaders, in evaluating the decision-making, use several perspectives in regards to the fact of whether the decision-making can be continued or terminated. However, its implementation is less optimal when some new recommendations come up out of nowhere for the follow-up of the program itself.

KH Robiatus Firdaus said: There is a new decision making. There are things that I consider related to the implementation of the decision-making, like for all of the neighboring children who go to formal schools, and I oblige them to attend *madrasah diniyah* (Madin). Currently, it is still a recommendation, not mandatory, and eventually, all those who attend formal school will have to stay or live in *pesantren*. So gradually, maybe next year, I will ask all of the students in formal schools to go to *Madin* schools. Whether the goal is achieved in the process or not, it does not matter. From looking at the output, it is also possible, but the problem is that the output will not automatically be felt now. There are some

institute decisions that may not be felt in the near future.<sup>16</sup>

Thus, every time when some new needs or problem take place, of course, there will be new decision-making to be made as a recommendation on the problem. Viewing it from various aspects of the stakeholder's point of view is very crucial, so the decision-making sometimes needs to be improved or added.

3. The gap level towards decision-making in improving the quality of management

Sometimes there is a gap between leaders and subordinates, especially regarding the decision-making process. Sometimes subordinates do not fully agree with the decision made to be applied. Therefore, a leader must have firmness in his leadership and take some consideration conditionally.

KH Robiatul Firdaus said: From the teachers, perhaps, there are some teachers who are not connected with their principals, all institutions experience such problem. Yes, there are, like this one, the gap still exists, the problem persists, and the gap is understandable. This is in line with what Mc. Camy said that decision evaluation is an activity of estimating, assessing, estimating, and considering the results achieved in problem-solving. The effectiveness of a decision is judged based on achievement in solving organizational problems.<sup>17</sup>

## Conclusion

Based on the discussion above, it can be concluded that, *first*, the decision-making design consists of steps in the form of team formation, needs analysis, program design, program socialization, and process evaluation, while the form of decision-making design in the form of appointment of a compatible principal, joint learning program, the dissemination of teachers to continue their studies. *Second*, the implementation of decision-

---

<sup>16</sup> Researcher interview with Dr. KH Robiatul Firdaus at Ponpes Bustanul Ulum.

<sup>17</sup> Researcher interview with Dr. KH Robiatul Firdaus at Ponpes Bustanul Ulum.

making by the institute's leaders can be seen in improving the quality of human resources, where they fix and resolves the human resources. They also believe that the quality of human resources is directly related to the quality of school management itself. *Third*, evaluation from the institute's leaders is done in a direct and indirect manner and is always discussed. The evaluation standard used is the evaluation when it is carried out during the process and at the end of the decision-making and measures how far the decision-making has improved, not in its realization and the level of a gap between decision-making and decision-making actor perpetrator.

## References

- Anwar, Herson. "Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 37-56. 2014. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/Nadwa/article/viewFile/569/516>
- Azra, Azyumardi. "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan" Pengantar dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Proses Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Hidayat, Rahmat, Andi Samsu Alam, and Suhardiman Syamsu. "Analisis Tipe Kepemimpinan Aras Tammauni di Kabupaten Mamuju Tengah." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2018. DOI: <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5904>
- Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Masyhud, Sulthon, and Moh. Khusnuridlo. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Diva Pustaka, 2003

- Mulkhan, Abdul Munir. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: Sipres, 1999.
- Primayana, Kadek Hengki. "Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2), 7-15. 2015. <http://www.ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/viewFile/45/54>
- Riva'i, Veitzhal. *Education Manajement*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rochaety, Eti. *Education Management Information System*. Jakarta: Earth Literacy, 2006.
- Wahyudi. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta, 2009.



# AL-ALBAB

## CONTENTS

Music in The Liturgy of The Catholic Community in Jakarta, Indonesia  
*Adison Adrianus Sihombing*

Muhammadiyah's Criticism Towards Government Policies in The Era of  
Din Syamsudin's Leadership  
*Tohari, Sjafri Sairin, Muhammad Azhar, M. Nurul Yamin*

Why Indonesia Prefers A Mono-Religious Education Model? A Durkhemian  
Perspective  
*Mohamad Yusuf*

The Borneo Islamic Heritage and The Significance of Idahan Jawi Manuscript  
*Suraya Sintang, Rosdiana Onga, Siti Aidah Hj Lukin, Asmady Idris*

Hamka, Social Criticism and The Practices of Polygamy in Minangkabau  
*Saifuddin Herlambang*

Social Capital and Civic Engagement in Times of Tension: An Evidence from  
Interethnic Relation Developed in Stella Maris Credit Union Pontianak,  
West Kalimantan  
*Alanuari, Mohammad Iqbal Ahnaf*

The Myth of Religious "Radicalism"  
*Amanah Nurish*

The Style of Sufistic Interpretation: A Philological Study and Content Analysis of the  
Manuscripts by Three Popular Ulemas in West Kalimantan  
*Syarif*





# AL-ALBAB

Volume 9 Number 1 June 2020

---

## EDITOR-IN-CHIEF

*Zaenuddin Hudi Prasajo*

## INTERNATIONAL EDITORS

*Afifi al-Akiti (Faculty of Theology and Religion, Oxford University, United Kingdom)*

*Yasien Mohamed (University of the Western Cape, South Africa, South Africa)*

*Irwan Abdullah (Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia)*

*Zainal Abidin Bagir (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)*

*Hans-Christian Günther (Department of Classics Albert Ludwigs University of Freiburg, Germany, Germany)*

*Kamaludeen Bin Mohamed Nasir (Nanyang Technological University, Singapore)*

*Mohd Roslan Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia)*

*Giuseppina Strummiello (University of Bari Aldo Moro, Italy)*

*Abdul Razak Abdulroya Panaemalae (Walailak University, Thailand)*

*Florian Pohl (Oxford College of Emory University, United States, Germany)*

*Mujiburrahman (IAIN Antasari Banjarmasin, Indonesia)*

*Minako Sakai (Director of Social Sciences Research Group, Australia)*

*Busro Busro (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia)*

*Tassim Abu Bakar (Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam)*

## ASSISTANT EDITORS

*Faizal Amin, IAIN Pontianak, Indonesia*

*Saifuddin Herlambang, IAIN Pontianak, Indonesia*

*Syamsul Kurniawan, IAIN Pontianak, Indonesia*

## SECTION EDITOR

*Setia Purwadi, IAIN Pontianak, Indonesia*

## LANGUAGE ADVISOR

*Jennifer H Lundt, Colgate University Scholar, New York, United States*



*Al-Albab* ISSN 0216-6143 (print) and ISSN: 2502-8340 (online) is an interdisciplinary journal published twice a year in print and online (e-journal) by the Pontianak State Institute of Islamic Studies, Pontianak. Our academic publication concern includes the studies of world religions of Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism, Judaism, Chinese religions and other religions. Interdisciplinary studies may include the studies of religion in the fields of anthropology, sociology, philosophy, psychology, education, cultural studies and other social sciences.

Since the journal is published twice a year, special issue would be made available for special condition. The regular issues include June and December editions each year. The journal publishes research-based articles in the area of religious studies. All prospective contributors from various background are welcome to contribute to the journal publication. Contributions in English should be typed single-space and contain minimum of 4.000 and maximum of 8.000 words. The citation should follow APA style with footnotes.



Editorial Office:

**AL-ALBAB**, Gedung Saifuddin Zuhri

Pascasarjana IAIN Pontianak,

Jalan Letjend Suprpto No. 19, Pontianak Selatan

Pontianak 78122, Kalimantan Barat, Indonesia.

Phone: (62-561) 734170 Fax: (62-561) 734170 ;

Handphone/WA: +6281256738348

E-mail: [redaksi.bjrs@gmail.com](mailto:redaksi.bjrs@gmail.com)

Website: <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alalbab>

# AL - ALBAB

VOLUME 9 NUMBER 1 (JUNE 2020)

## CONTENTS

1. Music in The Liturgy of The Catholic Community in Jakarta, Indonesia  
Adison Adrianus Sihombing ..... 3
2. Muhammadiyah's Criticism Towards Government Policies in The Era of Din Syamsudin's Leadership  
Tohari, Sjafrin Sairin, Muhammad Azhar, M. Nurul Yamin ..... 19
3. Why Indonesia Prefers A Mono-Religious Education Model? A Durkhemian Perspective  
Mohamad Yusuf ..... 37
4. The Borneo Islamic Heritage and The Significance of Idahan Jawi Manuscript  
Suraya Sintang, Rosdiana Onga, Siti Aidah Hj Lukin, Asmady Idris ..... 55
5. Hamka, Social Criticism and The Practices of Polygamy in Minangkabau  
Saifuddin Herlambang ..... 69
6. Social Capital and Civic Engagement in Times of Tension: An Evidence from Interethnic Relation Developed in Stella Maris Credit Union Pontianak, West Kalimantan  
Alanuari, Mohammad Iqbal Ahnaf ..... 87
7. The Myth of Religious "Radicalism"  
Amanah Nurish ..... 107
8. The Style of Sufistic Interpretation: A Philological Study and Content Analysis of the Manuscripts by Three Popular Ulemas in West Kalimantan Syarif ..... 123

## THE STYLE OF SUFISTIC INTERPRETATION: A Philological Study and Content Analysis of the Manuscripts By Three Popular Ulemas in West Kalimantan

Syarif

IAIN Pontianak

Email: zsyarif99@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*This paper aims to explain the content and inclination of the interpretive thoughts of the Sufi scholars in the Province of West Kalimantan. Among the Sufi scholars most popular in West Kalimantan in the 19th century and 20 were Ahmad Khatib al-Sambasi (1802-1879 AD), Muhammad Imran Basuni (1885-1953 AD) and Isma'il Mundu (1870-1957 AD). The works produced by these scholars are still in the form of manuscripts as the objects of study in this paper. This is a library research with philological and historical approaches. There are several stages in philological research including inventory, description of manuscripts, transfer of script and transfer of language. To support those four phases of philological research, the researcher employs content analysis in doing further exploration to the manuscripts. Very surprising, specific findings are presented. First, there are fifteen interpretations in the manuscript of Fathu Al-'Arifin and eight in the Bidayatu Al-Tauhid Fi Ilmi Al-Tauhid. While in Mukhtasar Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman, the contents of the interpretation are not found. Secondly, the patterns of interpretive thoughts used by Ahmad Khatib al-Sambasi and Muhammad Basuni bin Muhammad Imran contained in Fathu Al-'Arifin and Bidayatu Al-Tauhid Fi Ilmi Al-Tauhid are of sufistic interpretation using the tahlili method. Whereas the thought pattern of Ismail Mundu's interpretation in Mukhtasar Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman cannot be found. It is because the 20-pages manuscript consists of a summary that discusses the science of tawheed and Ismail Mundu did not quote any verses of the Qur'an in the manuscript.*

**Keywords:** Style, Sufistic, Interpretation, Manuscript, Scholars: West Kalimantan.

### INTRODUCTION

The way Islam was introduced to the Indonesian archipelago is different from that in several Middle Eastern Countries. The spread of Islam in Indonesia was by peaceful means. One of the ways was the use of the Sufistic approach. According to Hawash Abdullah (1930: 10), it was precisely these Sufi scholars who had the most influence on the rapid growth of Islam in Indonesia.

Abdullah gave an example of Sufi figures such as Sheikh Abdullah Arif who spread Islam for the first time in Aceh in the 12th century. In the province of West Kalimantan, the famous Sufi ulema well known for the *Qodiriyah wa Naqsyabandiyah Tareqat* was Ahmad Khatib al-Sambasi. To find out the role and contribution of the Sufi scholars, it can be seen the works produced by them, which are still in the form of manuncripts. The previous scholarly works are among the archipelago's priceless scientific treasures. The thought of these scholars, for the most part, are still in the form of manuscripts on various popular media at the time, such as palm leaves and animal skins (Rasidin, 2007). Based on the data contained in the Appendix to the Decree of the Director General of Islamic Education No. 7177 of 2017 concerning Technical Guidance for the 2018 Fiscal Year Research Program Assistance, Indonesia has hundreds of thousands of ancient manuscripts written by Indonesian scholars since the 17th century. At present, more than 26,000 are kept at the Leiden University, while in the National Library it is currently around 10,300. This number does not include manuscripts that are held individually by heirs and those in the palace library in Surakarta, Jogjakarta, as well as in West Kalimantan.

According to Faizal Amin (2012; 2014), the potential of ancient manuscripts in West Kalimantan, especially in Pontianak City is quite numerous and varied, although most of the ancient manuscripts originated from outside Pontianak. However, the potential for studies of ancient manuscripts has not been fully utilized by researchers and reviewers in West Kalimantan. In fact, West Kalimantan is one of the provinces in which some Islamic kingdoms (such as the Tanjung Pura Kingdom, Pontianak Kingdom, Mempawah Kingdom, Sambas Kingdom, Kubu Kingdom) produced several manuscripts written by scholars who lived during the period of the kingdom. As explained earlier, Islamic scholars in West Kalimantan spread religion more with the approach of Sufism. The result is that there are a number of ulema's works in West Kalimantan expressing their thoughts on monotheism in the form of written works which have now become manuncripts or ancient texts (Patmawati & Wahida, 2018) Among the scholars in West Kalimantan who wrote about monotheism were Ismail Mundu (*Mukhtashar Al-Mannan 'ala Al-Aqidah Ar-Rahman*), Sheikh Ahmad Khatib Sambas and Muhammad Basiuni Imran (*Bidayah al-Tawhid fi al-Tawhid* and *Durus al-Tawhid*), H. Muh. Shaleh and H. Khairuddin (*Tahshilu al-Maram li Bayani Manzhumati 'Aqidati al-Awam*), Abdul Malik Bin Haji Abu Bakar Krui), etc. (Hermansyah, et al., 2012: 63). The manuscripts are well preserved in the palace, the royal family and in the homes of the people scattered in West Kalimantan.

In producing the works in the form of the manuscripts, the scholars in West Kalimantan refer to the Qur'an as the main source in the teachings of Islam. One of the goals of the Qur'an's revelation is to be the guidance about the teachings of faith and belief in the Oneness of God (science of monotheism). To understand the verses of the Qur'an about the science of monotheism comprehensively, there is a need for the science of interpretation which aims to uncover the verses of the Qur'an which are general and vague in terms of the meaning. This is the importance of the interpretation of the Qur'an. M. Quraish Shihab (1992: 125) argued that understanding of the verses of the Qur'an through its interpretation has a very significant role for the progress of the people. At the same time, this interpretation can reflect the development and pattern of thought of the commentators. An example of the influence of interpretation in the manuscript of monotheism by West Kalimantan scholars can be seen in the manuscript of H. Muh. Shaleh and H. Khairuddin (1271 AD) entitled "*Tahshilu al-Maram li Bayani Manzhumati*" *Aqidati al-'Awam*" (Hermansyah, et al., 2012: 63). On page 14 of the text quoting the word of Allah (QS. Al-Furqan [25]: 1).

H. Muh. Shaleh and H. Khairuddin in the text interpreted the *dhomir* (pronoun) "hu" in that verse to be Prophet Muhammad. The quote of the text in the manuscript is as follows, "*The Most Holy is our Lord who sent down the furqon of His servant namely our Prophet Muhammad s.a.w that he is to the worlds a warner to all creatures.*" This is an example of one of the interpretive approaches used by the ulema in West Kalimantan found in the manuscript of monotheism, in this case the manuscript of *Tahshilu al-Maram li Bayani Manzhumati 'Aqidati al-'Awam* (1271 AD). There are still several more manuscripts of monotheism by the scholars of West Kalimantan who used the interpretive approach. A study conducted by Didik M. Nur Haris and Rahimin Affandi Abdul Rahim (2017: 41) revealed that there were three most popular Sufi scholars in West Kalimantan Province in the 19th and 20th centuries, Ahmad Khatib al-Sambasi (1802-1879 M) with his work entitled *Fathu Al-'Arifin*, Muhammad Basuni bin Muhammad Imran (1885-1953 AD) with his work *Bidayatu Al-Tauhid Fi Ilmi Al-Tauhid*, and Guru Haji Isma'il Mundu (1870-1957 M), with his work *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman*. The three manuscripts are objects of study in this library research with philological and historical approaches. There are several stages in philological research, namely inventory, description of manuscripts, transfer of script, and transfer of language. After conducting the four phases of philological research above, the manuscript is then analyzed using content analysis.

There should be more studies on manuscripts as they provide information about community traditions in the past that cover inter-discipline studies, which in this case the research is entitled the influence of interpretation on manuscripts of monotheism: a philological study and content analysis of ulemas' works in West Kalimantan. Based on the background previously explained, the focus in this work is a study on manuscripts by the scholars in West Kalimantan which are rarely addressed by researchers. This work is found important for some reasons. It is a unique and specific due to the objects of the work are originated from West Kalimantan that is still little known for Islamic manuscript studies. It is also noted that Islamic Sufism has been found influential in the region that needs further studies.

### STUDY OF INTERPRETATION IN *FATHU AL-'ARIFIN*

Shaikh Ahmad Khatib Sambas was an ulama who founded the *Qadiriyyah Wa Naqsabandiyah* Tareqat, which is a merger between two tareqats namely the Qadiriyyah Tareqat and the Naqsabandiyah Tareqat. Khatib Sambas was born in Kampung Dagang of Sambas Regency of West Kalimantan in 1803 AD or Shafar 1217 AH and died in 1875 AD in Mecca. His full name was Ahmad Khatib bin Abd al-Ghaffar al-Sambasi al-Jawi. His father was Abdul Ghaffar ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Jalaluddin. Khatib Sambas was born from a migrant family from Sange' Village (Wawan Nurkholim, 2017: 16). In his childhood, he was surrounded by pious people, so he spent much of his childhood until his teenage years studying religious sciences. Among his teachers were Muhammad Arsyad Al-Banjari, Daud Al-Fatani and Abdul Shamad Al-Palimbani. Khatib Sambas then continued his studies in Mecca to improve his religious knowledge. In Mecca, he succeeded in combining the two tareqat teachings (Qadiriyyah Tareqat and Naqsabandiyah Tareqat) and becoming the first Caliph of the Qadiriyyah wa Naqsabandiyah (Muhammad Zulkham Effendi & Asep Yudha Wirajaya, 2019: 213). In Java, the Qadiriyyah wa Naqsabandiyah Tareqat had five centers in spreading its teachings, namely Tebuireng Islamic Boarding School and Rejoso Islamic Boarding School in Jombang, Mranggen Islamic Boarding School in Semarang, Suryalaya Islamic Boarding School in Tasikmalaya, and Pegentongan Islamic Boarding School in Bogor (Firdaus, 2017: 206).

Khatib Sambas did not write a book, but his two faithful students recorded the traces of his teachings in short minutes in the Malay language. One of the books written by his students related to monotheism is "*Fathul 'Arifin*." Based on the record of Bruinessen (1992: 90), this book is considered the most accountable work on the tareqat (authoritative). This work describes *bai'at*,

*dhikr*, and other worship techniques, both from the Qadiriyyah Tareqat and the Naqsabandiyah Tareqat. While the fourteen-page manuscript is concluded with a pedigree of Ahmad Khatib Sambas (Kharisudin Aqib, 1997: 54). The contents of the interpretation in the book of *Fathu Al-'Arifin* are on pages seven to eleven using fifteen of the surahs in the Qur'an to describe the *bai'at*, *dhikr*, and techniques of worship of the Qadiriyyah and the Naqsabandiyah Tareqat. The fifteen verses are Surah Al-Ikhlâs verse 1, Surah Al-Hâdiid verse 4, Surah Qaaf verse 16, Surah Al-Maidah verse 54, Surah Al-Hadid verse 3, Surah Al-Ahqaf verse 35, Surah Al-Nisaa 'verse 125, Surah Taha verse 39, Surah Ali Imran verse 144, Surah As-Shaff verse 6, Surah Al-Baqarah verse 165, Surah Asy-Syura verse 11, Surah Al-Baqarah verse 23, Surah Al-Nisaa 'verse 103, and Surah Adz-Dzariyat verse 56.

On the seventh page (1317 H) in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 7) uses Surah Al-Ikhlâs verse 1 to explain the following:

*The One Dzat of God that is of infinite perfection and purity, half of which are the twenty essential attributes (and) He is most holy than all the attributes of infinite reproach and deficiency half of which are twenty impossible attributes of which the opposite are the twenty essential attributes, and we await the abundant favors of God the Most Great and Most Glorious of all jihat or six directions which are above, below, right, left, front and back, which are half of what must be sure.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 7) uses Surah al-hadid verse 4 to explain the following:

*And when (we) reach jam'iyah that is eternal motion of remembrance and all worries disappear for at least four hours, then (we) also move with the instruction of the teacher to (muroqobah al-ma'iyah) namely the heart is determined to be in the sight of God who is with us from each juz namely our tribes and with God are our hearing, sight, speech, feelings and tongue and smell which we still do not know about their behavior and how their kaifiyah is, but Allah is most knowing.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas uses Surah Qaaf verse 16. Khatib Sambas (1317 H: 7) to explain the following:

*And we remind the atsar that He created man like us and created all the animals that creep on the earth and that fly in the clouds and all the animals in the sea, and also remind the world of ash-showi, namely the world above and seven layers of the sky and all the smoke in it like the moon and the sun and stars and clouds, then we remind as-sufli world which means the world below and the creation of the sea, land, mountains and clay as well as wood and stone and all plants.*

On the eighth page in the manuscript, Khatib Sambas uses Surah Al-Maidah verse 54 to explain the following:



*(And) the call of lathifatun nafsi then moves also with the permission of the shaykh to (muroqobah al-mahabbati fi al-quwsi) namely determination to love God to be merciful to half of the region, namely to the dzat of our Lord who loves us and we love Him as for the evidence is the three muroqobah.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 8) uses Surah Al-Hadid verse 3 to explain the following:

*The call of lathifatun nafsi then this determination is called the region of al-'ulya that is moving also with the permission of the shaykh to (muroqobatu wilayatil 'ulya) love God who created the al-ulya region that is determination to the dzat of our Lord who created the angelic region which is the inner command which called itself at that time with mind.*

On the ninth page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 9) uses Surah Al-hadid verse 3 to explain the following:

*Anasiru al-arba'ati that is the wind-water-earth-fire biwasithoti al-masyekh'alaihimu ar-rahmah then moving also with the permission of the shaykh to (muroqobatu kamalaati ulil azmi) that is determination to the dzat of our Lord who makes things perfect of ulul azmi perfection of the kamalatun nubuwwah and kamalatur risalah.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 9) uses Surah An-Nisa' verse 125 to explain the following:

*Then moving also with the permission of the shaykh to (muroqobatu al-mahabbati fi dairatil khillah) that is to love God in standing place of love namely determination to the dzat of our Lord that made Sayyidina Ibrahim as his intimate friend.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 9) uses Surah Taha verse 39 to explain the following:

*Then moving also with the permission of the shaykh to (muroqobatu dairoti al-mahabbati ash-shorfati hiya of sayyidina musa), namely determination to the dzat of our Lord who pours out His mercy that is to bestow love upon Sayyidina Musa.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 9) uses Surah Ali Imran verse 144 to explain the following:

*Then moving also with the permission of the shaykh to (muroqobatu adz-dzatiyah al-mumtarijati bil mahbubiyati wa hiya haqiqotul muhammadiyah) namely determination to dzat of our Lord who made Muhammad His love that is the one He truly loves.*

On the tenth page of the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 10) uses Surah As-Shaff verse 6 to explain the following:

*Wal faidhu 'ala hai'ati al-wahdaniyah until finally bi washithoti al-masyekh'alaihimu ar-rahmati then moving also with the permission of the shaykh to (muroqobatul mahbubiyatis shorfati wa hiya haqiqotul*



*ahmadiyah) namely determination to the Dzat of our Lord who took Ahmad the only loved one. Namely bringing good tidings with a noble Messenger who came after me whose name is Ahmad.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 10) uses Surah Al-Baqarah verse 165 to explain the following:

*Wal faidhu 'ala hai'ati al-wahdaniyati until finally bi washithoti al-masyekh'alaihimu ar-rahmati then moving also with the permission of the sheikh to (muroqobatu al-hubbi wa ash-shorfi) namely determination to the Dzat of Lord or love of the Prophet or compassion for Angels or love for Muslims or love for something because everything is God's favors to His servants.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 10) uses Surah Asy-Shura verse 11 to explain the following:

*Then moving also with the permission of the shaykh to (muroqobatu la tu'ayyinu) namely loving the Dzat of Lord that is not visible namely determination to the Dzat of our Lord that is never to Him any equals not even angels who are muqorrobin or a prophet even though they never get to see the Dzat of our Lord because no one knows of God but God, hence this is a sign.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 10) uses Surah Al-Baqarah verse 23 to explain the following:

*Determination to the Dzat of our Lord who revealed the Qur'an unto Sayyidina Muhammad s.a.w which becomes virtue to people who recite it and the beginning of miracles with the shortest possible surah of it.*

Then on the same page in the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 10) uses Surah Al-Nisaa 'verse 103 to explain the following:

*Determination to the Dzat of our Lord who decreed prayer that is in some words and some actions begining with takbiratul ihram (and) concluded with greetings with some specified conditions.*

On the eleventh page of the manuscript, Khatib Sambas (1317 H: 11) uses Surah Adh-Dhariyat verse 56 to explain the following:

*Then it is also useful with the permission of the shaykh to (muraqabatu daeratu al-ubudiyah al-surfati) namely determination to the Dzat of our Lord whom all of His creatures worship and who specifies worship of all kasanat.*

The contents of the teachings contained in Fathu Al-rifArifin and its interpretations practiced by the followers of the Qadiriyyah wa Naqsabandiyah Tareqat have social benefits and functions. According to a study by Muhammad Zulkham Effendi & Asep Yudha Wirajaya (2019: 213-219), practicing the dhikir contained in the Book of Fathu Al-Arifin can bring a person calmness and tranquility in his heart, while the social function is positive interaction

and caring for others. With dhikr, a person, when dealing with each other, has an attitude of reliance on God, patience, humility, qana'ah, and has the ability to socialize well.

### STUDY OF TAFSIR IN *BIDAYATU AL-TAUHID FI ILMI AL-TAUHID*

The strong influence of Sufism in West Kalimantan that Ahmad Khatib al-Sambasi had brought began to shift to the notion of Islamic reform which was actually initiated from Ahmad Khatib's birthplace, i.e. Sambas, West Kalimantan. The movement was pioneered by a figure from the Maharaja Imam of the Sambas Kraton Mosque, Muhammad Basuni Imran. He was born in Sambas on 16 October 1885 (25 Dzulhijah 1302 AH) which coincided with the time of construction of the Sambas Palace Mosque. The construction was under the commission of Sultan Shafiudin II. Basuni Imran had two wives, namely Muzinah bint Imam H. Hamid and Mas Marhana (Didik M. Nur Haris and Rahimin Affandi Abd Rahim, 2017: 166). In 1901, Basuni Imran went to Mecca to perform the pilgrimage and broaden his religious knowledge informally for five years. He studied the Science of Nahwu and Shorf with Tuan Guru Umar Sumbawa and Uthman Sarawak, studied the Science of Fiqh with Sheikh Ahmad Khatib Minangkabau, studied Arabic, Mantiq, interpretation, ushul fiqh, and monotheism with Sheikh Ali Maliki. In 1910, Basuni Imran continued his studies at Al-Azhar University and Dar al-Da'wah wa al-Ershad Madrasa founded by Muhammad Rashid Rida (Didik M. Nur Haris and Rahimin Affandi Abd Rahim, 2017: 166-167).

In 1913, Basuni Imran returned to his hometown in Sambas, because his parents were seriously ill. At the same time, he was appointed by the Sultan as Maharaja Imam of the Sambas Palace Mosque. Precisely after Friday prayer on 9 November 1913, Basuni Imran was appointed by the Sultan to hold the mandate as Maharaja Imam of the Sambas Palace Mosque (Moh. Haitami Salim et al., 2011: 109-132). During his life, Basuni Imran wrote a lot of works, some have been printed and some drafts in books. According to Moh. Haitami Salim, et al. (2011: 109-132), there are fifteen works written by Basuni Imran, namely *Terjamah Durus al-Tarikh Syariat*, *Risalah Cahaya Suluh*, *Zikr al-Maulid al-Nabawi*, *Tadzkir*, *Khulashah Sirah al-Muhammadiyah*, *Nur al-Siraj fi Qissat al-Isra' wa al-Mi'raj*, *Al-Janaiz*, *Irsyad al-Gilman fi Adab Tilawat al-Quran*, *Durus al-Tawhid*, *Daw' al-Misbah fi Fakh al-Nikah*, *Al-Nusus wa al-Barahin 'ala Iqamat al-Jum'ah bimad al-Arba'in*, *Husn al-Jawab 'an Isbat al-Ahlillah bi al-Hisab*, *Manhal al-Gharibin fi Iqamat al-Jumu'ah bi dun al-'Arba'in*, *Al-Tazkirat Badi'ah fi Ahkam al-Jum'ah*, and *Bidayah al-Tawhid fi al-Tawhid*. Among the fifteen works, two are related to the science of tawheed, namely *Bidayah al-Tawhid fi al-Tawhid* and *Durus al-Tawhid*.

In this paper, only one of Basuni Imran's works in the field of tawheed is discussed, namely *Bidayah al-Tawhid fi al-Tawhid*. This book was written by Muhammad Basuni Imran on Wednesday, 13 Jumadil Awwal 1336 AH (27 March 1918 AD). This 59-page book was printed by the al-Ahmadiyah Singapore publication in the same year. This Malay-language book with Arabic Malay (Jawi) script may be Basuni Imran's first work printed in a publication (Zulkifli, 2018: 2). In its introduction, Basuni Imran explained that this book is an adaptation of several books, namely *al-Jawahir al-Kalamiyyah*, by al-Alamah Shaykh Tahir al-Jawazairi, *Kalimat al-Tawhid* by al-Alamah Shaykh Husein Waaly al-Mishry, and the book of *Kifayat al-Awwam*. Basuni Imran acknowledged that the contents of this book fully followed the contents of the books he adapted from, while the composition and systematic discussion were adjusted to the sense of the Malays (Muhammad Basuni Imran, 1918: 1).

In general, this 59-page manuscript contains six chapters supplemented with a list of errata, preface, introduction, and closing remarks. Chapter I discusses faith in Allah s.w.t; chapter II discusses faith in all angels; chapter III discusses faith in the Books of Allah s.w.t; chapter IV discusses faith in the Apostles, chapter V discusses faith in the Doomsday; chapter VI discusses faith in qadha and qadar. The contents of the interpretation contained in the book *Bidayatu Al-Tauhid Fi Ilmi Al-Tauhid* focus on eight subjects of discussion, namely Surah Yasin verse 82, Al-Baqarah verse 255, Al-Anbiya verse 22, An-Nisa' verse 164, Surah Al-Sajdah verse 11, Surah Ali Imran verse 31, Surah Al-Zalzalah verses 7-8, and Surah Al-Kawthar verse 1. Chapter I is about faith in Allah. Basuni Imran quoted four verses of the Qur'an and interpreted them, namely Surah Yasin verse 82, Al-Baqarah verse 255, Al-Anbiya verse 22, and An-Nisa' verse 164. When explaining the Attributes of Allah that are *mukholafatu lilhawadisi*, Basuni Imran quoted Surah Yasin verse 82. Basuni Imran (1918: 8) then explained Surah Yasin verse 82 as follows:

*In the case that He intends a thing, He says to it (be) you, and it is, and that He does not make something because He desires and wishes, (and) He creates it because there are purposes and wisdom because He is the Judge (delivering and putting things on the place). And the argument is that if there is no fault for all that is new, it must be like Him, but that is impossible because if He resembles something of all that is new, He is the new Holy, but with His new state, (it) is impossible.*

In explaining the Attributes of Allah that are *qiamuhu binafsihi*, Basuni Imran quoted Surah Al-Baqarah verse 255. Basuni Imran (1918: 8-9) then explained Surah Al-Baqarah verse 255 as follows:

*The beginning is Allah, there is God except Him who is worthy of worship but He is the one who is ever-living and sustainer (of all creations) and*

*if he does not stand alone, surely He is (new) holy but a new state is impossible because of the past evidence.*

In explaining the attribute of the Oneness of Allah, Basuni Imran (1918: 9) explains Surah Al-Anbiya verse 22 as follows:

*If there is in both (i.e in the heavens and earth) some other Gods than Allah surely have (both) the heavens and earth been ruined, there is something like the past and tafsil (hurayan) there is evidence that follows this, then this alone is sufficient for the new learners.*

In explaining the attribute of Allah that is *qiamuhu binafsihi*, Basuni Imran (1918: 12-13) explained Surah An-Nisa'verse 164 as follows:

*And has been said (responded) by Allah Ta'ala which will be as takallim (speech). So Allah removed from him the hijabun (covered) and He recited to him His word that is qodim. And had it not been by the permission of Allah Ta'ala with His kalam, He would have been like His opponents and He is lacking and that lacking nature is not pleased with Him by His creations, then how merciful is the Creator (God who creates things)? Kalam submits with the mandatory and impossible and jaiz. And whoever God wills that he understands, He gives that understanding that this is obligatory and this is impossible and this is jaiz. Namely he understands such thing.*

In chapter II, discussing faith in all angels, Basuni Imran (1918: 17) explained Surah Al-Sajdah Verse 11 as follows:

*Say, O Messenger, the angel who will take your death that is entrusted with you and in fact the One who takes your death is Allah. Izrail, he takes all the souls of all the animals and birds and others). Such is the word ahlu al-sunnah.*

In chapter IV discussing faith in the Apostles, Basuni Imran quoted Surah Ali Imran Verse 31 when explaining the difference between miracles and karomah. Basuni Imran (1918: 25) then explained Surah Ali Imran Verse 31 as follows:

*If the guardian alienates with himself and does not follow Prophet Muhammad sa.w, (he) will undoubtedly have no zahir on his hand by karomah and nor is he a guardian for rahman (Allah) but he is like a part and guardian for Satan like the goods required for such by the word of Alah Almighty, the Books to His Prophet on the rights of some peoples who think that they love Allah.*

In chapter V discussing faith in the hereafter (doomsday), Basuni Imran quoted two verses, namely Surah Al-Zalzalah Verses 7-8 and Surah Al-Kawthar verse 1. Surah Al-Zalzalah Verses 7-8 quoted by Basuni Imran when explain about reckoning. Basuni Imran (1918: 46-47) explained Surah Al-Zalzalah Verses 7-8 as follows:

*We believe that Allah s.w.t. will bring all human beings to Mahshar, He will reckon each person and He will determine the deeds that he did whether it is good or evil. And witness those who had been denied by all their disbelief, and He will make of all their genitals apparent, and their intentions are with them, and nothing for them to hide on the day of judgment.*

Surah Al-Kautsar Verse 1 was quoted by Basuni Imran when explaining about kautsar. Basuni Imran (1918: 48) then explained Surah Al-Kawthar Verse 1 as follows:

*Verily, kawthar is a river in heaven whose water is whiter than milk and sweeter than honey. Whoever drinks a mouthful of the water, he will not thirst forever. That Kawthar is bestowed by Allah s.w.t. upon our Prophet s.a.w., and He hinted it with His word.*

### **STUDY OF TAFSIR IN MUKHTASARU AL-MANNAN ALA AQIDAHTI AL-ARAHMAN**

Ismail Mundu is a leading ulema in Kubu, the Mufti of the Kingdom of Kubu and the Kubu Court Judge. He was appointed Mufti of the Kubu Kingdom during the reign of King Syarif Abbas (1900-1911 AD), the sixth King of the Kubu Kingdom. After the end of the Kubu Kingdom and the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in 1951 AD, Ismail Mundu was later appointed as Judge of the Kubu Court by Wedana Kubu Pratama (Gusti Jalma) and former Sultan of the Kubu Kingdom (Syarif Hasan Al Idrus) (Baidhillah Riyadhi, 2012 : 37). Mundu has also succeeded in rectifying and improving the religious understanding of the Kubu Raya region and its surrounding communities. There are several religious contributions made by Mundu which can be seen from the 29 works he wrote (Luqman Abdul Jabar, et al., 2013: 56). Among the 29 works, there are two texts related to tawheed, namely *Zikir Tawhidiah* and *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman*. Since *Zikir Tawhidiah* only contains dhikir, this study only describes the contents of the manuscript *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman*.

The Book of *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman* was completed in Teluk Pakedai, at 5 p.m. on Friday, 18 Rajab 1351 AH which coincides with 1929 AD. This 20-page book was printed at Matba'ah Al-Sayyid Ali Alaydrus Keramat 38 Jakarta. Generally speaking, the contents of this text are teachings about the 20 attributes which are divided into a number of attributes for Allah, namely the mandatory, impossible, and *jaiz* attributes. The next section also explains the lessons about the characteristics of the Apostles which are divided into the mandatory, impossible and *jaiz* (Luqman Abdul Jabar, et al., 2013: 143-144). As explained earlier, based on the record compiled by Abdul



Jabar, et al. (2013: 56), of the 29 works, there are two manuscripts related to tawheed, namely *Zikir Tawhidiyah* and *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman*. In the *Zikir Tawhidiyah* Manuscript, there are no Qur'anic verses quoted by Mundu in explaining his writing. This is in accordance with the title of this small manuscript printed at Matba'ah AlSayyid Ali Alaydrus Keramat 38 Jakarta. The contents of the manuscript are only in the form of *dhikr*.

The manuscript which was lithographically printed has been translated into the Malay language by H. Riva'i Abbas. The transcript of this manuscript further expanded its spread not only to Mundu's students but also to various regions and West Kalimantan. The circulation range is even wider considering that it was printed outside West Kalimantan, namely, Batavia (now Jakarta) (Luqman Abdul Jabar, et al., 2013: 112). Meanwhile, the manuscript written by Mundu entitled *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman*, after transcription, the contents are the same as *Zikir Tawhidiyah* (as explained above), that there are no verses of the Qur'an quoted in explaining his writing. The contents in the manuscript are not about *dhikr*, but about the summary of tawheed. This 20-page manuscript printed at Matba'ah Al-Sayyid Ali Alaydrus Keramat 38 Jakarta in general contains teachings about the 20 attributes which are divided into a number of attributes for Allah, namely mandatory, impossible, and *jaiz*. In the next section, lessons are also provided about the characteristics of the Messenger which are divided into mandatory, impossible and *jaiz* (Luqman Abdul Jabar, et al., 2013: 113-114).

## **SUFISTIC STYLE OF INTERPRETATION AND METHODS ON THE MANUSCRIPTS**

The Sufistic style in interpreting the verses of the Qur'an is still an interesting topic for debate. Generally speaking, there are two types of the differences among the scholars regarding whether or not to interpret the verses of the Qur'an with Sufistic patterns. First, the scholars who consider that the Sufistic interpretation style is a wrong interpretation, a lie, some people considering it to be disbelievers, and reject this interpretation style. Among these scgolars are Imam al-Thusi, Ibn Shalah, Imam al-Taftazani, Ibn Atha, Imam al-Zarkasyi, Imam al-Rafi'i, Imam al-Nasafi. Second, the scholars who consider Sufistic interpretation style to be haing the benefit of minimizing the esoteric side of the Qur'an. Imam al-Ghazali even stressed that there is no prohibition on someone interpreting the Qur'an with a Sufistic style (Badruzzaman M. Yunus, 2017: 2).

Apart from the issues mentioned above, the manuscripts of tawheed in the works of scholars in the province of West Kalimantan follow the opinions of

scholars who allow it. According to Didik M. Nur Haris and Rahimin Affandi Abdul Rahim (2017: 41), there were three of the most popular Sufi scholars in West Kalimantan Province in the 19th and 20th centuries. First, Ahmad Khatib al-Sambasi (1802-1879 AD) with his work entitled *Fathu Al-'Arifin*. Second, Muhammad Basuni ibn Muhammad Imran (1885-1953 AD) with his work, *Bidayatu Al-Tauhid Fi Ilmi Al-Tauhid*. Third, Guru Haji Isma'il Mundu (1870-1957 AD), with his work, *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman*. The three works in the form of manuscripts written by the most popular Sufi scholars in the Province of West Kalimantan are the objects of this study.

After transcribing and translating the three manuscripts written by the three Sufi scholars, it can be concluded that not all of their texts quoted, used, and interpreted the verses of the Qur'an. The verses of the Qur'an and the interpretation of the authors can be found in the manuscripts of Ahmad Khatib al-Sambasi entitled *Fathu Al-rifArifin*, and of Muhammad Basuni ibn Muhammad Imran entitled *Bidayatu Al-Tauhid Fi Ilmi Al-Tauhid*. Whereas in *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman* by Isma'il Mundu, there are no Qur'an verses and interpretation made by the author because the contents of the 20-page manuscript are only a summary of tawheed (Didik M. Nur Haris dan Rahimin Affandi Abdul Rahim, 2017: 113-114).

The style of interpretation used by Ahmad Khatib al-Sambasi and Muhammad Basuni ibn Muhammad Imran in each of the manuscripts is the Sufistic interpretation style, namely the interpretation of the verses of the Qur'an marked by differences in the explicit or obvious meaning of the verses, because there are implied guidance which can only be known by certain scholars who have been given light by Allah s.w.t. (Badruzzaman M. Yunus, 2017: 5). Khatib al-Sambasi and Basuni Imran used Sufistic style in interpreting the verses of the Qur'an to affirm their argument when discussing teachings related to tawheed. The Sufistic style of interpretation used by Khatib al-Sambasi and Basuni Imran is increasingly apparent when looking at examples of their interpretations with the method used. The method of interpretation used by Khatib Sambas and Basuni Imran is the *tahlili* which is a method of interpretation that aims to explain the content of the verses of the Qur'an from all its aspects (Al-Farmawi, 1996: 12). This method describes all aspects contained in the verses and explains the meanings included in it in accordance with the expertise and tendency of the interpreter (Nashruddin Baidan, 1998: 31).

The *tahlili* method used by Khatib Sambas is evidenced from several verses of the Qur'an used and their interpretation. For example, when Khatib al-Sambasi

explained that a final Messenger whose name is Ahmad (Muhammad) would come. Khatib Sambas (1317 H: 10) used Surah As-Shaff verse 6 to explain the following:

*Wal faidhu 'ala hai'ati al-wahdaniyah until finally bi washithoti al-masyekh'alaihimu ar-rahmati then moving also with the permission of the shaykh to (muroqobatul mahbubiyatis shorfati wa hiya haqiqotul ahmadiyah) which is determination to the Dzat of our Lord that made Ahmad the only loved one. Namely bringing good tidings of a noble Messenger who came later after me whose name is Ahmad.*

In addition, Khatib Sambas and Basuni Imran also used the *tahlili* method in interpreting the verses of the Qur'an they quoted. This is evidenced from several verses of the Qur'an quoted in the texts along with their interpretation. An example is when Basuni Imran explained about *Kawthar*. He argued that *kawthar* is a river that is in heaven. The water is whiter than milk and tastes sweeter than honey. Whoever drinks its water, he will never thirst forever. Basuni Imran supported his analysis with Surah Al-Kawthar Verse 1. Basuni Imran (1918: 48) then explained Surah Al-Kawthar Verse 1 as follows:

*Verily, kawthar is a river in heaven whose water is whiter than milk and sweeter than honey. Whoever drinks a mouthful of the water, he will not thirst forever. That Kawthar is bestowed by Allah s.w.t. upon our Prophet s.a.w., and He hinted it with His word.*

The *tahlili* interpretation method used by Khatib Sambas and Basuni Imran in each of their manuscripts was also used by other interpretive scholars. For example, the following works are written by the scholars who used the *tahlili* method of interpretation as described by Muhammad Amin Suma (2013: 380) are *Al-Jāmi li Ahkām al-Quran* by Syaikh Imam al-Qurṭūbi, *Jāmi' al-Bayānan Takwīl Ayyi al-Qur'an* by Ibn Jarīr al-Thabariy, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* by al-Hāfidz Imad al-Din Abi al-Fida Ismāil ibn Katsīr al-Quraisyi al-Danasyqi, *Al-Mīzān fi Tafsīr al-Quran* by al-'Allamah al-Sayyid Muhammad Husyan al-Thabaṭab'i. The *tahlili* method of interpreting the Qur'an has several tendencies or styles, namely *al-tafsir bi al-ma'tsur*, *al-tafsir bi al-ra'yi*, *al-tafsir al-shufi*, *al-tafsir al-fiqhi*, *al-tafsir al-falsafi*, *al-tafsir al-'ilmi*, dan *al-tafsir al-adab al-ijtima'i*. Based on the previous discussion, the thought patterns of Khatib Sambas' and Basuni Imran's interpretation in each of their manuscripts are Sufistic, more specifically the Sufi al-nazhari style of interpretation.

According to Muhammad Husain al-dzahabi, the Sufi al-nazhari style of interpretation is based on symbolic methods which are not only focused on linguistic aspects, but can also be used to support irrational theories used by Sufi experts. One of the scholars known for his Sufi al-nazhari's interpretation style is Muhyiddin ibn Arabi which is found in his books, *Futuhāt al-Makkiyah*



and *al-Fusus*. Interpretation with this style often receives criticism from scholars such as al-Zahabi, who assumed that this style only sees the inner aspect alone, and even sometimes the results reinforce the theory of Sufism which is built on linguistic rules (Lenni Lestari, 2014: 14-15).

## CONCLUSION

There are three most popular Sufi ulemas (scholars) in West Kalimantan Province who lived in the 19th and 20th centuries. The three include Ahmad Khatib al-Sambasi (1802-1879 AD) with his work entitled *Fathu Al-rifArifin*, Muhammad Basuni ibn Muhammad Imran (1885-1953 AD) with his work, *Bidayatu Al-Tauhid Fi Ilmi Al-Tauhid* and Guru Haji Isma'il Mundu (1870-1957 AD), with his work, *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman*. All the scholars have works in the form of manuscripts which are objects of study in this paper.

There are fifteen contents of interpretations contained in the manuscript of *Fathu Al-Arifin* and eight in *Bidayatu Al-Tauhid Fi Ilmi Al-Tauhid*. While in *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman*, the contents of the interpretation are not found. The style of interpretive thought used by Ahmad Khatib al-Sambasi and Muhammad Basuni ibn Muhammad Imran in *Fathu Al-rifArifin* and *Bidayatu Al-Tauhid Fi Ilmi Al-Tauhid* is a style of sufistic interpretation using the *tahlili* method. Meanwhile, Ismail Mundu's interpretive thought in *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman* cannot be found because the 20-page manuscript is merely a summary that discusses the science of tawheed and Ismail Mundu did not quote any verses of the Qur'an in his manuscript.

## BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, H., (1930). *Perkembangan Ilmu Tasawwuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Al-Farmawi. (1996). *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amin, F., (2012). "Potensi Naskah Kuno di Kalimantan Barat: Studi Awal Manuskrip Koleksi H. Abdurrahman Husin Fallugah Al-Maghfurlahu di Kota Pontianak." *Thaqâfiyyât*. Vol. 13. No. 1. Juni.
- , (2014). Religion And Harritage: The Islamic Manuscript Of The Qur'an By Abdurrahman Husin Fallugah (W.2010). *Al-Albab*, 3(2). Doi: <https://Doi.Org/10.24260/Alalbab.V3i2.766>

- Aqib, K., (1997). *Al-Hikmah Memahami Teosofi Tareqat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Baidan, N., (1998). *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bruinessen, M. V. (1992). *Tareqat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Effendi, M. Z. & Wirajaya, A. Y. (2019). "Kajian Resepsi terhadap Teks Futūhu 'L-‘Ārifīn." *Jumantara*. Vol. 10. No. 2.
- Firdaus. (2017). Tareqat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah: Implikasinya terhadap Kesalehan Sosial." *Al-Adyan*. Vol. 12. No. 2. Juli-Desember.
- Haris, D. M. N. & Rahim, R. A. A, (2017). "Akar Tradisi Politik Sufi Ulama Kalimantan Barat Abad Ke-19 dan 20." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10. No. 1.
- Haris, D. M. N. dan Rahim, R. A. A. (2017) "Pemikiran Keagamaan Muhammad Basuni Imran." *Al-Banjari*. Vol. 16. No. 2. Juli-Desember.
- Hermansyah et. al. (2012) "Penelitian Naskah Kuna "Tahshilu al-Maram li Bayani Manzhumati 'Aqidati al-'Awam" Karya H. Muh. Shaleh dan H. Khairuddin (Guru Sultan Tsafiuddin II Sambas)." *Laporan Hasil Penelitian Kelompok 2012*. STAIN Pontianak.
- Imran, M. B., (1918). *Bidayah al-Tauhid fi 'Ilm al-Tauhid*. Singapura: Mathba'ah al-Ahmadiyah.
- Jabar, L. A. et. al. (2013). *Sejarah Kerajaan Kubu*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7177 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018.
- Lestari, L., (2014). "Epistemologi Corak Tafsir Sifistik." *Jurnal Syhadah*. Vol. 2. No. 1. April.
- Mundu, I., (1375 H). *Mukhtasaru Al-Mannan Ala Aqidahti Al-Arahman*. Jakarta: Matba'ah Al-Sayyid Ali Alaydrus.
- Nurkholim, W., (2017) "Syaikh Ahmad Khatib Sambas: Pendiri Tareqat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (1803-1875 M)." *Skripsi tidak diterbitkan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Patmawati, P., & Wahida, B. (2018). The Concept of Tawheed of Buginese People in the Ancient Manuscript Lontara Attorioloang Ri Wajo of West

- Kalimantan. *Al-Albab*, 7(2), 177-186. doi:<https://doi.org/10.24260/alalbab.v7i2.1115>
- Rasidin. (2007) "Paham Keagamaan K.H. Muhammad Zein ibn Abdul Rauf (Kajian Filologis Naskah Kitab Kurratu Al-'Ain Al-Fard Al-'Ain)." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan (Kontekstualita)*. Vol. 22. No. 2. Desember.
- Riyadhi, B., (2012). *Guru Haji Ismail Mundu (Ulama Legendaris dari Kerajaan Kubu)*. Cet. 2. Kubu Raya: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya.
- Salim, M. H. et. al. (2011). *Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan RI.
- Sambasi, A.K., (1317 H). *Fath al-'Arifin*. Mekkah: Percetakan di Mekkah.
- Shibab, M. Q., (1992) *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi, dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Suma, M. A., (2013). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yunus, B. M. (2017) "Pendekatan Sufistik dalam Menafsirkan Al-Quran." *Syifa Al-Qulub*. Vol. 2. No. 1. Juni.
- Zulkifli. (2018). "Pemikiran Teologi Maharaja Imam Sambas Haji Mohamad Basioeni Imran (1885-1976)." *Konferensi Antarabangsa Islam Borneo (KAIB) ke-11*.





# Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jpkk>

## KAUM AL-HADRAMAUT DAN PENYEBARAN ISLAM DI KALIMANTAN BARAT

### THE HADRAMAUTS IN THE SPREAD OF ISLAM IN WEST KALIMANTAN

**AUTHOR:**

1. Patmawati
2. Fitri Kusumayanti

**AFFILIATION:**

IAIN Pontianak

**CORRESPONDING:**

[fwati1874@gmail.com](mailto:fwati1874@gmail.com)

**PUBLISHED:**

30 April 2023

**ABSTRAK:**

*Artikel ini bertujuan mendeskripsikan diaspora Kaum Hadramaut dalam penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, diaspora kaum al-Hadramaut didasari faktor politik, ekonomi, dan dakwah. Terutama sejak kematian Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir khulafaur rasyidin, terutama tekanan politik Bani Umayyah, berikut Bani Abbasiyah terhadap hak politik Bani Hasyim. Menjadikan Bani Hasyim meninggalkan Hijaz menuju Yaman sebagai pedagang sekaligus dai hingga ke wilayah Kalimantan Barat. Kedua, Berdakwah melalui pendekatan kultural dan struktural sehingga mencipta lahirnya berbagai kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan lainnya. Ketiga, posisinya sebagai pemimpin formal dan informal, serta lekat dengan daya kepengikutan hingga melahirkan kerajaan Kubu dan kerajaan Pontianak.*

**KATA KUNCI:**

Kaum Al-Hadramaut, Diaspora, Penyebaran Islam, Kalimantan Barat

**ABSTRACT:**

*The article aims to describe the diaspora of the Hadramauts in the spread of Islam in West Kalimantan. The research uses a qualitative approach with data collection through observation, interviews, and documentation. The research results show: First, the diaspora of the al-Hadramaut people was based on political, economic, and da'wah factors. Especially since the death of Ali bin Abi Thalib as the last caliph of Khulafaur Rasyidin, especially the political pressure of Bani Umayyah, following Bani Abbasiyah on the political rights of Bani Hasyim. Making Bani Hasyim leave Hijaz for Yaman as a trader and preacher in the West Kalimantan region. Second, preaching through cultural and structural approaches that created the birth of various Islamic kingdoms in Sumatra, Java, Sulawesi, Kalimantan, Maluku and others. Third, his position as a formal and informal leader, as well as being attached to the power of following to give birth to the Kubu kingdom and the Pontianak Kingdom.*

**KEYWORD:**

The Al-Hadramaut, Diaspora, Spread of Islam, West Kalimantan.

**PENDAHULUAN**

Gustav Lebon dalam Ibrahim (2001: 1) menyatakan “Bahwa kami tidak melihat adanya suatu bangsa yang mempunyai pengaruh yang nyata seperti bangsa Arab...’ para syarif dari Hadramaut yang menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sangat terbuka dalam menjalin hubungan dengan dunia luar, menyebabkan penduduk di wilayah pesisir pantai Barat dan Selatan telah banyak menerima pengaruh kebudayaan luar. Penemuan arkeologi di Sambas, misalnya, menunjukkan bahwa agama Hindu pernah mendominasi kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah tersebut, sebelum, beralih menjadi kerajaan Islam. Namun, para peneliti sejarah di Nusantara belum menaruh perhatian penuh terhadap wilayah Kalimantan Barat sebagai bagian dari sejarah peradaban bangsa Indonesia (Aju & Zainuddin, 2013: v)

Peneliti mengalami kesukaran dalam mendalami mengenai penyebar Islam di Kalimantan Barat, karena kurangnya dokumen tertulis. Namun, menelusuri diaspora kaum al-Hadramaut di wilayah ini masih bisa dirunut karena: pertama, mereka menjadi penguasa atau berdakwah secara politik (top-down) dan adanya peninggalan dalam bentuk kerajaan, yang dibuktikan dengan adanya keraton, masjid dan makam serta karya-karya mereka. Kerajaan yang didirikan oleh al-Hadramaut di Kalimantan Barat yakni kerajaan Kubu (Jabbar, 2013: 18) dan kerajaan Pontianak (Usman, 2016: 20).

Kedua, beberapa dokumen tertulis yang masih dipegang dan disimpan di Musium dan Balai Kajian Sejarah Kalimantan Barat dan dokumen pribadi yang masih dimiliki keturunan dan murid mereka.

Latar belakang diaspora kaum al-Hadramaut bukan semata-mata faktor ekonomi, tetapi mereka mengalami persoalan politik di wilayah asal mereka. Setelah mengalami pergolakan politik dan termarginalkan, mereka mengambil peran sebagai penyebar Islam atau dai di segala penjuru termasuk Kalimantan Barat bagian dari pulau Borneo. Diaspora kaum al-Hadramaut di Kalimantan Barat dapat dilihat dalam penyebaran mereka di wilayah pesisir mulai dari Landak, Matan, Sambas, Mempawah, Kubu, Pontianak dan lain-lain. Daerah-daerah pesisir inilah yang pertama mendapat pengaruh dan masuk Islam.

Konversi agama yang terjadi pada masyarakat setempat dapat dilihat dalam dua jalur yakni, kaum setempat menjalin hubungan dagang dengan kaum al-Hadramaut, para pedagang biasanya dari kalangan atas, sehingga lumrah apabila terjadi konversi agama pada kalangan istana, karena raja kadang adalah pemilik modal atau pemilik pasukan dagang dengan kapal-kapal yang bermuatan barang dagangan. Berikutnya kaum al-Hadramaut menjadi pemukim tetap di suatu kerajaan, dan melakukan perkawinan dengan perempuan lokal, baik dari kalangan istana, tokoh masyarakat dan lain-lain.

Gelar seperti syarif atau syech yang melekat pada sebagian diaspora kaum al-Hadramaut membawa pengaruh besar di kalangan raja-raja, selain keunggulan ekonomi, mereka memiliki karamah yang pengaruhnya melebihi faktor ekonomi. Gelar ini pula yang membuat mereka sangat mudah menjadi patron dan klien mereka kebanyakan pedagang Arab yang notabene menguasi ekonomi dan memudahkan mereka memegang peran penting dalam dunia politik, bahkan sampai mendirikan kerajaan.

Kemampuan mereka masuk ke dalam kalangan istana dan keberhasilan mendirikan kerajaan dapat ditelusuri melalui naskah-naskah yang tersebar baik di musium, perpustakaan maupun milik pribadi masyarakat. Kaum al-Hadramaut bukan saja kokoh dalam bidang ekonomi tetapi dalam penulisan naskah. Beberapa naskah ada yang sudah dicetak baik di Batavia, Semarang, Kuala Lumpur dan lain-lain. Percetakan tersebut milik kaum al-Hadramaut yang tersebar di seluruh Asia Tenggara.

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan mengungkap sejarah kaum al-Hadramaut di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Pada metode penelitian sejarah melalui empat tahapan penting, yakni: *Pertama*, *heuristic*, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau pengumpulan sumber, *kedua*, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber, *ketiga*, sistesis dari

fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber, dan *keempat*, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis (Gottschalk, 1985: 32., Kuntowijoyo, 1999 : 89).

Pengumpulan sumber telah dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan pada Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Perpustakaan IAIN Pontianak, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, dan lain-lain untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan sumber dan bahan tertulis tentang keadaan masyarakat digunakan sumber wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah penduduk yang sezaman dengan kajian ini.

Informan kunci (*key informant*) seperti; tokoh masyarakat. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak pemerintah, seperti; kepala desa, camat, dan sebagainya. Hasil wawancara tersebut dilakukan pengujian data. Pengujian data dilakukan dengan wawancara silang guna mendapatkan data yang orisinal. Tahap kedua, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik eksteren dan intern. Kritik ekstern ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (otentisitas sumber) sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (kredibilitas sumber). Tahapan ini, melakukan kritik terhadap pendapat yang berbeda baik melalui tulisan sejarawan ataupun sumber lisan berupa wawancara antara pencerita yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga melakukan studi komparatif melalui arsip-arsip tertulis, foto-foto atau lukisan masa lampau lewat benda-benda peninggalan sejarah. Pada tahap ketiga dalam hal ini adalah interpretasi dalam arti merangkaikan fakta-fakta lainnya menjadi suatu kesatuan pengertian. Pada akhirnya fakta sejarah yang telah mempunyai makna tersebut dituliskan secara integral dalam suatu cerita sejarah. Tentu saja fakta sejarah yang sesuai dan ada relevannya dengan topik yang dibahas. Disamping itu juga tulisan-tulisan tangan pertama yang tersebar dibanyak majalah dan penerbitan berkala sangat membantu penulis dalam pengerjaan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, daftar kepustakaan dibelakang dapat melengkapi informasi tentang sumber-sumber yang dipergunakan dalam rangka penelitian ini. Akhirnya tentu saja tetap disadari bahwa semua sumber yang dapat dijangkau masih jauh dari sempurna. Untuk penyempurnaan nantinya, kiranya sumber lisan sangat membantu. Hal tersebut didukung oleh beberapa informan yang masih hidup sampai sekarang ini.

Analisis data dilakukan dengan interpretasi dan refleksi kritis. Interpretasi digunakan untuk memahami peristiwa sejarah yang berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya diaspora di kalangan Hadramaut, pendekatan mereka dalam penyebaran Islam serta pengaruh ulama dan pemimpin kaum al Hadramaut dalam masyarakat Kalimantan Barat. Sedangkan refleksi kritis digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari diasporan kaum al-Hadramaut. Dengan mengetahui



kelebihan dan kekurangan ini, kelebihanannya dapat dijadikan ibrah dalam membangun masyarakat Kalimantan Barat sedangkan mengetahui kelemahannya untuk mencari problem solving dalam menghadapi masalah kemanusiaan kontemporer, khususnya di Kalimantan Barat.

## **PENDEKATAN DAKWAH AL HADRAMAUT**

### **Pendekatan Dakwah Kultural**

Dakwah kultural adalah dakwah yang menggunakan pendekatan kultural. Dakwah yang bersifat akomodatif terhadap nilai budaya tertentu secara inovatif dan kreatif tanpa menghilangkan aspek substansial keagamaan. Dakwah yang menekankan pentingnya kearifan dalam memahami kebudayaan komunitas tertentu sebagai objek dakwah.

Dakwah kultural adalah dakwah yang bersifat bottom-up dengan melakukan pemberdayaan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai spesifik yang dimiliki sasaran dakwah, antara lain dengan metode: tabligh (komunikasi penyiaran Islam), yang meliputi khitabah, kitabah, dan i'lam. Irsyad (bimbingan konseling Islam) yang meliputi konseling individu dan konseling kelompok (Sukayat, 2015: 37).

Muhammad Shulton dalam Sukayat (2015: 110) mengatakan bahwa dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. Islam kultural adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrin yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara.

Penyebarnya Islam Nusantara termasuk di Kalimantan Barat, khusus kaum al-Hadramaut telah melakukan akomodasi yang kuat terhadap tradisi masyarakat setempat. Islam adalah agama yang selalu membawa persahabatan terhadap mad'u dan memainkan peran penting dalam transformasi kebudayaan.

Islam menerima dan mengakomodir serta memodifikasi tradisi dengan budaya baru yang dipengaruhi ajaran Islam, sehingga masyarakat menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, keberadaan Islam di Nusantara khususnya Kalimantan Barat membawa pencerahan, bukan hanya dari segi keyakinan tetapi merasuk dalam dunia intelektual.

Banyak karya yang ditulis ulama (Hadramaut, Bugis, Melayu dan lain-lain) Kalimantan Barat, hanya saja belum terpublikasi secara luas. Hal ini dapat dipahami karena wilayah Kalimantan Barat pernah terjadi penyungkupan dimana ulama, kaum intelektual, raja, pengusaha dan lain-lain menjadi korban keganasan penjajah Jepang. Sebagian karya tersebut sudah disebutkan di bagian pendahuluan. (Patmawati dan Zakirman, 2018).

Bangsawan, agamawan dan pedagang menaruh perhatian terhadap penyebaran agama Islam melalui literasi. Dalam bentuk literasi Kalimantan Barat memiliki banyak naskah yang tersimpan pada pecinta naskah, masyarakat kebanyakan, murid dari alim

ulama penulis naskah, keturunan penulis naskah dan lain-lain. Hanya saja keberadaan naskah di Kalimantan Barat belum tersimpan secara rapi sebagaimana naskah-naskah yang dimiliki kerajaan Aceh. Hal ini terjadi karena luasnya wilayah Kalimantan Barat dan sebagian kerajaan tidak memiliki lagi istana bagaikan kerajaan yang hilang.

Penduduk Kalimantan Barat adalah Melayu dan Dayak, selain itu ada Bugis, Jawa dan lain-lain. Komunitas ini menciptakan keragaman. Keberagaman penduduk mempengaruhi dunia pernaskahan di Kalimantan Barat. Ada yang menggunakan bahasa setempat (Melayu), bahasa Arab, Bugis dan lain-lain. Aksara yang dipergunakan juga beragam, yakni Arab, Melayu dan Bugis. Bahkan terdapat naskah yang menggunakan aksara Arab-Melayu dengan bahasa Bugis. Ini menandakan bahwa para diaspora menyesuaikan diri dengan aksara setempat. Selain itu, bahasa dan aksara Melayu pada masanya merupakan bahasa perdagangan, dakwah dan politik.

Tradisi tulis menulis sejalan dengan kemajuan penyebaran Islam, argumen ini diperkuat dengan naskah-naskah yang ditemukan, membahas persoalan-persoalan agama seperti: tarekat, ibadah, muamalah/fiqh, sejarah dan pendidikan bahkan surat tanah yang berstempel kerajaan Turki Utsmani ditemukan di Banjar Serasan Kota Pontianak dengan aksara Arab dan Bugis. Ini menandakan bahwa Kalimantan Barat sudah terlibat dalam jaringan ulama Timur Tengah.

Karya-karya yang ditulis ulama Hadramaut yang berada di Kalimantan Barat di antaranya: Pertama, Nasihat Zaman ditulis Syarif Saleh ibn Idris Alaydrus (raja ke-8 kerajaan Kubu, Korban penyungkupan Jepang yang dikenal dengan nama Korban Mandor), Setelah memaparkan mukaddimah pengarang mengemukakan beberapa pasal dan menutupnya dengan doa dan shalawat. Kitab Nasihat Zaman terdiri dari 5 pasal yang meliputi pasal kesatu tentang kewajiban manusia mengenal Baik-Jahat, Halal-Haram dan Tuhan-Hamba. Pasal kedua meliputi: kebaikan bagi manusia yaitu: ingat dan takut, rajin mengerjakan agama dengan hati yang lurus, rajin mencari nafkah. Pasal ketiga, nasehat untuk anak. Pasal keempat takut dan pasal kelima berani.

Kedua, Safinat al-Naja fi Ilmi Fiqh penulis Syeikh Salim bin Samir Hadhrami, Penerjemah: Haji Muhammad Nashir bin Haji Muhammad Shalih Krukut Betawi. Pembahasan awal kitab ini, pengarang menyebutkan terlebih dahulu tentang rukun islam, rukun iman dan makna laa ilaha illallah. Lalu pengarang masuk menjelaskan persoalan-persoalan fiqh dengan dimulai dengan pembahasan tanda-tanda baligh, istinja, wudhu, mandi, tayamum, najis, shalat, khutbah jumat, shalat jenazah, zakat dan puasa ramadan. di penghujung kitab ditutup dengan fihris atau daftar isi.

Ketiga, al-Tauhid Sifat Dua Puluh pengarang Utsman ibn Abdullah bin Aqil ibn Yahya al-Alawi al-Husain. Kitab berbahasa melayu ini, berbicara tentang rukun islam dan rukun iman. Di dalam kitab ini juga disebutkan tentang hukum akal, hukum syar'i

dan hukum adat. Lalu penjelasan tentang sifat dua puluh dengan terperinci semua pembahasan tersebut dilengkapi dengan tabel-tabel yang ringkas dan mudah dipahami.

Keempat, Bintang Dua Belas. Pengarang Abi Ma'syar al-Maliki. Penerjemah Abu Abdul Qadir. Gambaran isi, berbicara tentang mantra-mantra, jimat-jimat, dan panduan-panduan tentang hari-hari dan waktu-waktu.

Selain dalam bidang literasi, para dai al-Hadramaut melakukan negoisasi yakni proses menafsirkan diri dan sesuatu yang hadir untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dalam konteks kultural, para dai al-Hadramaut memiliki kemampuan bernegosiasi dengan masyarakat setempat. Habib Husein al-Qadry sewaktu sampai di kerajaan Matan Tanjungpura, diajak oleh seorang ulama yang bergelar Janggut Merah menghadiri jamuan makan di istana. Salah satu kebiasaan orang Melayu adalah menyirih. Pada saat jamuan sudah tersedia dan undangan akan menyantap hidangan. Tuan Janggut Merah menyaksikan ada wadah sirih yang bergambar ular, dia lantas memecahkan wadah tersebut. Sang Raja malu dan marah tetapi tidak diungkapkan karena Tuan Janggut Merah terkenal orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Habib Husein mengambil wadah tersebut dan merekatkannya kembali dengan air liurnya. Kejadian tersebut membawa simpati dan raja sangat menyukai dakwah yang dilakukan Habib Husein, bahkan dia diangkat menjadi mufti kerajaan Matan, dan menikah dengan keluarga istana bernama Nyai Tua. Nyai Tua adalah ibu dari Syarif Abdurrahman al-Qadri pendiri kerajaan Pontianak.

Habib Husein merupakan seorang ulama yang berjasa besar dalam dakwah di Kalimantan Barat. Dia memulai penyebaran dakwahnya dari Matan. Sebagai mufti dia melaksanakan fungsinya dalam memutuskan persoalan agama yang dihadapi masyarakat, Habib Husein boleh dikata memiliki kepemimpinan dakwah, yakni suatu sifat atau sikap yang dimiliki oleh Habib Husein dalam menyampaikan dakwah sebagai dai yang mendukung fungsinya untuk menghadapi publik dalam berbagai situasi. Habib Husein dengan sifat dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai pemimpin masyarakat.

Dari Matan kemudian beliau berpindah ke kerajaan Mempawah atas undangan Opu daeng Manambon. Kepindahan Habib Husein al-Qadri ke Mempawah juga dipicu oleh keputusan dia atas hukuman nakhoda Akhmad, dimana Habib Husein meminta dia memohon maaf dan membayar segala denda serta meninggalkan Matan; tetapi di tengah perjalanan nakhoda Akhmad malah dibunuh atas perintah raja. Peristiwa ini sangat mengecewakan bagi Habib Husein sebagai mufti kerajaan Matan, sehingga tidak menolak lagi undangan dari Opu daeng Manambon.

Keberanian Habib Husein dalam mengambil tindakan terhadap kelakuan raja yang menentang keputusannya, memperlihatkan bahwa dia hanya takut kepada Allah dan akhirat. Hanya keimanan yang kuat mampu mengantarkan seseorang kepada kekuatan,

kebebasan, dan kekuasaan dari godaan-godaan materi, hawa nafsu yang melenakan, dan mengharuskan dia untuk selalu mengintrospeksi diri secara teliti dan konsisten di jalan kebenaran (Audina, 2018).

Keberadaan Habib Husein di Mempawah membuat para pedagang Arab ikut meramaikan kerajaan tersebut. Sehingga Mempawah menjadi kerajaan yang ramai dari segi perdagangan dan juga pengembangan agama. Sampai sekarang, bekas para pedagang sekaligus penuntut ilmu menambatkan perahu mereka masih ada dengan sebutan Galah Herang.

Dakwah kultural juga dilakukan dalam penyebaran ilmu fiqh dan tasawuf, Syeikh Achmad Fallugah, dia menjadi menteri di kerajaan Kubu pada masa pemerintahan Syarif Saleh. Dalam dunia pendidikan, dibangun madrasah yang dikelola oleh Syarif Abdullah. Islamisasi melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, mendapat pendidikan agama. Pendidikan yang diterapkan adalah menanamkan kebiasaan, sehingga membentuk tabiat. Tabiat melahirkan tingkah laku yang islami.

Salah satu peran penting pesantren dalam keilmuan Islam di Kalimantan Barat adalah sebagai wadah dari proses islamisasi melalui jalur pendidikan. Di pondok pesantren para murid mukim dalam jangka waktu tertentu sampai mendapatkan ijazah dari kyai mereka. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing kemudian berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam, bahkan di antara murid tersebut kadang terdapat anak bangsawan atau raja seperti Raja Anom dari Sekadau yang belajar kepada Habib Husein di Mempawah. Setelah pulang ke Sekadau dia mendirikan mesjid Jami Sekadau.

Ulama dan umara bersatu padu dalam menjalankan dakwah untuk mencerdaskan umat manusia. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sakina Assegaf, dia menyatakan bahwa moyangnya datang ke Kalimantan Barat dalam rangka berdakwah sekaligus berdagang. Mereka memiliki kios buku-buku agama di pasar Dahlia Sungai Jawi. Hal senada juga diungkapkan oleh Syarifah Fatima al-Haddad, bahwa moyangnya datang dari Tarim al-Hadramaut dalam rangka menyebarkan dakwah.

Kaum al-Hadramaut yang bergerak lewat dakwah kultural melalui ekonomi dan pendidikan mengantarkan masyarakat Kalimantan Barat terbebas dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Melalui pendidikan yang terorganisir, melahirkan generasi yang kritis terhadap kondisi daerahnya. Mereka tampil sebagai manusia merdeka yang melahirkan karya-karya hebat yang menginspirasi masanya. Terjadi dialog pengetahuan di antara ulama kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat.

### **Pendekatan Dakwah Struktural**

Pendekatan dakwah struktural identik dengan dakwah politik atau politik dakwah. Dalam hal ini kaum al-Hadramaut melakukan dakwah di Kalimantan Barat selain menggunakan pendekatan kultural sebagaimana yang sudah dibahas di atas. Mereka juga melakukan dakwah secara struktural.

Menurut Abu Bakar, kaum Hadramaut yang ada di Kalimantan Barat sangat beragam, di antaranya: al-Qadri, Al-Idris, Ba'bud, al-Haddad, al-Muthahar, al-Barakba, as-Segap, Shahab, al-Habsyi, Yahya, al-Aidit, Fallogah, as-Syifa, al-Madhali dan lain-lain. Mereka menjalankan tarekat Alawi yang lebih bernuansa tarekat akhlaqi. Marga al-Qadri dan al-Idrus mendirikan kerajaan di Kalimantan Barat, al-Qadri mendirikan kerajaan Pontianak sedangkan al-Idrus mendirikan kerajaan Kubu. Adapun marga Fallogah lebih banyak berkecimpung di istana sebagai menteri dan pejabat. Marga al-Idrus mengalami penurunan jumlah, sebagian besar di antar mereka migrasi ke Sarawak sewaktu kerajaan Kubu berada di bawah kendali penjajah Belanda. Mereka lebih dekat dengan Inggris.

Al-Haddad bergerak dalam bidang pendidikan sampai sekarang. Ada beberapa pondok yang diprakarsai oleh mereka. salah satu tokoh terkemuka yakni ustadz Shaleh bin Alwi al-Haddad, lahir di kota Nizab Yaman Selatan, tahun 1908. Dia ke Tarim untuk menuntut ilmu agama. Setelah itu ke Kalimantan Barat melalui Singapura. Mereka meninggalkan Yaman dalam rangka berdakwah sambil berdagang, adapun barang dagangan mereka seperti kopiah, pelekat (kain sarung), peci, minyak zaitun, jadam (obat tradisional sehabis melahirkan), kitab. Tokonya ada di pasar besar Senghi.

Proses islamisasi dengan pendekatan struktural dapat dibagi ke dalam tiga tahap: pertama: kedatangan, yakni tahap para muballigh dari Yaman mendatangi wilayah Kalimantan Barat dari segala penjuru. Mereka masuk ke Kalimantan Barat melalui Jawa, Brunei, Singapura dan lain-lain. Kedatangan mereka di Kalimantan Barat semakin ramai setelah Portugis merebut Malaka. Aju dan Zainuddin Isman dalam Patmawati dan Fitri Kusumayanti (2015: 2) mengatakan bahwa Malaka adalah sebuah Bandar yang menjadi pusat perdagangan penting dan ramai. Kapal-kapal dagang dari jazirah Arab dan India yang lebih dulu berdagang ke negeri Cina, menjadikan Bandar Malaka sebagai tempat persinggahan kapal-kapal mereka. Ketika berlayar menuju Cina, kapal-kapal dagang yang berlayar dari Malaka melintasi pantai barat dan utara pulau Kalimantan (Borneo) yang ketika itu dikuasai oleh kerajaan Melayu Brunei dan sekutunya Kerajaan Sambas.

Para pendatang dari Yaman membuka pemukiman-pemukiman baru yang kelak mereka menjadi penguasa di tempat tersebut. Syarif Idrus membuka Ola-olak Kubu, terus ke Sungai Terentang di persimpangan tiga sungai. Begitu juga dengan Syarif Abdurrahman al-Qadri membangun satu kawasan pemukiman di tepi Sungai Kapuas,

tidak jauh dari muara sungai Landak. Kedua kerajaan ini berdiri di tepi sungai, menandakan sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan kehidupan dari sektor perdagangan. Sungai adalah lalu lintas perdagangan pada masa itu sampai sekarang.

Kedua, tahap penyebaran. Setelah berdirinya pemukiman, para muballigh dari Yaman selain sebagai pedagang mereka juga berdakwah. Pembuka lahan selalu menyediakan mesjid sebagai pusat peribadatan sekaligus sebagai tempat belajar agama Islam. pembuka lahan, ulama dan pedagang bersatu padu menyebarkan Islam, sehingga terjadi konversi agama, semula adalah penganut agama Hindu-Budha bahkan ada penganut agama Kaharingan menjadi pengikut agama Islam.

Ketiga, tahap pelebagaan, puncak kemajuan Islam di sebuah wilayah ditandai dengan lahirnya kerajaan Islam yang diakui oleh kerajaan lain seperti Kerajaan Kubu dan kerajaan Pontianak. Dalam tahap pelebagaan, setiap kerajaan mengangkat mufti atau hakim yang mengurus persoalan agama. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa kerajaan yang semula adalah kerajaan Hidu-Budha menjadi kerajaan Islam.

Islam masuk ke Kalimantan Barat melalui beberapa jalur, diantaranya: perdagangan, yakni jalur para imigran muslim berdatangan ke Nusantara termasuk Kalimantan Barat. Ada beberapa tokoh yang bisa disebutkan seperti Habib Husein al-Qadri, Syarif al-Idrus, Sayyid Jamaluddin. Melalui jalur perdagangan inilah mereka menjalin hubungan komunikasi dengan berbagai macam strata. Sebuah kerajaan yang maju pasti akan menjalin hubungan yang baik dengan para pedagang dalam rangka memajukan perekonomian kerajaannya. Apalagi orang-orang Arab adalah penguasa perdagangan perantara antara Timur dan Barat.

Keberhasilan kaum imigran Arab dalam perekonomian menyebabkan mereka dapat membangun tempat-tempat ibadah, bahkan mendatangkan orang-orang yang menaruh perhatian pada agama saja tanpa disibukkan dengan urusan duniawi. Para pedagang melahirkan generasi yang dari segi ekonomi sangat mapan ditambah dengan pendidikan yang tinggi mengakibatkan banyak di antara mereka bisa masuk ke dalam kalangan istana. Pada akhirnya menguasai perekonomian dan kekuasaan.

Islamisasi dilakukan lewat jalur perkawinan, seperti Habib Husein al-Qadry yang menikah dengan Nyai Tua, orang Dayak kerabat kerajaan Matan. Dari perkawinan mereka berdua melahirkan Syarif Abdurrahman al-Qadri yang akhirnya menikah dengan Utin Cendramidi anak Opu Daeng Manambon dari kerajaan Mempawah. Perkawinan Utin Cendramidi anak Opu Daeng Manambung raja Mempawah dengan Syarif Abdurrahman al-Qadri anak Habib Husein al-Qadri mufti kerajaan Mempawah memperlihatkan terjadinya hubungan geneologis antara politisi dan agamawan.

Penyebaran Islam juga dilakukan dengan jalur pendidikan, melalui pengajian dan pendirian madrasah serta pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai dan ulama. Mereka yang sudah mendapatkan pendidikan dan memperoleh



pengakuan dari gurunya melanjutkan ajaran gurunya di kampung halaman mereka. seperti Habib Husein yang mengajari masyarakat Mempawah, Sekadau, dan masyarakat yang berada di luar kerajaan Mempawah. Di Kubu, Syarif Abdullah memainkan peran penting dalam upaya menanamkan pendidikan.

Jalur tasawuf sangat kental dalam penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Pengajar-pengajar tasawuf, atau para sufi, mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Kalimantan Barat. Mereka mahir dalam soal-soal magis, memadukan antara budaya masyarakat setempat dengan nilai-nilai Islam. Mereka cermat mendiagnosa keinginan dan kecenderungan masyarakat setempat, konsisten memelihara tradisi lama yang baik dan memasukkan tradisi yang Islam yang selaras (Aripuddin, 2013: 119), bahkan ada yang bisa mengawini keluarga istana.

Melalui tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk setempat mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu sehingga agama Islam mudah dimengerti dan diterima. Mereka mengajari masyarakat mengucapkan kalimat syahadat, menikah dan mati secara Islam, belum sampai pada tataran syariat. Habib Husein mengajarkan Islam dengan metode tasawuf. Metode ini diyakini menjadi kunci keberhasilan para ulama tersebut dalam mengislamkan masyarakat Kalimantan Barat setelahnya.

Dalam perkembangannya, muncul tarekat di Kalimantan Barat. Tarekat yang cukup besar berkembang di Kalimantan Barat adalah Tarekat Naqsyabandiyah Muzhariyah. Tarekat ini awalnya diperkenalkan oleh Ismail Jabal di Kubu, akan tetapi tidak terlalu berkembang. Perkembangan tarekat Naqsyabandiyah Muzhariyah mengalami puncaknya ketika seorang ulama yang berasal dari Sumenep, Madura bernama Kyai Fathul Bari tinggal di Peniraman. Kyai Fathul Bari datang dan tinggal di Peniraman atas permintaan Kyai Hasyim Yamani, pendiri Pondok Pesantren tertua di Kalimantan Barat, Babussalam. Setelah Kyai Fathul Bari wafat, tarekat ini dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Habib Amin al-Hinduan di Pontianak. Kemudian, sepeninggal Habib Muhsin, putranya diangkat menjadi mursyid, Habib Amin al-Hinduan di Singkawang sampai saat ini. Pengikut tarekat ini sangat ramai di Kalimantan Barat, terutama warga dari etnis Madura (Patmawati dan Elmansyah, 2018: 271).

Jalur kesenian digunakan dalam proses islamisasi di Kalimantan Barat. Kesenian yang amat terkenal dan sering ditampilkan adalah japing dan hadrah. Peneliti menemukan salah satu kitab hadrah yang sering digunakan istana adalah Diwan Hadra tidak tercantum nama pengarang. Kitab ini berisi tentang syair pujian dan shalawat kepada baginda Nabi Saw., kitab ini ditulis dengan bahasa dan aksara Arab.

### Peran Al-Hadramaut

Perkembangan Islam di Kalimantan Barat, tidak terlepas dari peranan orang tua dari Syarif Abdurrahman al-Qadri, yakni Habib Husain al-Qadri. Dia memulai pengajaran agama Islam di wilayah Kerajaan Matan-Tanjungpura pada masa pemerintahan Sultan Zainuddin sekaligus sebagai Mufti Kerajaan. Setelah 17 tahun lamanya Habib Husain al-Qadri menjadi mufti di Kerajaan Matan, maka Dia hijrah ke Sebukit (Kerajaan Mempawah), memenuhi undangan Opu Daeng Manambung (Pangeran Mas Surya Negara). Sejak tersiar luas kabar yang mengatakan seorang ulama besar (mufti Kerajaan Matan) telah pindah dan menetap di Kerajaan Mempawah, maka perahu-perahu berupa kakap/penjajab dan bandung dari hulu Kapuas datang berkunjung sambil berniaga dan menuntut ilmu agama Islam. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan Gusti Saleh (keturunan Raja Sekadau) bahwa orang tua Sultan Anom (Abang Todong) yang bernama Pangeran Suma pernah dikirim orang tuanya (Pangeran Kadar) mendatangi Mempawah untuk memperdalam pengetahuannya, terutama dalam bidang agama Islam. Setelah Dia meninggal, Sultan Anom menjadi raja, dan pada masa pemerintahannya didirikan Masjid Jami' Taqwa pada tahun 1804.

Kemasyhuran Habib Husain al-Qadri semakin tersiar setelah menikahkan anaknya Syarif Abdurrahman al-Qadri yang berusia 18 tahun dengan anak Opu Daeng Manambung, Utin Cendramidi. Dari hasil pernikahan ini lahir seorang anak bernama Syarif Qasim al-Qadri, yang kelak menjadi Sultan Pontianak ke-2 (Rachman, 2009: 43).

Sebelum Kerajaan Pontianak didirikan, Syarif Abdurrahman al-Qadri telah terkenal sebagai seorang yang berjiwa maritim. Lawatannya ke Banjarmasin pada tahun 1768 dan mengawini puteri Raja Banjar (Sultan Sepuh) yang bernama Ratu Syahrinum. Keberadaannya di Banjar adalah saat yang paling berharga dalam pendirian kerajaannya kelak (Pontianak), karena Banjarmasin pada waktu itu merupakan bandar niaga yang ramai dikunjungi kapal-kapal, menggantikan peranan Makassar yang telah mulai jatuh, disebabkan peperangan yang berkepanjangan antara pasukan Makassar dan pasukan Bugis dan Belanda, sejak tahun 1667-1669 (Robinson dan Mukhlis, 2005: 114).

Setelah menjadi raja, Syarif Abdurrahman al-Qadri mampu membawa Kerajaan Pontianak menjadi wilayah perniagaan yang sukses bahkan menandingi Kerajaan Sambas, yang waktu itu banyak dihuni oleh etnis Cina yang terkenal sebagai pemain hebat dalam perdagangan. Hal ini disebabkan karena Sultan Pontianak memberikan jaminan keamanan kepada para peniaga. Kerajaan Pontianak dan pelabuhannya terkenal di kalangan kapten kapal dagang Eropa. Pada awal abad kesembilan belas telah berjaya menarik kebanyakan pedagang luar negeri Pantai Barat. Akibatnya, pada tahun 1812, lebih banyak barang yang diimport melalui Pontianak bagi kegunaan orang Cina di Sambas daripada melalui Sambas sendiri dan hal ini menyebabkan Pontianak beroleh kekayaan dengan perniagaan, Sambas semakin merosot (Irwin, 1986: 30).



Pendirian Kerajaan Pontianak diawali oleh pembangunan mesjid yang diberi nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Arsitektur masjid lebih terlihat nuansa akulturasi daripada makna filosofi. Dari sisi bentuk, wujudnya akulturasi dalam pengambilan arsitekturnya maupun dalam pembangunannya. Pada awal berdirinya mendekati bentuk arsitektur Masjid Demak, dengan denah bujur sangkar dan atap susun dua yang keempat tiang memikul struktur atap masjid ini.

Setelah selesai pembangunan masjid, Sultan Sayarif Abdurrahman mulai memikirkan pembangunan tempat tinggal, yang di kemudian hari berkembang menjadi Kesatuan Keraton Kadariah. Sesudah kedua bangunan ini berdiri, maka Sultan melanjutkan membangun dan membuka wilayah lainnya, sehingga banyak pendatang baru yang berdatangan dari wilayah pehuluan maupun dari wilayah lain. Pada tahun ketujuh melalui keputusan musyawarah maka diangkatlah Sultan Syarif Abdurrahman menjadi sultan pertama Kerajaan Pontianak, yang dihadiri oleh sultan dari Kerajaan-kerajaan Borneo Barat, Kerajaan Palembang, Kerajaan Banjar, Raja Muda Riau dan lainnya. Masjid Sultan Syarif Abdurrahman berada di daerah Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur (Aminah, 2011: 80-81). Sultan Syarif Abdurrahman al-Qadri beserta keluarga dan keturunannya yang telah mangkat (wafat) dimakamkan di Batu Layang (makam raja-raja Pontianak) (Suryadi, 2003: 28).

Dakwah dalam bidang politik memperlihatkan kontribusi besar dalam perkembangan Islam, Islam mampu menarik penguasa non muslim memeluk agama Islam seperti yang terjadi pada raja Landak. J.C. Van Leur menyebutkan bahwa motivasi penguasa memeluk Islam bertujuan untuk mempertahankan kedudukan mereka. dengan kata lain, agama Islam dijadikan sebagai instrument politik untuk memperkuat kedudukan kerajaan mereka (Supriyadi, 2018: 196). Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah Borneo. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu.

Pemimpin informal dalam dakwah suatu sifat atau sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang yang menyampaikan dakwah (dai) yang mendukung fungsinya untuk menghadapi publik dalam berbagai situasi. Dai dengan sifat dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai pemimpin masyarakat oleh karena itu sikap kepemimpinan harus dimiliki oleh seorang dai. Dai harus mampu menanamkan tata nilai yang islami dengan penuh simpati, santun, tanpa kekerasan.

Kaum Hadramauth sebelum menjadi raja, mereka mengawali kariernya sebagai pemimpin informal, cikal bakal inilah yang mengarah pembentukan kerajaan baru dengan dukungan kelompok pedagang dari kaum al-Hadramaut dan juga pendukung setia dalam kelompok tersebut (Lapidus, 1999: 62). Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan Syarif Abdurrahman al-Qadri mendirikan kerajaan Pontianak. Kegiatan berdagang sudah dimulai sejak usia muda, berdagang lada ke Banjarmasin.

Syarif Abdurrahman al-Qadri juga terkenal sebagai seorang yang berjiwa maritim. Lawatan-lawatannya ke Banjarmasin pada tahun 1768 dan mengawini puteri Raja Banjar (Sultan Sepuh) yang bernama Ratu Syahrinum. Keberadaannya di Banjar adalah saat yang paling berharga dalam pendirian kerajaannya kelak (Pontianak), karena Banjarmasin pada waktu itu merupakan bandar niaga yang ramai (Robinson dan Mukhlis, 2005: 114).

Syarif Abdurrahman al-Qadri bersama keluarga dan pengikut (Bugis dan Melayu) berangkat mencari suatu kawasan untuk dijadikan pemukiman baru bagi mereka. Rombongan ini dikepalai oleh juragan Daud. Pada tanggal 23 Oktober 1771 rombongan Syarif Abdurrahman al-Qadri memasuki kawasan pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Wilayah inilah yang kelak menjadi istana Kesultanan Qadariah Pontianak (Usman, 2016: 29).

Orang-orang Bugis yang ikut migrasi bersama Syarif Abdurrahman al-Qadri untuk menemukan pemukiman baru, tidak terlepas dari keberadaan Utin Cendramidi, sebagai anak raja keturunan Bugis. Menurut Andaya (2004: 261) bahwa kebanyakan pimpinan dari kalangan istana atau bangsawan tinggi, memiliki pengikut yang sangat banyak. Mereka selalu mengumpulkan pengikut dari kerabat, rakyat, budaknya, dan individu-individu lain yang terikat oleh hubungan “patron-klien”.

Syarif Abdurrahman al-Qadri beserta rombongan membuat suatu anggaran dasar atas prinsip-prinsip Melayu asli. Inti kedaulatan tinggal pada pendiri-pendiri bersama penghuni-penghuni pertama kota Pontianak dan keturunannya. Tanah dinyatakan milik negara yang tidak dapat dialihkan, setiap penduduk mendapat tanah sesuai keperluan, tetapi tak dapat diperjualbelikan atau disewakan, diwariskan, hanya pemerintah yang memiliki hak menunjuk pemilik baru terhadap tanah yang kosong. Untuk memiliki tanah tidak ada tuntutan pembayaran. Orang yang tinggal di luar kota Pontianak tidak mempunyai hak sipil. Kepala negara tidak boleh menuntut pajak atau bantuan-bantuan pribadi, dia juga tidak berhak memiliki senjata kecuali untuk melindungi kota. Sepeninggal Syarif Abdurrahman al-Qadri, penggantinya dipilih oleh penduduk dari keturunan Syarif Abdurrahman al-Qadri yang paling baik dan banyak disukai penduduk.

Seiring berjalannya waktu, kerajaan Pontianak menjadi kota dagang Pontianak diuntungkan oleh letaknya yang sangat strategis di wilayah Khatulistiwa, karena perputaran bumi maka arah musim timur maupun musim barat di wilayah ini mengalami perubahan. Musim timur beralih menjadi angin barat, demikian pula musim barat beralih menjadi angin timur, ketika melintasi Khatulistiwa. Keadaan ini sangat menguntungkan pelayaran dan perdagangan di Pontianak, karena para pelaut bisa menemui dua arah baik pada masa musim barat maupun musim timur ketika mereka melintasi kawasan Khatulistiwa. Hal inilah yang menyebabkan kapal-kapal dari berbagai penjuru berlabuh di Pontianak. Mereka menjadikan Pontianak sebagai tempat

menyimpan dan menyalurkan barang dagangan, pertemuan antara pembeli dan penjual. Pontianak berkembang sebagai pasar yang tidak hanya menampung produk-produk dari hulu, rempah-rempah tetapi juga hasil kerajinan berbagai bangsa, utamanya sutera dan guci-guci dari Cina.

Lewat perdagangan inilah, Pontianak menjadi kerajaan yang kaya dan kuat, membuat raja-raja di hulu irihati dan cemas akan kekayaan dan kekuatan kerajaan Pontianak, yang setiap saat ada kemungkinan mengancam kerajaan mereka. Mereka bersepakat untuk menghancurkan kerajaan yang baru tumbuh. Kesepakatan mereka tidak mendapat persetujuan dari Panembahan Adi Jaya penguasa Mempawah, alasannya karena kerajaan Pontianak satu koloni dengan kerajaan Mempawah. Syarif Abdurrahman adalah suami Utin Cendramidi adik Panembahan Adi Jaya. Mengganggu kerajaan Pontianak berarti berhadapan dengan kerajaan Mempawah dan seluruh koloninya yang menguasai wilayah Melayu (Willer, 2015: 8).

Pemimpin informal diperoleh kaum al-Hadramaut karena peran mereka dalam dunia pendidikan, baik dalam bentuk pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh mereka. pesantren atau pondok merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam. setelah keluar dari suatu pesantren, mereka kembali ke masing-masing kampung atau desanya. Mereka kemudian menjadi tokoh keagamaan atau kyai yang menyelenggarakan pesantren di tempat-tempat asal mereka. dengan demikian, pesantren-pesantren beserta kiai-kiai berperan penting dalam proses pendidikan masyarakat. (Rofiq, 2019: 368-369).

Pesantren-pesantren yang terdapat di Kalimantan Barat banyak yang diprakarsai dan didirikan oleh al-Hadramaut, seperti Pesantren Habib Shaleh Haddad yang dipimpin oleh Habib Hasan bin Mustafa al-Haddad di Parit Masigi. Pesantren Darun Naim di Ampera, pesantren As-Salam di Pal V, dan Pesantren al-Jihad Sungai Jawi.

## **KESIMPULAN**

Faktor yang melatarbelakangi kaum al-Hadramaut datang ke Kalimantan Barat antara lain: faktor politik, ekonomi, dan dakwah. Faktor politik, sejak kematian Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin, kekuasaan di bawah pemerintahan Bani Umayyah kemudian Bani Abbasiyah. Hak politik Bani Hasyim dikekang dan tidak diberikan peluang, Hal inilah yang membuat mereka meninggalkan Hijaz menuju Yaman. Posisi Yaman yang sangat strategis dan pekerjaan mereka sebagai pedagang sekaligus dai membuat mereka melakukan perdagangan ke wilayah Nusantara sekaligus berdakwah.

Kaum al-Hadramaut dalam berdakwah melakukan dua pendekatan yakni pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Mereka melakukan dakwah kultural yakni berdakwah dengan mengakomodasi nilai budaya setempat dan melakukan inovasi

tanpa menghilangkan substansi agama. Selanjutnya mereka melakukan dakwah struktural ditandai dengan lahirnya kerajaan Islam mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan lain-lain.

Mengenai pengaruh al-Hadramaut sebagai pemimpin formal dan informal di masyarakat, pemimpin formal dengan lahirnya kerajaan Kubu dan kerajaan Pontianak yang didirikan oleh al-Hadramaut dan keturunannya. Sebagai pemimpin informal mereka banyak berperan dalam dunia perdagangan dan memiliki banyak pengikut begitu juga dengan pendidikan, mereka memiliki banyak murid dan pengikut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aju dan Zainuddin Isman. (2017). *Kalimantan Barat: Lintasan Sejarah dan Pembangunan dari Era Kolonial Belanda*. Pontianak: Derwati Press.
- Aminah, Syarifah. (2011). *Profil Masjid Sultan Abdurrahman*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Andaya, Leonard Y. (2004). *Warisan Arung Palaka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Makassar: ININNAWA.
- Aripuddin, Acep. (2013). *Sosiologi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Audina, Nana, (2018). *Sistem Pemerintahan Good Governance Umar bin Abdul Aziz*. Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. Terj. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ibrahim, Umar. (2001). *Thariqah Alawiyah Napak Tilas dan Studi Kritis atas Sosok dan Pemikiran Allamah Sayyid 'Abdullah al-Haddad Tokoh Sufi Abad ke-17*. Bandung: Mizan.
- Irwin, Graham. (1986). *Nineteenth Century Borneo-A Study in Diplomatic Rivalry*. Terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Jabbar, Luqman Abdul. (2013). *Sejarah Kerajaan Kubu*. Pontianak: STAIN Press.
- Kesuma, Andi Ima. (2004). *Migrasi dan Orang Bugis*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo, (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Patmawati, (2014). *Migrasi Orang Bugis Kalimantan Barat Abad XX-XXI*, Disertasi UIN Makassar.
- , (2014). "Hubungan Kerajaan Sambas dengan Kerajaan Brunai," dalam Makalah yang disampaikan pada seminar Manuskrip di Brunai Darussalam.
- dan Fitri Kusumayanti, (2015). "Laut dan kekuasaan" Makalah seminar Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.
- dan al Fahri Zakirman, (2018). "Nasehat Raja Kubu Kajian Analisis Kitab Nasihat Zaman Karya Syarif Saleh Aidrus Al-Idrus (1356 H)." Makalah disampaikan pada Forum Dekan Dakwah di IAIN Antasari Banjarmasin.

- dan Elmansyah, (2018). “*Sejarah & Eksistensi Tasawuf di Kalimantan Barat.*” Hasil penelitian IAIN Pontianak.
- Rachman, Abror Abd., (2009). *Pantun Melayu Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara.* Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, Ansar, dkk., (2000). *Syarif Abdurrahman Alkadri Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak.* Pontianak: Romeo Grafika.
- Robinson, Kathryn, dan Mukhlis Paeni, (2005). *Tapak-tapak Waktu Sejarah, Kebudayaan dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan.* Makassar: ININNAWA.
- Rofiq, Choirul Ahmad. (2019). *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam,* Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sukayat, Tata, (2015). *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi ‘Asyarah.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Supriyadi, Dedi, (2018). *Sejarah Peradaban Islam.* Bandung: Pustaka Setia.
- Suryadi, Nedi, (2003). *Lontara Assiajingga Daeng (Wajok Hilir).* Manuskrip.
- Suryani, Ellyas Soren dkk. (2001). *Sejarah Mempawah dalam Cuplikan Tulisan.* Kabupaten Pontianak: Bina Ilmu Mempawah.
- Usman, Syafaruddin MD, (2016). *Pontianak Doeloe-Kini-Mendatang.* Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak dan Mitra Bangun Kota.
- Willer, J.T. (2015). *Kronik Mempawah (dan Pontianak).* Yogyakarta: Pohon Cahaya.

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENYULUHAN PENGARUH LINGKUNGAN  
TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK DI SDN 21  
SUNGAI RAYA**



DISUSUN OLEH :  
FITRI ANDINI (12114048)

**PROGRAM PSIKOLOGI ISLAM  
FAKULTAS USULUDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
2023**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**PENYULUHAN PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP**  
**PERKEMBANGAN ANAK DI SDN 21 SUNGAI RAYA**

**A. PENDAHULUAN**

Seorang ahli psikologi dari Amerika bernama Urie Bronfenbrenner (1917-2005) merumuskan teori ekologi dalam psikologi perkembangan untuk menjelaskan bagaimana kualitas yang diwarisi oleh seorang anak dan lingkungan tempatnya berinteraksi dapat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak. Melalui teori ekologinya tersebut, Bronfenbrenner menekankan pentingnya untuk mempelajari seorang anak dalam konteks lingkungan yang beragam yang juga dikenal dengan istilah sistem ekologi dalam usaha untuk memahami proses perkembangannya. Seorang anak biasanya akan berada dalam ekosistem lingkungan yang beragam, dari lingkungan yang paling akrab di rumah menuju lingkungan luar ke sekolah dan ke lingkungan yang paling luas yaitu budaya dan masyarakat. Teori ekologi yang merupakan salah satu dari teori psikologi perkembangan berpendapat bahwa kita akan menghadapi berbagai lingkungan yang berbeda di sepanjang rentang usia kita yang dapat mempengaruhi perilaku kita dalam berbagai segi.

**B. RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 dengan rencana agenda acarasebagai berikut :

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
07.00 – 07.15	Pengenalan Prodi	Fitri Andini dan Dini Asmi W
07.15 – 07.45	Penyuluhan	Fitri Andini
07.45 – 08.00	Ice Breaking	Fitri Andini
08.00 – 08.30	Penyuluhan	Dini Asmi W
08.30 – 08.55	Sharing	Dini Asmi W
08.55 – 09.00	Foto Bersama	Fitri Andini dan Dini Asmi W



### C. TUJUAN KEGIATAN

Adapun Tujuan kegiatan Penyuluhan Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak di SDN 21 Sungan Raya diantaranya adalah :

1. Berbagi pengetahuan kepada siswa-siswi SDN 21 Sungai Raya tentang lingkungan sekitar dan pengaruhnya.
2. Berbagi pengetahuan kepada siswa-siswa SDN 21 Sungai Raya tentang bagaimana lingkungan yang baik dan bagaimana menjaga lingkungan tersebut.
3. Berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai kondisi lingkungan sekitar.

### D. DESKRIPSI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 dengan agenda sebagai berikut :

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pelaksana</b>
07.00 – 07.15	Pengenalan Prodi	Fitri Andini dan Dini Asmi W
07.15 – 07.45	Penyuluhan Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak	Fitri Andini
07.45 – 08.00	Ice Breaking	Fitri Andini
08.00 – 08.30	Penyuluhan Dampak dari Toxic Friendship Terhadap Perkembangan Anak Usia 6 – 11 Tahun	Dini Asmi W
08.30 – 08.55	Sharing	Dini Asmi W
08.55 – 09.00	Foto Bersama	Fitri Andini dan Dini Asmi W

### D. PESERTA KEGIATAN

Peserta pada kegiatan penyuluhan Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak ini ialah siswa-siswa kelas 6 A SDN 21 Sungai Raya berjumlah 23 orang, dengan nama sebagai berikut :



NO	Nama Peserta	NO	Nama Peserta
1	Afra Nauri Ulil Azka	13	Nur Dwi Yunita
2	Aldi Gunawan	14	Pazzar Rickar
3	Ayu Permata Dewi	15	Pretty Novita Sari
4	Cindy Ashary	16	Putra Ramadhan
5	Dinda Pusvita	17	Queisha Anya Fernanda
6	Fabian	18	Rahmad Rizqi Ashar Ramadhan
7	Fatahillah Abrar	19	Rhafa Andriansyah
8	Fitra Hafiz Ayusra	20	Sabrina Oktaviani
9	Melani Syafira	21	Safa Aulia Ramadhani
10	Meliana	22	Sahril
11	Nabila Ferdiana	23	Silfa Aprilia
12	Novrisya Wandaniati		

## **F. HASIL KEGIATAN**

Pada saat penyuluhan berjalan dengan baik dan lancar, siswa/siswi yang mengikuti penyuluhan ini berjumlah 23 orang dari kelas 6A SDN 21 Sungai Raya. Para siswa/siswi sangat antusias mendengarkan pemaparan yang dijelaskan oleh fasilitator diskusi hingga akhir diskusi. Siswa/siswa pun aktif dalam memberikan kontribusinya seperti bertanya hal yang belum mereka pahami dan berbagi pengalaman mereka.

Diawal kegiatan kami melakukan pengenalan terlebih dahulu, mulai dari memperkenalkan diri serta memperkenalkan program studi Psikologi Islam. Setelah itu kami selaku fasilitator diskusi bergantian memberikan pemaparan materi dimulai dari saya dengan tema "Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak", alat peraga yang digunakan berupa mading dan brosur. Setelah pemaparan selesai dilanjutkan dengan ice breaking berupa games dan tanya jawab dimana siswa/siswi sangat antusias. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan selanjutnya dengan tema "Dampak Dari Toxic Friendship Terhadap Perkembangan Anak Usia 6-11 Tahun", alat peraga yang digunakan juga berupa mading dan brosur. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi sharing dimana para siswa/siswi saling bertukar cerita dan pengalaman kemudian ditanggapi oleh siswa/siswi lainnya juga.

## **G. LAMPIRAN**

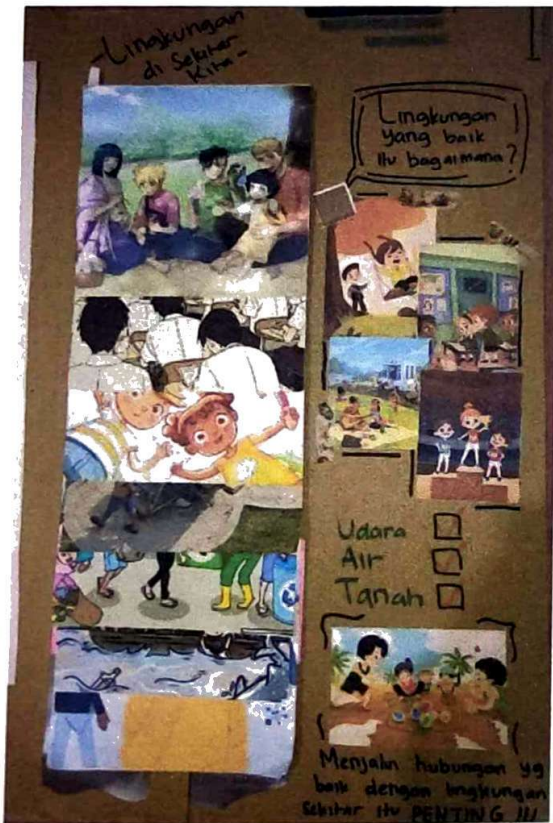
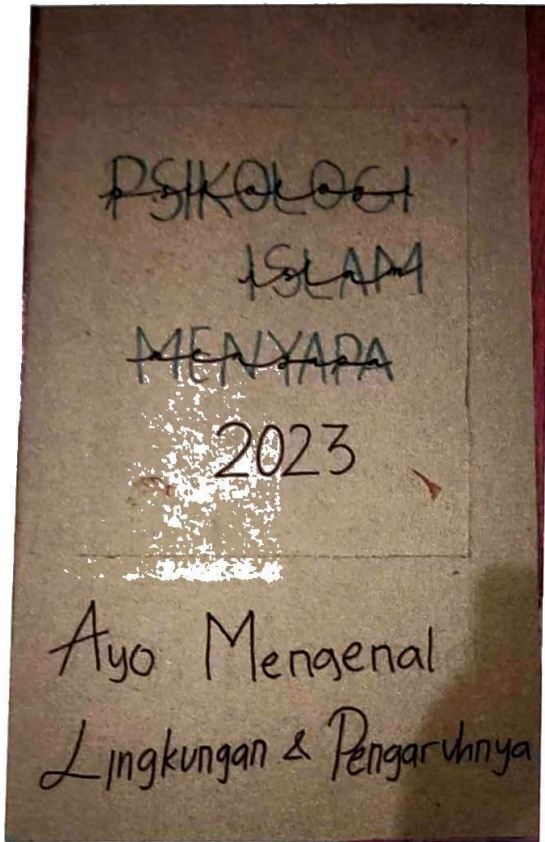
### **Dokumentasi**







**Mading**



# Mengenal Lingkungan

KENALI LINGKUNGAN SEKITAR KITA



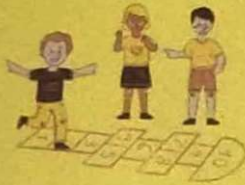
KELUARGA



SEKOLAH



RUMAH



TAMAN BERMAIN



BUDAYA



COVID-19

"Lingkungan sehat adalah lingkungan yang udara, air, serta tanahnya bersih dan terbebas dari segala bentuk pencemaran atau polusi"



Lingkungan kesehatan sangat penting untuk dijaga, ayo terapkan hidup sehat dengan menjaga lingkungan sekitar kita.

Ayo jaga lingkungan sekitar kita karena lingkungan yang baik akan menghasilkan individu yang baik pula.






## Flayer



# Psikologi Islam Menyapa 2023

 **SDN 21 Sungai Raya**  
Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

 **Rabu, 11 Januari 2023**  
Pukul 07.00 - 09.00 WIB



### **Dini Asmi Wardani**

Mahasiswa Psikologi Islam

**Dampak Dari Toxic Friendship Terhadap Perkembangan Anak Usia 6-11 tahun**



### **Fitri Andini**

Mahasiswa Psikologi Islam

**Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak**



#### **Fasilitas**

- Makanan ringan
- Air
- Brosur
- Mading

#### **Kontak Informasi**

0877-7876-1058 (Dini)  
0812-5634-2438 (Fitri)





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
Jl. Letjen. Soeprpto Nomor 19 Telp. (0561) 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.fuad.iainptk.ac.id](http://www.fuad.iainptk.ac.id)

Nomor : B-1605/In.15/FUAD/HM.00/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penyuluhan Psikologis

Pontianak, 12 Desember 2022

Yth.  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

Seiring do'a mudah-mudahan Bapak/Ibu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT dan sehat selalu.

Sehubungan dengan salah satu Tugas Akhir mahasiswa kami dalam mata kuliah psikologi perkembangan 1, dengan ini kami Prodi Psikologi Islam FUAD IAIN Pontianak bermaksud mengadakan Penyuluhan Psikologi di sekolah atau instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Dengan ini kami memohon kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan ijin kepada kami untuk melakukan penyuluhan dimaksud. Untuk itu kami menyampaikan rentang waktu penyuluhan tanggal 2-13 Januari 2023 dan penyuluhan dilakukan selama 2 jam dalam 1 hari dan menyesuaikan kesediaan waktu dari instansi yang bapak/ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

Pontianak, 12 Desember 2022  
a.n Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Katua Program Studi Psikologi Islam



Abdullah Syifa.,M.Pd





PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 21 SUNGAI RAYA

Jalan Adisucipto Km. 13,5 Gang Limbung Desa limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kode Pos 78391  
NSS : 110130214021

NPSN : 30100879

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 421.2/159/SDN21/1/2023

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami, SDN 21 Sungai Raya Memberi keterangan bahwa keterangan bahwa nama dibawah ini :

NAMA : Fitri Andini  
NIM : 12114048  
Dosen Pendamping : Ema Zati Baroroh, M.PSi., PSIKOLOG.  
Instansi : IAIN Pontianak

Telah melakukan kegiatan penyuluhan "Psikologi Islam Menyapa 2023" Bersama SDN 21 Sungai Raya dan Prodi Psikologi Islam FUAD IAIN Potianak, dengan tema "Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak" yang dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023  
Tempat : SDN 21 Sungai Raya  
Waktu : 07.00 - 09.00 WIB

Demikian surat keterangan ini kami gunakan sebagaimana mestinya

Plt, Kepala SDN 21 Sungai Raya

**Subarto, S.Pd**  
Nip. 19640809 198506 1 001



## **KESAN**

Para siswa-siswa dan guru SDN 21 Sungai Raya sangat antusias menyambut kedatangan kami sehingga menimbulkan kesan yang baik bagi kami. Dalam mendengarkan pemaparan materi pun para siswa-siswi sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti rangkaian acara. Para guru SDN 21 Sungai Raya juga memberikan kami banyak dukungan sehingga penyuluhan pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar dan baik hingga akhir acara. Tentu saja penyuluhan kali ini memberikan pengalaman yang baru memberikan pembelajaran yang baru juga bagi saya. Menjadi fasilitator diskusi pada kesempatan kali ini adalah pengalaman yang baru dan berharga bagi saya.

## **H. PENUTUP**

Demikianlah laporan ini dibuat dan disusun dengan sebenar-benarnya.

dsb

Pontianak, 15 Januari 2023

Mengetahui,

Dosen Supervisor Lapangan



EMa Zati Baroroh., S.Psi., M.Psi., Psi

Pelaksana



Fitri Andini

# MONEY

INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DALAM  
PEMBELAJARAN

**2023**

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

## VISI DAN MISI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAIN PONTIANAK

### VISI

“Ulung, Terbuka dan  
Berwibawa dalam  
Menjamin Mutu  
IAIN Pontianak”

---

### MISI

Menyelenggarakan Sistem  
Penjaminan Mutu Secara  
Berencana dan Berkelanjutan yang  
Menjamin Terwujudnya Visi IAIN  
Pontianak